

# **PENDIDIKAN YANG MEMBEBASKAN**

Membalik Paradigma Pendidikan Urban

Rumusan Hasil  
Kongres Kebudayaan Desa  
1 Juni-15 Agustus 2020



# PENDIDIKAN YANG MEMBEBASAKAN

Membalik Paradigma Pendidikan Urban

**Webinar Seri 3**

**Kongres Kebudayaan Desa 2020**

**1-10 Juli 2020**



## **ARAH TATANAN BARU**

Hidup di Era Pandemi dan Sesudahnya

©Sanggar Inovasi Desa 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Diterbitkan oleh Sanggar Inovasi Desa 2020

Kampoeng Mataraman, Jl. Ringroad Selatan, Glugo No. 93,

Panggungharjo, Yogyakarta

Web: [www.sanggarinovasidesa.id](http://www.sanggarinovasidesa.id)

Penanggung jawab	: Faiz Ahsoul
Penyunting	: Yona Primadesi
Penyelia aksara	: Chusna Rizqati
Desain & ilustrasi sampul	: Ketjilbergerak, Arif Gunawan, dan Agus Teriyana
Tata letak isi	: Prima Hidayah

Cetakan pertama, Agustus 2020

Ukuran Buku:

13 x 19 cm, xxxvi + 162 hlm.

ISBN:

Dilarang memperbanyak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan untuk kepentingan akademis, jurnalistik, dan advokasi diperkenankan dalam batas ketentuan yang berlaku.



## Pengantar Editor

Pendidikan dalam perspektif Pembangunan Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi individu agar menjadi subjek yang berkembang secara optimal dan berdaya guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara yang mencakup berbagai dimensi, di antaranya sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dimensi sosial mendorong pendidikan untuk melahirkan insan terpelajar yang berperan dalam setiap gerak perubahan sosial dalam masyarakat. Dimensi budaya menjadikan pendidikan sebagai salah satu wahana utama yang efektif dalam proses transfer nilai, norma,

keluhuran karakter, serta etos masyarakatnya. Dari dimensi politik, pendidikan dituntut untuk mampu mengembangkan kapasitas individu agar menjadi *good citizens* yang memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawabnya. Hakikatnya, pendidikan merupakan sebuah proses budaya yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Dengan kata lain pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia. Prinsip ini kemudian menjadi fondasi utama dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Meski data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019 menunjukkan jika Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang salah satu indikator pengukurannya tingkat pendidikan dan melek aksara, mengalami kemajuan hingga mencapai 71,92, yang artinya meningkat sebesar 0,53 poin atau tumbuh sebesar 0,74 persen dibandingkan tahun 2018<sup>1</sup>. Akan tetapi, sistem pendidikan yang dianut dan dijalankan saat ini dinilai belum mampu menjawab berbagai permasalahan kehidupan masyarakat Indonesia. Di samping itu, dunia pendidikan di Indonesia juga memiliki tugas yang belum tuntas sehubungan dengan pengembangan pendidikan karakter bagi masyarakat, misalnya saja karakter kejujuran dan tanggung jawab.

Sistem pendidikan dinilai telah menceraiberaub tidak hanya nilai-nilai, tetapi juga sumber daya potensial dari akarnya. Keterikatan individu dengan muasalunya semakin diabaikan oleh berbagai sistem kebijakan yang dihasilkan dunia pendidikan. Pendidikan yang semestinya bertujuan untuk mengembangkan potensi dengan

---

1. [www.bps.id](http://www.bps.id)

karakteristik unik setiap individu semata proses transfer pengetahuan, yang kemudian dikenal dengan sistem pendidikan urban atau istilah yang dipopulerkan Paulo Freire, *banking education*<sup>2</sup>.

Namun, sistem pendidikan kita terlihat seakan tak pernah dengan serius menangkap arah itu. Sistem pendidikan yang silih berganti bergantung pejabat pembuat kebijakan menyebabkan ritme pendidikan di Indonesia semacam jalan di tempat. Dunia pendidikan terlihat enggan untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna menyelamatkan masa depan bangsa. Praktik pendidikan seakan dihantui program industri 4.0, kurikulum dibayangi standardisasi PISA yang dirancang OECD ketimbang lebih proaktif mengembangkan sendiri model berdasar potensi-potensi yang dimiliki.

Indonesia dalam konteks pendidikan selalu saja bersemangat untuk belajar dari negara-negara yang telah memiliki sistem pendidikan yang mapan dan maju, yang sayangnya mengindahkan konteks yang membentuk pendidikan ideal di negara-negara tersebut. Hal tersebut tentu saja berimbas pada sulitnya bagi Indonesia untuk menerapkan pendidikan yang kontekstual bagi masyarakatnya.

Meski demikian, apresiasi harus ditunjukkan bagi kelompok-kelompok kecil yang berani mengambil langkah untuk membangun sistem dan model pendidikan yang lebih baik. Misalnya saja, Sanggar Anak Alam (Salam) di Yogyakarta, yang menggunakan model dan

---

2. Freire, Paulo. 1994. *Pendidikan Kau Tertindas*. Jakarta: LP3S



pendekatan pendidikan yang berbeda; Sekolah Alam di Klaten, Jawa Tengah dan banyak lainnya. Anak didik tidak diperlakukan sebagai objek, melainkan subjek yang turut menentukan nasibnya sendiri.

Kelompok-kelompok tersebut seakan ingin menunjukkan bahwa pendidikan yang sesungguhnya terjadi ketika sistem dengan semua perangkatnya memperlakukan anak sebagai subjek yang bebas dan merdeka. Pendidikan bukan semata transfer pengetahuan yang sering kali tidak kontekstual, melainkan juga bagaimana mengajak anak didik menemukan dirinya. Sebab pendidikan pada dasarnya merupakan upaya penanaman sikap, pandangan, nilai-nilai, dan keterampilan hidup. Dunia pendidikan harus menciptakan ekosistem pembudayaan dan pemberdayaan individu.

Pendidikan berkaitan erat dengan moral, perilaku, dan relasi dengan orang lain yang proses internalisasi awal terjadi dalam lingkungan keluarga oleh orang tuanya. Model pendidikan yang demikian menuntut peran partisipatif orang tua dan masyarakat dalam setiap prosesnya. Dan tanpa rekayasa, pandemi Covid-19 ‘memaksa’ pengembalian pendidikan ke lingkungan keluarga dan masyarakat, bukan lagi monopoli sekolah.

Webinar seri 3 dalam rangkaian kegiatan Kongres Kebudayaan Desa 2020 diselenggarakan pada hari kedua, Kamis, 2 Juli 2020, mulai pukul 09.00 WIB bertempat di Kampung Mataraman, khusus membahas tentang **Pendidikan yang Membebaskan: Membalik Paradigma Pendidikan Urban**. Seri kali ini mencoba mengulik persoalan-persoalan dalam dunia pendidikan dan bagaimana



persoalan itu coba diselesaikan dimulai dari tingkatan terkecil, dengan memadukan pendidikan kritis sebagai praktik moral dan politis melakukan lebih dari sekadar penekanan terhadap analisis kritis dan penilaian moral, serta langkah dalam memulai pendidikan yang membebaskan yang berawal dari desa.

Seri ini menghadirkan lima pembicara yang memaparkan gagasan terkait persoalan, pengalaman, maupun sumbang ide dunia pendidikan di Indonesia, yaitu (1) Dr. Samto selaku Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Kemendikbud, (2) Toto Raharjo dari sekolah SALAM, Yogyakarta, (3) Fadilla M. Apristawijaya, M.A dari Sokola Institute, (4) Ahmad Bahrudin, anggota BAN PAUD & PNF, dan (5) Nurhady Sirimorok, perwakilan dari Sekolah Rakyat Petani Payo-payo Maros. Berperan sebagai moderator dalam kegiatan yaitu AB. Widyanta, seorang sosiolog dan juga akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam seri 3 tersebut berupa gagasan maupun solusi terkait dunia pendidikan yang diurai sebagai berikut:

1. Tatanan baru pendidikan di Indonesia selama dan sesudah Covid-19 serta bagaimana tatanan itu bisa dimulai implementasinya di tingkat desa.
2. Peluang penerapan model-model pendidikan yang membebaskan dan memerdekakan di tingkat nasional



sekaligus langkah implementatifnya pada sekolah-sekolah milik pemerintah.

3. Syarat dan standar untuk membangun pendidikan yang membebaskan dan menyokong nilai-nilai kejujuran dan antikorupsi, serta model replikatif yang bisa diterapkan di lingkungan desa.

Tawaran kebijakan strategis setingkat desa untuk memulai pendidikan yang membebaskan dan menyokong nilai-nilai kejujuran dan antikorupsi.

Tawaran program setingkat desa untuk membangun dan mengimplementasikan pendidikan yang membebaskan dan menyokong nilai-nilai kejujuran dan antikorupsi.

Peran sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam pendidikan anak dalam keterlibatan masing-masing sebagai *stakeholder* pendidikan.

Langkah strategis yang ditawarkan dan bisa dilakukan keluarga dan masyarakat dalam upaya menciptakan pendidikan yang membebaskan dan menyokong nilai-nilai kejujuran dan antikorupsi.

Seri webinar kali ini juga berupaya mendorong narasumber untuk sumbang gagasan dan pengalaman, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Akan tetapi, dikarenakan berbagai hambatan, sebagian dari narasumber hanya bisa memaparkan ide dan pengalaman mereka dalam bentuk lisan, yang kemudian dijalin

menjadi sebuah kesatuan tulisan yang utuh oleh tim Kongres Kebudayaan Desa 2020.

Buku ini merupakan luaran dari kegiatan webinar seri ke-6 Kongres Kebudayaan Desa 2020, baik yang ditulis langsung oleh narasumber, tulisan yang merupakan catatan dari tim kongres, maupun beberapa tulisan yang lolos kurasi *Call for Papers*. Semoga tulisan dari webinar seri 6 yang telah berbentuk buku dan berada di tangan pembaca ini mampu menyumbang ide, gagasan, untuk arah Indonesia baru selama dan setelah berakhir Covid-19, yang berpijak dari nilai luhur masyarakat desa. Akhir kata, selamat membaca!

Kampung Mataraman, Juli 2020

Editor





## Sekapur Sirih

*Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta*

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Ada ungkapan Jawa tentang desa yang menyatakan: “Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata”. Dalam UU Otonomi Desa No. 6/2014, ada kewenangan desa secara luas untuk mengatur cara dan mengurus rumah tangga sendiri, tetapi tidak berarti keluar dari tata ketatanegaraan NKRI. Sebelumnya, khusus untuk desa-desa di Yogyakarta, sudah ada landasan UU Keistimewaan DIY No.

13/2012 sehingga UU Desa menjadi lebih spesifik dalam arti ada perubahan mendasar dari *Pangreh Projo* menjadi *Pamong Praja*. Termasuk penyesuaian nomenklatur Jabatan Camat pada level bawah maupun nama beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di provinsi dan kabupaten/kota. Bukan hanya perubahan nama, tetapi pelayanannya pun menjadi lebih berbudaya Jogja. Oleh karena itu, semua perangkat wajib mengikuti *short course* di Pawiyatan Pamong sehingga sesanti *desa mowo coro negara mawa tata* lebih tampak nuansanya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara tematik, membaca desa adalah sebuah introspeksi atas eksistensinya selama ini. Mengeja Indonesia dengan melafalkan per huruf membentuk kata I-n-d-o-n-e-s-i-a, merupakan bentuk evaluasi perannya sebagai wadah keragaman desa se-Nusantara. Semuanya itu harus ditempatkan pada era “normal baru” daripada aspek kebudayaan.

“*New normal*” adalah *back to normal* karena kehidupan kemarin justru *abnormal*, menandai sebuah *hiper realita*, seperti ketika kita harus membeli *image* sebuah produk air yang—seolah—meningkatkan statusnya setelah menjadi produk kemasan. Sebuah kondisi mental yang membuat sesuatu tidak substansif, menjadi melebihi kebutuhan dasar kita sendiri. “*New normal*” adalah sebuah terapi psikis dan kultural *healing*, berefek kejut untuk merefleksi dan mengintrospeksi betapa rapuhnya kehidupan kita kemarin, untuk itu kembalilah ke jati diri dan fungsi diri kita yang nyata. Dunia kemarin sudah mati.



Dunia hari ini ibarat sebagai sebuah rumah sakit besar, kita tergeletak di dalamnya dan hanya berpikir sehat dan agar tetap bisa hidup.

Di situlah kini desa berada, yang berimbas pada tata pergaulan dan tata pemerintahan desa. Akhirnya kita menjadi bagian dari generasi yang dipertemukan oleh situasi terbaru dengan perubahan relasi sosial, dinamika organisasi kerja, dan berbagai hal yang selama ini telah kita lalui. Konsekuensinya, Kongres Kebudayaan Desa harus membahas pergeseran budaya desa yang tentu tidak mudah.

Menurut pakar kebudayaan August Comte, Disanayake, maupun Alvin Tofler, setiap pergeseran peradaban ditandai oleh tahapan yang selalu mengedepankan rasionalitas. Bahwa iptek merupakan komponen utama majunya peradaban. Semakin baik penguasaan akan beragam iptek, masyarakat akan semakin mendekati tahap adaptif terhadap kemajuan dan perkembangan zaman. Cara berpikir fungsional inilah yang harus kita hidupkan dan kembangkan di setiap desa agar sejalan dengan konsep *townbie*, membangun kelompok kreatif berbasis kebudayaan seperti contoh *Jogja gumregah*.

Pada masa awal, tentu canggung dan getir, bahkan sakit untuk *melakoninya*. Sebagaimana watak perubahan, harus melewati proses bertahap, terasa ada ketidaknyamanan yang mau tidak mau kita harus hadir menjadi bagian dalam proses tersebut. Potret perubahan dan ketidaknyamanan tersebut, tampak jelas dalam proses Kongres



Kebudayaan Desa yang salah satunya menghasilkan 21 buku rumusan Indonesia Menuju Tatanan Baru dari Desa.

Dampak Covid-19 berkelindan dengan disrupsi teknologi menuju era Industri 4.0 yang belum mapan. Itu pun sudah dibayang-bayangi era Sosial 5.0 yang segera menyusul. Perubahan total ini juga berkejaran dengan pergeseran budaya desa yang belum teridentifikasi secara cermat. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah, termasuk desa, harus bersinergi memastikan pemeriksaan kesehatan masyarakat: tersedianya sarana medis, tersedianya jaring pengaman sosial untuk melindungi—mereka—yang paling rentan, dan tersedianya perlindungan kesehatan. Selebihnya, berhentilah menjadi provokator dan menyebarkan energi negatif yang tidak bermanfaat bagi siapa pun dan berpotensi menimbulkan kecemasan publik.

Gambaran strategis lingkungan desa yang telah berubah harus diikuti perubahan tata masyarakat, antara lain dengan relokasi dan *refocusing* Dana Desa. Dampak ekonomi membawa dampak sosial yang positif dalam meningkatkan peradaban empati, diikuti kesediaan saling belajar, menghargai, dan berbagi sebagai penguat modal sosial dan partisipasi publik. Penguatan ini berdampak positif pada peningkatan daya tahan ekonomi warga karena terbangunnya jaringan kerja sama, kolaborasi, dan kemitraan. Kebijakan “normal baru” atau adaptif menghadapi realitas perubahan, tidak lain dimaksudkan untuk menyatukan kehendak membangun hidup *guyub* di tengah keragaman perbedaan yang didasari oleh *mutual*



*trust* untuk memperoleh *mutual benefit*. Untuk itu kita harus siap mengubah *mindset* budaya dalam mengelola kehidupan bersama.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, lurah atau kepala desa, harus memiliki wawasan adaptasi dan kapasitas daya tahan. Bekal kompetensi dalam dunia yang kompleks dan penuh kejutan serta perubahan yang tidak terduga merupakan syarat utama. Harus mampu melakukan lompatan *non-linier* bahkan *out of the box*. Dari *Terra Firma*, daratan yang dikenal dengan baik, ke *Terra Incognita* atau dunia masa depan. Demikianlah, semoga buku rumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa ini bermanfaat bagi desa, bangsa, dan negara Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan selamat dan semoga sukses. Sekian, terima kasih. *Wassalam.*[]

Yogyakarta, 5 Agustus 2020

**Hamengku Buwono X**  
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta





## Sekapur Sirih

*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi*

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

### **Melawan korupsi dari desa.**

Pergeseran nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan menjadi “pekerjaan rumah” kita bersama. Semakin banyak anak-anak muda kota yang meski tumbuh di desa, tetapi terjangkit penyakit materialisme. Tercerabutnya suasana dan pikiran desa membuat

banyak orang berpikir: apa yang ada dalam pikiran mereka hingga tercerabut dari budaya desanya, padahal berasal dari desa?

Kira-kira apa masalahnya di Indonesia? Keteladanan kepala desa dan orang tua menjadi sangat penting. Guru agama pun tak kalah penting. Di kota semakin hilang keteladanan dan sikap apresiasi sehingga muncul materialisme di masyarakat kota. Tentu butuh obat dengan sikap keteladanan dan orang yang sudah harus selesai dengan dirinya. Sikap spiritual ini banyak ditemukan di desa, harmonisasi alam dan manusia di desa baiknya tidak sekadar jadi inspirasi, tetapi harus dipraksiskan.

Materialisme yang menghantui pikiran orang kota bukan pepohonan dan sawah, melainkan mengumpulkan logam-logam. Bentley, Lamborghini, dan mobil-mobil mewah lainnya semua ada di parkir Komisi Pemberantasan Korupsi, sitaan dari kasus korupsi. Kumpulan mobil itu menjadi tidak penting. Namun, mengapa masih ada orang-orang yang ingin memilikinya dengan cara salah: korupsi? Apakah ada yang salah dengan pikiran orang kota? Kita perlu rekonstruksi bagaimana pikiran orang desa yang simpel: naik angkot, truk, dan moda transpor publik lainnya yang lebih fungsional.

Mari kita tengok pemikiran ekonom peraih Nobel: *When enough is not enough, a hedonist is born*. Ketika cukup sudah dianggap tidak cukup maka penyakit cinta dunia materialistis akan tumbuh. Pemenang Nobel ini sangat spiritual, seperti ajakan kembali ke desa dan mendalami pemikiran sederhana orang-orang desa. Namun pada



prinsipnya, urusan menimbun kekayaan adalah penyakit semua orang, baik orang kota maupun orang desa.

Tantangan yang tidak kalah besar di desa, salah satunya *money politic*. Ternyata sistem politik yang kita pilih kemudian menular. Pemilihan bupati, gubernur, sampai tingkat pusat penuh syarat *money politic*. Berharap untuk pilkades tidak ada *money politic*. Namun, harapan itu membentur kenyataan. Bahkan saling menularkan, baik dari desa ke kota maupun sebaliknya. Jadi, apakah desa menjadi inspirator korupsi karena *money politic* pilkades?

Sebenarnya sumber permasalahan ada pada politik yang tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Kepala desa tidak ada gaji, tetapi dibayar dengan bengkok. Bengkok untuk pembangunan desa kemudian diasosiasikan menjadi milik kepala desa. Kalau panen padi tiga kali dalam setahun, dihitung paling tidak pendapatan 200 juta. Kemudian dikalikan berapa ton pemimpin ketemu angka, kalau dikeluarkan 1 miliar maka untung sedikit. Itu dari bengkok. Sementara dari dana desa maupun beberapa bantuan pembangunan infrastruktur dari pusat bisa menjadi bumerang dan jebakan pikiran koruptif. Ini harus kita pecahkan bersama karena tantangan di desa hari ini berbeda dengan dahulu.

Sistem politik yang kita pilih mahal, sistem terbuka. Sementara pendanaan negara untuk partai politik rendah. Konversi suara ternyata sering kali tidak berbanding lurus dengan pendanaan secara rasional kepada partai politik. Contohnya, gaji bupati 6,5 juta, gubernur 8,5 juta, dan wakil presiden 40 juta yang dinilai tidak laik



dengan proses ketika mereka terpilih. Negara harus sudah mulai memikirkan kepala desa digaji yang cukup. Di Surabaya contohnya: lurah digaji 30 juta, camat bisa 50 juta, tetapi di desa-desa lain bagaimana? Sehingga yang terjadi, tidak sedikit kasus kepala desa hasil pemilihan secara *money politic*, kemudian melakukan upaya-upaya yang merusak perilaku masyarakat desa itu sendiri.

Mengapa 36 persen pelaku korupsi yang ditahan KPK adalah kader politik, anggota DPR, dan kepala daerah? Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Angka politik sangat memengaruhi angka persepsi indeks korupsi Indonesia, jadi varietas demokrasi proyek angkanya 28, sementara dari lulusan ekonomi ratingnya 59. Jadi angka-angka ini merupakan perbandingan korupsi yang diperbandingkan setiap negara. Untuk kasus Indonesia cukup menarik karena terus menanjak, ini jarang terjadi di negara lain.

Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain, terbaik di dunia untuk pergerakannya. Dari 17 ke 40, naik 23 poin. Cina memberantas korupsi dengan hukuman mati naik 7 poin. Kemudian Malaysia di bawah kepemimpinan Mahathir bisa *reborn* setelah di zaman Najib turun 47. Itu pun hanya menaikkan Malaysia di angka 2 poin saja. Jadi, Indonesia sudah benar dalam pemberantasan korupsi, tetapi terlalu kaya dengan isu kota sehingga di desa juga perlu dilibatkan pemberantasan korupsi. Untuk itu, ada tiga strategi yang dilakukan KPK: Penindakan agar koruptor jera, pencegahan agar orang tidak melakukan korupsi, pendidikan agar orang tidak

ingin korupsi. Demikian sekapur sirih dari kami untuk 21 judul buku hasil rumusan Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih.[]

Jakarta, 5 Agustus 2020

**Giri Suprardiono**

Direktur Dikyanmas KPK





## Sekapur Sirih

*Menteri Desa, PDTT*

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Pertama-tama, mari kita bersama-sama bersyukur kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan Kongres Kebudayaan Desa tahun 2020. Ini adalah satu momentum yang sangat luar biasa, titik pijak atau titik tolak dari kebangkitan desa-desa yang memiliki akar budaya, di mana

perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan desa jangan sekali-kali lepas dari tumpuan akar budaya desa setempat. Mudah-mudahan kongres ini merupakan awal untuk kongres kebudayaan desa tahun-tahun berikutnya. Kedua, selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang memberi cetak tebal kebudayaan manusia di muka bumi.

Melalui kongres desa, kita semua sudah diberikan pandangan dan paradigma baru dalam melihat dunia, termasuk kebudayaan. Kita tentunya semakin sadar bahwa di balik pandemi Covid-19 terdapat ujian sekaligus hikmah. Kita belum tahu kapan tuntasnya, tetapi kita harus mengambil langkah konkret dan strategis, salah satunya dengan merumuskan tatanan baru. Dan tentu saja kita berharap pandemi segera berlalu.

Sebagaimana dijelaskan selama kongres, pandemi Covid-19 sudah sampai pada level mendekonstruksi tataran budaya manusia. Tidak hanya kebudayaan semata, tetapi ekososial politik juga terdekonstruksi. Untuk itu, ada beberapa hal terkait rumusan kongres agar bisa berkontribusi terhadap paradigma baru Indonesia pascapandemi.

Pertama, melalui kongres kita berharap bisa mengidentifikasi nalar tebal kebudayaan masyarakat desa, seperti gotong royong atau *holopis kuntul baris*, saling peduli antarsesama masyarakat desa, sekaligus membaiknya ekosistem politik di mana masyarakat desa mampu berpartisipasi terhadap pembangunan bangsa dan negara.



Kedua, kongres diharapkan mampu berkontribusi untuk pemikiran nalar kebudayaan baru yang otentik, unik, dan inovatif yang hari-harinya dijalankan masyarakat desa. Dengan kata lain, di balik keriuhan negara mengurus problem bangsa, masyarakat desa punya model dan modul pendekatan khas yang berasal dari cara mereka menghadapi persoalan. Ini *problem solving* yang spesifik khas desa, contoh ketika ada masalah tidak terlalu berat, cukup selesai di desa. Hukum positif tidak selalu menjadi rujukan. Misalnya, ada pencuri ayam, tidak serta-merta diurus ke kantor polisi, dimasukkan sel. Melainkan diselesaikan di desa dengan sanksi sosial yang diputuskan oleh kepala desa, yang karena kemampuan dan kewibawaan yang dimilikinya sehingga keputusan diterima oleh masyarakat.

Ketiga, forum Kongres Kebudayaan Desa yang melibatkan beragam unsur keterwakilan: akademisi, praktisi, seniman, budayawan, pemangku adat, dan elemen pemerintahan dari pusat sampai desa. Untuk itu, saya berharap agar semua unsur saling berkolaborasi. Para praktisi menceritakan bagaimana desa melaksanakan kenormalan baru di desa. Akademisi bisa mereformulasi dan meredesain bagaimana kebijakan yang adaptif bagi desa. Sebagai keterwakilan pemerintah, kami berharap ada perhatian khusus pascakongres agar lebih serius dan terelaborasi dengan kebijakan untuk kesejahteraan desa di Indonesia.

Terakhir, kami dari Kemendesa PDTT terus mencari dan mengidentifikasi narasi tentang desa, masyarakat desa, dan



dinamikanya mengikuti perkembangan zaman yang bisa kita formulasikan menjadi kebijakan. *Tagline* “Desa untuk Semua Warga atau Desa Surga” merupakan inti sari pemajuan kebudayaan desa, pemajuan masyarakat desa dengan memperhatikan kearifan lokal. Dana desa jangan hanya dirasakan elite desa, tetapi dirasakan kehadirannya oleh seluruh masyarakat desa, itu inti dari surga, desa untuk semua warga desa.

Terima kasih kepada Sanggar Inovasi Desa, pemerintah Desa Panggungharjo, dan Jaringan Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020 yang telah mempersiapkan dan melaksanakan kongres dengan segala risiko dan konsekuensinya. Semoga kongres dengan hasil rumusannya yang terbingkai dalam 21 judul buku ini menjadi momentum berarti bagi perubahan dan penguatan budaya desa di masa yang akan datang. Demikian sekapur sirih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, salam budaya desa.[]

Jakarta, 5 Agustus 2020

**Abdul Halim Iskandar**

Menteri Desa, PDTT





## Pidato Kebudayaan

*Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud*

*A*ssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastyastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

**Revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.**

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Terima kasih telah mengundang saya dan memberi kesempatan bicara di depan Kongres Kebudayaan Desa. Saya baca kerangka acuan dengan saksama, saya melihat kebudayaan tidak dipahami semata kesenian atau warisan budaya. Namun, juga sebagai keseluruhan cara hidup,

cara berpikir menyangkut kebiasaan kita, ritual, dan praktek yang terkait kebudayaan. Jadi kebudayaan dalam pengertian luas, sama seperti semangat dari UU No. 5/2017, tentang pemajuan kebudayaan Indonesia.

*Pertama*, kita paham bagaimana Pandemi Covid-19 mengubah cara hidup kita secara drastis. Kita membatasi pertemuan dengan orang lain, bersentuhan dengan orang lain, menjaga jarak, dan kita juga punya beberapa keseragaman. *Physical distancing*, *lockdown*, dan seterusnya, semua masih dalam bahas Inggris, bahasa asing. Ini menunjukkan respons kita pada situasi pandemi masih cenderung datang dari luar, belum sepenuhnya menjadi sesuatu yang berakar pada masyarakat kita, dari dalam. Padahal kita mempunyai khazanah pengetahuan luar biasa menghadapi situasi pandemi. Tidak sedikit orang mengatakan, situasi yang kita hadapi tidak ada bandingannya.

*Kedua*, pada situasi luar biasa, kita perlu langkah-langkah luar biasa juga. Pemikir Inggris mengatakan, untuk mengatasi situasi Covid-19, kita perlu sebuah revolusi perdesaan. Revolusi ini landasan kita untuk tatanan masa depan. Karena revolusi bukan sesuatu luar biasa. Dalam sejarah Indonesia, kita sering mendengar seruan revolusi, terakhir revolusi mental. Jadi, tidak ada yang luar biasa dengan gagasan revolusi. Yang luar biasa adalah ketika gagasannya diutarakan oleh seorang bankir. Orang terkaya kedua di desa.

Gagasan mengenai revolusi perdesaan bisa kita tengok dalam sebuah tulisan yang dimuat di situs *World Economic Forum*. Ini keluar dari kebiasaan lain, forum ekonomi dunia dikenal oleh kepala pemerintahan dunia sebagai kumpulan para pebisnis, ekonom, yang



membentuk sistem untuk mendominasi, jelas bukan forum untuk revolusi. Kita tidak mungkin kembali ke masa sebelum Covid-19, ke masa yang sebelum normal lama, dan kita perlu sebuah tantangan baru, tantangan yang lebih manusiawi, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena kata kunci tatanan baru adalah keselamatan.

Bisa dibayangkan, ketika semua orang mendapat kesempatan mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup. Kita akan mudah sekali bersepakat untuk hal tersebut. Namun, bagaimana caranya? Jawaban paling jujur kita berikan pada pertanyaan mendasar yang kita belum ketahui bersama. Belum ada yang mengetahui bagaimana caranya untuk bisa sampai ke sana, karena tidak ada atau tepatnya belum ada cetak biru siap pakai. Namun, coba kita pastikan titik tolaknya ada pada desa. Perjalanan kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa, dimulai dari desa. Sekitar 1550 tahun lalu, asal mula pengelompokan masyarakat dalam jumlah besar yang kemudian membentuk bangsa Indonesia. Periode selanjutnya ketika kita ingin membangun negeri modern, tetapi desa dilupakan, diabaikan. Seluruh sumber daya kita keluarkan untuk membangun sektor modern yang oleh Covid-19, diingatkan untuk kembali ke asal usul, kembali ke dasar, kembali ke akar, kembali ke desa, itu alasan utama.

Alasan berikutnya, desa telah menyiapkan kebutuhan dasar untuk normal baru, terutama pangan dan kesehatan. Dua hal pokok ini tidak boleh diserahkan semua pada pasar. Ketika pembatasan sosial diberlakukan, kemudian ada orang panik memborong bahan pangan dan obat-obatan, termasuk yang tidak diperlukan. Sementara yang memerlukan tidak bisa membeli. Penyelesaian masalah seperti



ini tidak sesederhana menangani penyelewengan, tapi ada kelemahan dalam sistem yang harus diperbaiki. Ini semata bukan soal mafia impor beras maupun gas—yang memang harus disingkirkan. Namun, ada yang lebih penting, yaitu menata ulang sistem yang berpihak, yang bisa menegakkan kedaulatan di atas sistem itu sendiri sehingga mengembalikan kemampuan kita mengelola sumber daya yang ada. Fokus utamanya untuk pemenuhan kebutuhan kita semua, terutama kebutuhan di dalam negeri. Selebihnya, bolehlah berbagi dengan negara tetangga, negara sahabat.

Dan saya kira, yang berkumpul sekarang di kongres, adalah para pejuang akar rumput yang sudah lama menekuni masalah ketimpangan dan penyelewengan, yang bergerak mengurus memuliakan kembali benih-benih lokal. Ada yang terlibat praktik agro ekonomi, ada yang mengurus pasar lokal dan nasional untuk melayani kebutuhan masyarakat, penggerak koperasi usaha kecil, BUMDes, semua elemen yang diperlukan dalam tatanan mendatang. Saatnya, kita belajar kembali dari kearifan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi baik lisan maupun tulisan. Hemat saya, ini kerja-kerja kebudayaan.

Pengetahuan tradisional di masa pandemi terlihat memiliki keunggulan. Kasus Covid-19 banyak sembuh karena obat tradisional. Balitbang pertanian sudah identifikasi 50 tanaman herbal untuk penangkal virus. Beberapa perusahaan jamu sudah memproduksi ramuan daya tahan tubuh untuk menghadapi Covid-19. Semua bukan sekadar romantisme, tapi pikiran rasional. Kita tidak mungkin diam menunggu vaksin datang. Sekarang, di banyak tempat, orang-orang mulai menggali pengetahuan dari naskah-naskah, tradisi lisan, dan



berbagai praktik lainnya untuk memperkuat daya tahan terhadap virus. Dan dalam prosesnya, kita menyadari betapa pengetahuan lokal yang selama ini diabaikan ternyata memiliki potensi pengembangan yang luar biasa.

Covid-19 telah memaksa kita melihat kembali jejak dan perjalanan kita. Covid-19 sudah mendesak kita memanfaatkan kekayaan budaya dan intelektual yang kita miliki. Memanfaatkan teknologi mutakhir, bermacam teknologi terbaru, temuan di berbagai bidang, kesehatan, pangan, energi terbarukan, dan pada akhirnya seluruhnya diharapkan bisa menghasilkan pengetahuan sebagai landasan untuk tatanan baru.

Kalau kita tengok lebih jauh, seluruh praktik baik tatanan baru, mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar. Sebagai contoh, pengobatan berbasis pengetahuan lokal sekarang disebut pengobatan integratif dengan nilai total di dunia mencapai 360 Miliar Dolar. Padahal pengetahuan integratif hanya bagian kecil saja dari industri yang disebut *wellness industry* yang mencakup banyak hal: ada perawatan diri, makanan sehat, pariwisata, dan total nilainya diperkirakan sudah 4,2 Triliun Dolar. Itu data sebelum Covid-19. Dan menurut hemat saya, di masa Covid-19 justru industri berbasis pengetahuan lokal di bidang kesehatan, bidang keselamatan akan semakin berkembang. Seiring dengan meningkatnya kesadaran publik mengenai kesehatan.

Dalam sebuah studi dan riset, telah memperlihatkan bahwa 40% dari nilai total 4,2 Triliun Dolar atau 1,7 Triliun Dolar Amerika, sama besarnya dengan 25 Ribu Triliun Rupiah. Dan pada tahun 2023 kelak,



nilai tersebut akan berada di Asia Pasifik. Jadi, kue yang cukup besar dari industri *Wellness* tersebut akan ada di Asia Pasifik. Pertanyaannya kemudian, Indonesia sebagai sektor perekonomian terbesar keenam di Asia Pasifik apa rencananya? Padahal, relatif kita punya semua. Keanekaragaman hayati luar biasa, salah satu yang paling besar dan lengkap di dunia. Pengetahuan lokal mengelola alam juga luar biasa. Dan jangan lupa, banyak penemuan di bidang kesehatan modern pun dilakukan di Indonesia. Para peneliti dari berbagai belahan dunia datang ke Indonesia, berinteraksi dengan orang desa, mencatat kebiasaan mereka, kemudian menghasilkan temuan yang sampai sekarang masih punya pengaruh besar dalam kedokteran modern.

Itu semua kita punya, tapi pertanyaannya, apa rencana kita? Saya percaya bahwa fokus para pengembang *Wellness* di Indonesia akan membawa angka pertumbuhan kembali bergerak naik, tapi hendaknya harapan besar ini jangan sampai mengalihkan fokus kita. Kita membangun tatanan baru bukan untuk menjadi yang paling besar. Presiden Jokowi dalam sidang IMF mengingatkan dengan sebuah pertanyaan retorik, untuk apa menjadi yang paling besar di tengah dunia yang tenggelam?

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Tatanan baru yang kita rumuskan memang seharusnya mengutamakan keselamatan dan kebahagiaan, itu kata kuncinya. Bukan angka pertumbuhan, bukan uang. Covid-19 mengingatkan kita semua bahwa uang bukan segalanya. Punya uang tapi tidak ada yang bisa dibeli, itu pelajaran berharga di masa krisis pandemi. Semua tidak mudah. Kita terbiasa dengan peralatan modern, termasuk uang. Mengubah cara pandang



dan kebiasaan memerlukan perubahan mendasar, perubahan kebudayaan. Karena itu revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.

Benih-benih kebiasaan baru, kebudayaan baru sudah mulai bertumbuhan. Di tengah pembatasan sosial, kita mulai melihat orang kembali ke alam, bercocok tanam. Kita menangkap ada kerinduan untuk kembali belajar sejarah, kembali belajar kebudayaan, tradisi spiritual dan praktik dalam bermasyarakat. Gerakan sosial juga bertumbuhan di mana-mana. Di Yogyakarta contohnya, ada gerakan Solidaritas Pangan Jogja: membangun dapur umum untuk membantu masyarakat kesusahan. Kita mencatat para seniman memproduksi alat kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan *face shield* yang terjangkau.

Revolusi perdesaan sudah dimulai. Tugas kita dan tugas kongres kita ini, untuk merajut inisiatif menjadi gerakan efektif. Merajut *science* mutakhir dengan pengetahuan tradisional. Kita merajut teknologi digital dengan pranata lokal. Gerakan ini adalah gerakan interdisipliner, karena tidak ada bidang ilmu atau sektor masyarakat yang bisa menjalankan tugas besar sendirian. Di sinilah semangat gotong royong akan mendapatkan wujud nyata.

Terakhir sebagai penutup, saya memohon bantuan para pegiat desa, para aktivis kepala desa, kepala daerah yang hadir dalam kesempatan kongres ini, untuk memperhatikan balai kebudayaan di desa. Sebagian dari kita punya padepokan, sanggar, dan seterusnya. Saya sangat memohon bantuan kita semua agar seluruh institusi ini bisa bertahan di masa sulit. Bagi yang belum punya padepokan,



sanggar, mohon bantuan agar kantor desa juga bisa berfungsi sebagai balai kebudayaan pusat pemajuan kebudayaan, bukan soal gedung fisik, tapi program dan kegiatannya. Di sinilah harapan saya kita bisa mulai melancarkan revolusi kebudayaan melalui musyawarah, lumbung pengetahuan. Di sinilah saya berharap kreativitas dan energi pembaruan bisa berkonsolidasi. Perangkat desa bisa menjadi agen pemajuan kebudayaan di wilayah setempat, kami siap kerja sama dengan seluruh unsur. Semoga setelah kongres, kita bisa menghasilkan agenda aksi konkret di tatanan baru. Terima kasih. Wassalam. []

Jakarta, 1 Juli, 2020

**Dr. Hilmar Farid**

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud





## DAFTAR ISI

<b>Pengantar Editor .....</b>	<b>v</b>
<b>Sekapur Sirih</b>	
<b>1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta .....</b>	<b>xxi</b>
Hamengku Buwono X	
<b>2. Dirwktur Dikyanmas KPK .....</b>	<b>xvii</b>
Giri Suprapdiono	
<b>3. Menteri Desa, PDTT .....</b>	<b>xxii</b>
Abdul Halim Iskandar	

<b>Pidato Kebudayaan Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud .....</b>	<b>xxvi</b>
Dr. Hilmar Farid	
<b>Pendidikan yang Membebaskan:</b>	
<b>Memuliakan Desa, Menyejahterakan Petani .....</b>	<b>1</b>
Dr. Samto	
<b>Menggerakkan Arus Balik Kuasa dan Pengetahuan dari Desa .....</b>	<b>13</b>
Nurhady Sirimorok	
<b>Saatnya Merekonstruksi Pendidikan yang Adil, Demokratis, dan Berkelanjutan .....</b>	<b>31</b>
Fadilla Mutiarawati	
<b>Ke Manakah Arah Dunia Pendidikan Kita? .....</b>	<b>42</b>
Toto Rahardjo	
<b>Menggalakkan Pendidikan Berbasis Konteks Kehidupan .....</b>	<b>63</b>
Ahmad Bahruddin	
<b>Pandemi Covid-19: Tragedi Supremasi Pedagogi Antroposen dan Urgensi Reformulasi Pedagogi yang Memerdekakan .....</b>	<b>71</b>
AB. Widyanta	



<b>Reaktualisasi Konsep Ki Hadjar Dewantara, Jawaban bagi Dunia Pendidikan .....</b>	<b>91</b>
Ubaidillah Fatawi	
<b>Menilik Pendidikan Kritis di dalam Pendidikan Agroekologi: Proses Pembelajaran dari Pesantren Agroekologi di Kaki Gunung Halimun Utara .....</b>	<b>105</b>
Bunga Pertiwi Tontowi Puteri	
<b>Pendidikan yang Membebaskan: Penguatan Nilai Dasar Pendidikan dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045 .....</b>	<b>118</b>
Agung Kresna Bayu, Clara Dhisa Sumunaring Ratna	
<b>Epilog .....</b>	<b>130</b>
Ketua Panitia Kongres Kebudayaan Desa	
<b>Deklarasi Arah Tatatan Indonesia Baru dari Desa .....</b>	<b>161</b>
<b>Kerabat Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020 .....</b>	<b>164</b>





# Pendidikan yang Membebaskan: Memuliakan Desa, Menyejahterakan Petani<sup>1</sup>

*Dr. Samto<sup>2</sup>*

**A**da prinsip dasar dalam pendidikan yang selama ini dipercaya bahwa pendidikan itu harus aktif, kreatif, dan menyenangkan.

- 
1. Makalah disampaikan dalam kegiatan Kongres Kebudayaan Desa tanggal 2 Juli 2020, Seri 3: Pendidikan yang Membebaskan dan disarikan oleh Diah Rizki Fitriani
  2. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sekolah sebagai salah satu sarana pendidikan diharapkan bisa menjadi tempat belajar, bermain, sekaligus mengembangkan diri yang menyenangkan. Akan tetapi, melihat realitas yang ada, rasa gamang menyelimuti pikiran kita. Sekolah belum menjadi tempat belajar dan mengembangkan diri yang menyenangkan bagi anak didiknya. Kondisi ini mengartikan bahwa situasi pendidikan kita saat ini jauh dari harapan dan prinsip dasar pendidikan.

Secara kasar kita amati sistem pendidikan di Indonesia saat ini belum mampu menyelesaikan permasalahan kehidupan. Justru bisa dibilang sistem pendidikan kita saat ini mencerabut manusia-manusia potensial dari akarnya. Mereka yang mendapat pendidikan di desa kemudian berbondong-bondong lari ke kota dan meninggalkan lahan-lahan potensi desa untuk diolah oleh orang-orang tua. Akibatnya, desa menjadi kekurangan potensi ide-ide kreatif anak mudanya.

Perginya orang-orang berpendidikan dari desa ke kota seolah menegaskan bahwa tidak ada harapan di desa. Ada pemikiran bahwa jika mereka mengenyam pendidikan dan menetap di desa, mereka tidak akan maju dan tertinggal. Berbeda dengan orang-orang tua yang telah lebih dulu hidup di desa. Mereka tetap berkehidupan dengan bahagia dan optimis seakan tidak merasa tertekan dan tertindas. Alasannya adalah mereka tidak mampu melawan narasi yang menarik generasi-generasi muda potensial itu untuk pergi ke kota. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana seharusnya pendidikan berperan dalam hal ini?

## **Fenomena Pendidikan Urban**

Sistem pendidikan di Indonesia saat ini merupakan pendidikan urban, pendidikan yang menceraabut anak didik dari keterikatan dengan akar tanahnya. Bahan pembelajaran disusun dengan konten dan pola yang mengacu pada kehidupan kota dan tidak sesuai dengan keadaan lingkungan. Pola didik yang mengacu pada kota menciptakan anak didik yang kurang peka terhadap masalah yang ada di sekitar. Pendidikan yang seharusnya mampu mengembangkan potensi anak didik, kemudian hanya menjadi tempat transfer ilmu tanpa konteks. Padahal, seharusnya pendidikan bisa mencakup semua kebutuhan untuk mengenali dirinya sendiri maupun memahami realitas yang ada, baik itu kebutuhan pendidikan di kawasan urban maupun di desa. Hal ini disebabkan tentu karena sistem pendidikan di Indonesia hingga kini masih belum serius menyelesaikan masalah ini. Sistem pendidikan masih sering berubah mengikuti pola birokrasi yang sering kali berganti dan tidak terencana secara jangka panjang.

Sistem pendidikan urban yang kental dengan penyeragaman memunculkan keresahan tentang terhambatnya daya kreativitas pada anak didik. Penyeragaman peserta didik, termasuk apa yang harus dipelajari ini menumpulkan daya kritis subjek didik. Tiap wilayah bahkan tiap individu memiliki permasalahan yang berbeda dan pendidikan harusnya membantu mereka memahami itu. Namun, sering kali pendidikan urban tidak mampu menjadi alat



pemecah masalah. Pendidikan urban hanya menyentuh permukaan pendidikan masyarakat dan tidak mendalami hal-hal kontekstual.

Menurut Paulo Freire<sup>3</sup>, pendidikan urban yang kita kenal saat ini adalah pendidikan dengan sistem bank atau *banking education*. Pendidikan ini berfokus mengukur target-target kuantitatif dan kompetitif seperti kelulusan mata pelajaran dengan nilai tertentu, mendapat juara atau kemenangan, dan lain sebagainya. Sistem pendidikan seperti ini jelas memberi pengaruh buruk seolah-olah pendidikan hanya menjadi sebuah kegiatan menabung, di mana subjek didik dijejali dengan ilmu satu arah dengan tujuan mendapatkan nilai dan berharap untuk menghasilkan *output* besar. Pendidikan tidak dipahami sebagai transfer pengetahuan yang memancing nalar kritis untuk memahami realitas sosial yang ada, tetapi hanya sebagai alat untuk menindas kesadaran subjek didik yang menyebabkannya menjadi pasif dan menerima begitu saja kondisinya.

Pendidikan sistem bank menganggap bahwa pola ini hanyalah sebagai alat tukar ibarat pendidik memasukkan koin seratus rupiah maka akan mendapat bunga sebanyak sepuluh rupiah. Dalam hal lain, ketika pendidik memberikan pelajaran dan pertanyaan, mereka berharap subjek didik menjawab dengan cara yang sama seperti yang pendidik pahami. Padahal sejatinya, pendidikan tidak seperti itu. Bisa saja koin seratus rupiah tadi tidak menghasilkan bunga sepuluh rupiah, tetapi berubah menjadi 30 karung beras. Seharusnya

---

3. Freire, Paulo. 1994. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: LP3S

pendidikan tidak dianggap sebagai sesuatu yang hasilnya dapat dihitung secara matematis.

## **Pendidikan Kontekstual dan Perkembangan Angka Buta Huruf di Indonesia**

Pada tahun 1970 ketika zaman pemerintahan Soeharto, program pemberantasan buta huruf secara masif dimulai. Soeharto merancang program Kejar Paket A, yaitu program pemberantasan buta huruf dengan menggunakan bahan ajar buku Paket A yang terdiri dari Paket A1 sampai Paket A100. Dalam buku itu ada materi belajar yang disamakan untuk seluruh wilayah Indonesia. Namun, gaung program tersebut semakin lama semakin tidak terdengar. Hal yang serupa terjadi pada era reformasi dan pascareformasi. Padahal, di tangan pemerintah terletak sumber daya dan kebijakan yang bisa dimanfaatkan agar pendidikan tidak berjalan di tempat.

Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 1994 ada 15 persen dari total penduduk Indonesia yang masih buta aksara dalam usia produktif. Kemudian pada tahun 1998 jumlah tersebut turun menjadi 13 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Penurunan angka buta huruf ini didukung dengan dicanangkannya program-program pemberantasan buta huruf yang lebih kontekstual.

Pencanangan program pendidikan kontekstual berdasar pada pembacaan dan pemahaman masyarakat akan apa yang ada di sekitarnya. Apa yang mereka baca adalah apa yang ada di lingkungan



lokal mereka. Bagi masyarakat desa, mereka akan membaca “ini ayam” dan “ini kambing” sebagai “ini ayam” dan “ini kambing”. Sedangkan bagi masyarakat pesisir, mereka akan membaca apa yang ada di sekitarnya, misalnya ikan dan laut, bukan ayam dan kambing. Pembelajaran-pembelajaran lokal dan sesuai konteks inilah yang membantu masyarakat untuk memahami aksara. Maka pada tahun 1999, program pembelajaran kontekstual ini menjadi program nasional yang dirasa lebih cocok untuk sistem pendidikan dan pemberantasan buta aksara di Indonesia. Dari total 15 persen angka buta aksara penduduk Indonesia pada tahun 1994, kemudian pada tahun 2018, jumlah tersebut turun menjadi 1,93 persen atau sekitar 3,29 juta orang dari total populasi penduduk Indonesia<sup>4</sup>.

Pendidikan kontekstual ini bisa menjadi bagian dari pendidikan yang membebaskan. Dalam pendidikan kontekstual pendidik dan subjek didik dituntut untuk memahami konsep realitas dan lokalitas yang ada. Bukan hanya pendidik yang memahami permasalahan, tetapi juga memancing subjek didik bahkan masyarakat untuk mengurai apa yang menjadi permasalahan, memahami masalah tersebut, memahami konteks permasalahannya, dan bagaimana pemecahannya. Dari hal ini, pendidik akan mampu mendorong kemandirian subjek didik untuk bangkit dan berpikir kritis serta relevan. Inilah yang diharapkan dalam sistem pendidikan abad ke-21. Bagi pendidikan urban, program semacam ini memang dirasa memiliki proses yang lama. Sulit untuk meyakinkan bahwa

---

4. Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

pendidikan kontekstual ini lebih mudah diterapkan daripada pendidikan urban.

## **Pendidikan yang Membebaskan**

Menurut konsep pendidikan dari Paulo Freire, pendidikan merupakan alat untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan atau bisa dikatakan sebagai usaha memanusiakan manusia. Konsep pendidikan ini menempatkan manusia sebagai subjek aktif dalam proses pendidikan itu sendiri yang mampu berpikir, beraksi, dan berefleksi atas pikirannya sendiri. Baik pendidik maupun peserta didik, keduanya menjadi subjek dalam proses pendidikan dan berposisi sejajar yang melakukan kegiatan belajar-mengajar bersama.

Hakikat pendidikan jika didasarkan pada konsep Paulo Freire pendidikan seharusnya berorientasi pada pengenalan realitas diri masyarakat dan lingkungannya dan memiliki kesadaran serta potensi untuk menyelesaikan permasalahan. Namun, seiring perkembangan, pengetahuan dan kearifan lokal secara perlahan mulai dipinggirkan. Sistem pendidikan yang mulai dikenalkan sebagai pendidikan urban mulai mengasingkan manusia dari tanahnya. Masyarakat dibuat tidak mengenal dengan permasalahan yang ada di lingkungannya sendiri.

Pendidikan yang memahami realitas hidup masyarakat dan konteks lingkungan adalah pendidikan yang seharusnya diterapkan.



Mari kita bicara konteks di desa. Desa identik dengan pertanian, tetapi mengapa yang bertani adalah para orang tua? Pendidikan yang dibutuhkan desa adalah pendidikan yang mampu menjawab permasalahan. Ketika kemarau panjang pendidikan harus menjawab bagaimana cara membangun sistem pengairan yang bisa mengairi sawah, bagaimana debit air tetap stabil, dan bagaimana tanamantanaman tetap bisa hidup. Pendidikan sudah sepatutnya menjawab bagaimana masyarakat berpendidikan mampu mengembangkan masyarakat lainnya, bukan hanya mengembangkan dirinya sendiri.

Untuk mengembangkan pendidikan yang membebaskan, memahami realitas itu penting agar tidak menciptakan paradoks-paradoks baru, seperti misalnya bagaimana pendidikan tinggi jurusan pertanian tidak pernah mencetak seorang petani. Pendidikan harus mampu menciptakan inovasi untuk menumbuhkan kesadaran untuk menyadari realitas. Tidak perlu membawa konsep pendidikan yang terlalu rumit, cukup berdasarkan realitas dan sumber daya yang ada sehingga menciptakan sistem pendidikan yang tepat sasaran dan membebaskan masyarakat yang tertindas.

## **Merdeka Belajar di Masa Pandemi**

Beberapa waktu lalu Menteri Pendidikan Nadiem Makarim meluncurkan program baru yang dinamai dengan 'Merdeka Belajar'. Kebijakan ini mengatur setidaknya tiga aspek dalam pendidikan kita, yaitu sekolah, guru, dan peserta didik. Sekolah dituntut untuk memfasilitasi inovasi guru dan peserta didik, lalu dengan mengurangi



beban administratifnya guru diharap mampu menghadirkan terobosan-terobosan baru yang sesuai konteks pembelajaran, sedangkan peserta didik diharapkan mampu belajar secara mandiri dan inovatif. Terobosan ini diambil karena selama ini ada sistem (utamanya formalitas-formalitas aturan administratif) yang dirasa membelenggu para pendidik dan peserta didik sehingga tidak bisa bebas berpikir dan mengembangkan ide.

Konsep merdeka belajar yang dicanangkan Menteri Nadiem ini, menurut saya, juga belum ideal. Konsep ini membuat pendidik menjadi ibarat burung yang dilepaskan setelah lama berada dalam sangkar sehingga cukup sulit diterapkan dalam sistem pendidikan saat ini. Karena sudah lama berada di dalam sangkar, pendidik kebingungan. Seperti minta dimerdekakan, tetapi masih tetap berpegangan pada petunjuk teknis.

Di masa pandemi ketika sekolah-sekolah mencari alternatif program pembelajaran yang bisa diterapkan tanpa harus bertatap muka, pemerintah memberikan solusi dengan program belajar dari rumah. Semua kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring, baik itu melalui panggilan video maupun pemberian tugas melalui grup obrolan. Pemerintah pun bekerja sama dengan televisi nasional untuk menayangkan tayangan-tayangan edukatif berisi materi pembelajaran yang relevan, dimulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah.

Secara kelembagaan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus telah meluncurkan program yang memudahkan



pembelajaran di abad 21 yang telah diterapkan di program kesetaraan. Secara tidak langsung program ini juga dirasa cocok untuk diterapkan di masa pandemi seperti saat ini. Program pembelajaran berbasis daring yang disebut Setara Daring dikembangkan pada tahun 2018 dengan pembelajaran sistem modul. Program ini sudah mulai diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan masyarakat.

Dalam program Setara Daring, para warga belajar tidak harus datang ke sekolah atau ke kelompok belajar. Warga belajar bisa belajar mandiri melalui modul yang ada pada *website* dan berkomunikasi dengan tutor ketika ada kesulitan. Capaian belajar dan materi belajar pun bisa diatur oleh warga belajar sendiri. Program ini sangat sesuai dengan kondisi pandemi saat ini yang membuat anak didik maupun pendidik tidak memungkinkan untuk hadir untuk mengikuti pembelajaran. Tidak hanya sistem pembelajaran saja yang dibebaskan dalam program Setara Daring ini, tetapi cara belajar subjek didik pun turut dibebaskan. Warga belajar bebas mengakses modul belajar dari mana saja dan kapan saja.

Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan berinovasi dengan memampatkan kurikulum nasional dan memberikan ruang sampai 40 persen untuk pembelajaran yang merdeka. Dalam hal ini, subjek didik diberi kebebasan untuk memilih apa yang ingin mereka pelajari dan bagaimana cara belajarnya asalkan sesuai dengan konteks.

Pendidikan yang membebaskan sekali lagi bergantung pada kreativitas semua pihak, baik itu sekolah, pendidik, maupun subjek didik. Kreativitas yang besar akan memunculkan hasil belajar yang

luar biasa, termasuk pemikiran yang merdeka. Tidak akan muncul kreativitas jika tetap berpegang pada pendidikan sistem bank yang menyamaratakan pembelajaran dan materi.

Banyak pemikiran-pemikiran pesimistis ketika dihadapkan pada perubahan sistem pendidikan ke merdeka belajar. Bukan perkara mudah mengupayakan merdeka belajar di birokrasi pendidikan Indonesia. Konsep ini diragukan terutama dalam aspek pengawasan subjek didik dan bagaimana pertanggungjawabannya. Padahal, secara prinsip orang yang bisa dipercaya adalah orang yang bertanggung jawab ketika diberi kepercayaan. Hal itu bisa diterapkan terhadap subjek didik. Memberi kepercayaan terhadap peserta didik dengan tidak mengawasi mereka secara ketat seperti pencuri akan memicu kreativitas subjek didik itu sendiri. []



## Profil Penulis

Tantangan bidang pendidikan di Indonesia sangat besar, karena itu perlu konsep pendidikan yang melibatkan seluruh pihak mulai dari keluarga, guru, masyarakat, hingga pemerintah. Untuk merespons kebutuhan tersebut, pemerintah mengembangkan program merdeka belajar dan Dr. Samto menjadi salah satu yang bertanggung jawab mengawalnya melalui kewenangannya sebagai Direktur Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus.

Tujuan utama direktorat tersebut adalah meningkatkan kualitas layanan serta perluasan akses pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus. Tingginya angka anak usia sekolah yang tidak mendapat pendidikan formal dan putus sekolah, tingginya angka buta aksara, lamanya rata-rata sekolah orang dewasa, rendahnya tingkat literasi masyarakat, hingga masih rendahnya jumlah anak berkebutuhan khusus yang terdaftar di pendidikan luar biasa jadi persoalan yang harus segera dituntaskan. Menurutnya, untuk menjawab beragam tantangan tersebut tidak bisa hanya mengandalkan kompetensi akademik. Melainkan juga kompetensi komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah karakter kinerja yang tangguh serta moral yang kuat.



# Menggerakkan Arus Balik Kuasa dan Pengetahuan dari Desa<sup>1</sup>

*Nurhady Sirimorok<sup>2</sup>*

## Bagaimana Orde Baru Merusak Pranata Desa

**B**erangkat dari sejumlah dugaan tentang deretan tantangan yang dijumpai dalam menjalankan kerja pengorganisasian rakyat,

1. Makalah disampaikan dalam kegiatan Kongres Kebudayaan Desa tanggal 2 Juli 2020, Seri 3: Pendidikan yang Membebaskan
2. Menyelesaikan studi di bidang Rural Livelihood and Global Change di Institute of Social Studies, Belanda pada tahun 2007. Membentuk *farmers learning center* bernama Sekolah Rakyat Petani (SRP) Payo-Payo, sebagai pusat kegiatan dan belajar bersama bagi para petani pedesaan. Tergabung dalam Dewan Redaksi Jurnal WACANA-INSISTPress. Bukunya berjudul *Catatan Perjalanan tentang Satu Babasa, Melihat Desa Lebih Dekat*.

SRP Payo-Payo<sup>3</sup> melakukan sebuah penelitian tentang tindakan kolektif (*collective action*). Hasilnya kemudian menjadi satu bahan penting dalam merancang program pelatihan pengorganisasian dengan memanfaatkan pendekatan riset aksi partisipatif (*Participatory Action Research*, PAR).

Penelitian ini menemukan, pertama, kerja kolektif<sup>4</sup> kurang tampak pada kegiatan berjangka panjang khususnya di bidang politik dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kelompok-kelompok tani baru bergeliat ketika menyambut uang/barang bantuan. Para anggota dan pengurus kelompok akan “aktif” ketika ada bantuan pupuk, pestisida, pelatihan, kredit, dan sebagainya, sebuah kecenderungan yang menciptakan ketergantungan. Kelompok-kelompok kurang berfungsi sebagai wadah untuk membicarakan persoalan bersama. Sebagian warga bahkan memandang kelompok tani sebagai wadah para elite, baik desa maupun supradesa untuk menyerap uang atau barang bantuan bagi kepentingan kelompok tertentu.<sup>5</sup> Dalam

3. SRP Payo-Payo adalah sebuah Ornop yang berkedudukan di Kabupaten Maros, bekerja dalam bidang pembangunan pedesaan.
4. Tindakan Kolektif di sini dimaknai sebagai tindakan terkoordinasi yang melibatkan sekelompok orang dengan kepentingan bersama dan untuk tujuan bersama; dilakukan secara sukarela—bukan kerja paksa atau kerja upahan. Bentuknya beragam: pengambilan keputusan bersama, membuat aturan kolektif, menerapkan atau menjalankan keputusan, hingga memonitor kepatuhan terhadap aturan bersama. Setiap anggota dapat berkontribusi dalam beraneka ragam bentuk: tenaga, uang, atau barang. Tujuan bersama bisa dikerjakan langsung para anggota atau diwakili para perwakilannya atau staf berbayar. (Meinzen-Dick *et. al.* 2004).
5. Seorang perempuan petani dengan pahit menuturkan bagaimana bantuan traktor tangan kemudian menjadi ‘milik’ pengurus kelompok dan kerabat



penelitian lain yang berlangsung di tiga kabupaten, ditemukan pula bahwa suara perempuan dan orang muda sama sekali tidak terdengar dalam musyawarah desa dan musyawarah rencana pembangunan desa. Musyawarah-musyawarah tersebut lebih didominasi oleh tokoh-tokoh masyarakat laki-laki.

Kedua, kerja kolektif jangka panjang hanya tampak dalam kegiatan-kegiatan berskala kecil, seperti pengelolaan masjid dan sarana belajar berbasis masjid. Seorang pengurus masjid menyebut alasannya dengan nada sindiran kepada warga setempat: *mau cepat masuk surga*. Kerja kolektif dalam jangka cukup panjang juga tampak dalam beraneka ragam arisan, tetapi lazimnya diselenggarakan oleh kaum perempuan dalam skala kecil dan kelompok-kelompok kecil.

Ketiga, kerja kolektif yang melibatkan banyak orang lebih tampak pada kegiatan-kegiatan jangka pendek atau insidentil dan kebanyakan terbatas pada hajatan kultural yang berhubungan dengan siklus hidup. Misalnya, kerja kolektif dalam perayaan menyambut kelahiran, pesta pernikahan, naik rumah baru, atau kematian. Di situ warga sangat cepat berkumpul untuk membangun tenda, memasak, mengumpulkan bahan makanan yang dibutuhkan, mengalirkan listrik, dan sebagainya. Kerja kolektif jangka pendek juga tampak dalam mengatasi masalah yang sudah telanjur muncul dan dirasakan banyak orang, semisal memperbaiki tanggul saluran air yang rusak akibat longsor atau banjir.

---

mereka, dengan menetapkan harga mahal bagi para anggota untuk menggunakan alat tersebut.



Bagaimana menafsir pola seperti ini? Kita bisa melihat *siapa* yang memprakarsai kegiatan-kegiatan tersebut. Kerja jangka pendek di seputar ritual siklus hidup maupun kerja kolektif berjangka nisbi panjang berupa arisan dan perawatan masjid merupakan prakarsa warga sendiri secara informal. Sementara kerja kolektif semisal menjalankan koperasi, kelompok tani, atau badan usaha bersama lebih banyak datang dari luar desa dan bersifat formal. Ini bukan karena model kerja kolektif dari luar itu keliru sejak awal, tetapi karena cara dan saat mereka diperkenalkan dan dijalankan di desa.

Kegiatan-kegiatan ini masuk ke desa ketika ketidakpercayaan warga pada institusi formal sedang berada di titik rendah.<sup>6</sup> Mereka tiba ketika warga sudah lama dipaksa oleh beraneka aturan dan mekanisme untuk mengkonsentrasikan pikiran dan kerja mereka kepada urusan pribadi. Mereka sudah lama diabaikan dalam pengambilan keputusan publik, terutama yang berurusan dengan ekonomi dan politik. Mereka, misalnya, mengalami trauma mendalam terhadap koperasi yang menurut mereka lebih sering masuk untuk mengambil keuntungan daripada sebaliknya. Mereka

---

6. Ketakpercayaan sebagian warga desa terhadap lembaga dan program formal sudah terbangun sejak masa Orde Baru tatkala program-program pemusatan kuasa berlangsung intensif. Kepala desa ditunjuk dari atas, banyak dari mereka adalah pengikut setia rezim. Partai politik hanya boleh mengorganisir sampai ke tingkat kabupaten. Dana desa disalurkan lewat kabupaten: alokasinya diatur dari pusat dan tiba sebagai anggaran kabupaten untuk didistribusikan ke desa menurut kebijakan pemerintah kabupaten. Lewat UU No. 5 thn 1979, desa resmi diletakkan sebagai satuan administratif terbawah, cabang dari pemerintahan kecamatan, tugas resminya untuk menyokong program-program pertumbuhan ekonomi, pemerataan, stabilitas, dan keamanan yang diselenggarakan pemerintahan pusat. (Vel, J. *et al.* 2017).

pun jera menghadiri rapat-rapat desa yang lebih sering mengundang orang yang itu-itu saja dan bila pun warga marginal bisa hadir biasanya urung bersuara, dan bila pun suara mereka terdengar, jarang menjadi kenyataan.

Perlahan urusan ekonomi dan politik publik *kalah* oleh urusan pribadi karena yang pertama menjadi tersamar. Dalam latar seperti ini wajar bila pranata informal lebih punya kemampuan untuk mengajak warga terlibat kerja kolektif yang berbasis urusan pribadi daripada pranata formal melakukannya untuk urusan bersama. Privatisasi wewenang dan fasilitas publik berlangsung dengan para ‘tokoh’ melihat kuasa bisa dipakai untuk merawat pranata informal yang tersekat berdasar garis kekerabatan atau hubungan patron-klien. “Kalau masih ada keluarga kita, kenapa orang lain yang mesti didahulukan?”, “Dia itu orang kita”, “Anak siapa itu?” bukan ungkapan yang langka terdengar selama proses distribusi peluang, fasilitas, atau barang publik.

Dengan keunggulan pranata informal atas formal dan keunggulan pribadi atas kepentingan bersama, mudah membayangkan dampaknya bagi kelompok-kelompok warga marginal. Mereka mendapati diri sebagai penonton bagi pentas pengangkatan wewenang dan fasilitas publik oleh segelentir elite yang berada di dalam lingkaran kekuasaan (*elite capture*), yang kemudian dianggap sebagai kewajaran. Orang muda, misalnya, kadang mendapat bantuan dari pemerintah desa untuk melakukan kegiatan *eventual* dan terbatas pada kegiatan yang bersifat rekreatif: olahraga dan



kesenian. Semua itu terjadi ketika masalah paling meresahkan bagi mereka ialah kurangnya lapangan kerja yang bisa menjamin masa depan mereka, ketika kebun-kebun tidak dapat menunjukkan diri sebagai ladang nafkah yang mengizinkan mereka merancang masa depan, ketika gelombang demi gelombang orang muda mengepak barang dan berangkat meninggalkan kampung halaman.

Kealpaan negara memaksa warga bergantung pada pranata informal. Karenanya menghadiri hajatan-hajatan menjadi sangat penting untuk menjaga relasi antar kerabat atau antara patron dan klien. Mereka perlu memastikan tak ditendang keluar dari lingkaran dengan menunjukkan bahwa mereka masih menghormati keluarga yang mengadakan ritual-ritual tersebut. Ujungnya, ketika UU Desa datang, warga marginal masih sulit memercayai pertemuan-pertemuan formal. Seorang kepala desa yang sudah tercerahkan sekalipun setelah dua tahun menerapkan UU Desa masih kesulitan memanggil warganya untuk datang dan bersuara dalam musyawarah desa. Meskipun temuan kami mengungkap bahwa yang lebih banyak terjadi ialah aspirasi warga marginal lebih sering tak menemukan ruang untuk menjadi agenda musyawarah pengambilan keputusan desa.

Singkatnya, kerusakan pada pranata warga desa menghasilkan ketergantungan terhadap para patron di satu sisi, ketersamaran fungsi negara dan urusan publik di sisi lain. Tantangan ini bertabrakan langsung dengan pengorganisasian rakyat yang justru berupaya membangun pemahaman tentang desa sebagai suatu kesatuan ekonomi-politik milik bersama.



## Upaya Membalik Arus Kuasa dan Pengetahuan Lewat *PAR*

Temuan dari rangkaian penelitian ini menjadi salah satu bahan penting bagi SRP Payo-Payo dalam melaksanakan program pengorganisasian warga, salah satunya berupa Pelatihan Penelitian Desa (PPD). Pelatihan ini membawa peserta para (calon) pengorganisir warga ke desa-desa dengan pendekatan Riset Aksi Partisipatif (*Participatory Action Research*, PAR).

*PAR* berkembang sejak 1960-an dan merupakan hasil pembauran dari setidaknya tiga sumber model penelitian dan inisiatif gerakan: riset partisipatif, riset aksi, dan pendidikan populer<sup>7</sup>. *PAR* berangkat antara lain dari kritik atas penelitian-penelitian positivistik dan dari fakta bahwa jenis penelitian positivistik sering kali menciptakan ketimpangan atau malah sengaja dipakai merawat ketimpangan itu sendiri. *PAR* juga merupakan kritik atas metodologi-metodologi ilmu sosial Barat yang bersifat imperialis, sebab dengan sengaja atau tidak mereka cenderung melanggengkan posisi hierarkis antara peneliti dan subjek yang diteliti, berikut dampak ikutannya.

.... telah terbukti dari waktu ke waktu bahwa penerapan penelitian terhadap masyarakat lain (khususnya penelitian positivis, yang mengklaim atau mengasumsikan hadirnya daya terap [*applicability*] universal) dalam konteks sosial, kultural, dan ekonomi yang berbeda tidak mungkin berhasil. *Rakyat*

---

7. Jordan, Steven. 2003. "Who Stole My Methodology? Co-opting PAR [1]". *Globalisation, Societies and Education*. Vol 1(2). hl. 185-200.



*harus melakukan penelitian substantif sendiri mengenai praktik-praktik yang berefek terhadap hidup mereka* (McTaggart dalam Jordan 2003: 189)<sup>8</sup>

*PAR* merupakan penelitian yang melibatkan partisipan (warga) dan peneliti untuk mengkaji situasi atau tindakan sosial yang problematis, yang berujung pada tindakan kolektif guna mengatasi isu-isu nyata yang dihadapi warga marginal (Wardsworth dalam Kindon *et al.* 2007; Jordan 2003)<sup>9</sup>. Dengan demikian, *PAR* adalah metodologi gabungan dengan perhatian utama pada *praxis*: penyatuan teori dan praktik senantiasa perlu diperhatikan ketika menjalankan beraneka bentuk penelitian sosial di lapangan dan memahami penyusunan teori sebagai sebuah kegiatan praktis<sup>10</sup>. Lazimnya, *PAR* memulai prosesnya dengan merefleksikan isu yang dihadapi warga, lalu secara bersama menyusun agenda kerja/ penelitian dan menganalisis hasilnya untuk kemudian digunakan menyusun tindakan baru dengan cara lebih baik. Proses yang sama lalu terus berulang—idealnya sampai isu tersebut bisa diatasi dan/ atau melebar ke isu-isu lain di sepanjang perjalanannya.

SRP Payo-Payo memilih *PAR* sebagai pendekatan Pelatihan Penelitian Desa karena beberapa alasan. Pertama, *PAR* lebih

---

8. Idem

9. Idem

10. Kapoor, Dip dan Steven Jordan. 2009. "Introduction: International perspective on education, PAR, and social change." dalam Dip Kapoor dan Steven Jordan (eds.). *Education, Participatory Action Research, and Social Change*. New York: Palgrave Macmillan.

berorientasi pada tindakan (unsur ‘*Action*’ dalam *PAR*) yang berujung perubahan sosial, terutama untuk menyelesaikan deretan persoalan yang dihadapi kelompok-kelompok warga termarginalkan. Dengan demikian, *PAR* lebih mengabdikan pada isu/agenda penelitian yang ditetapkan bersama warga dan pada tindakan yang mengarah pada inklusi kelompok-kelompok marginal. *PAR* terbangun sebagai “metodologi kaum marginal” yang mempromosikan kepentingan kaum miskin dan terpinggirkan. Hal ini diusahakan lewat inklusi kelompok-kelompok tersebut dalam prosedur pengambilan keputusan-keputusan penting selama penelitian maupun dalam hal kepemilikan atas hasil penelitian (Jordan, 2003: 186). Salah satu konsekuensi praktisnya ialah bahwa tujuan-tujuan akademis seperti produksi makalah ilmiah yang ditujukan bagi kelompok spesifik (para konsumen jurnal ilmiah) menjadi ‘produk sampingan’. Bukan karena *PAR* ‘kurang ilmiah’, melainkan karena *PAR* lebih mengabdikan pada agenda warga ketimbang agenda akademis.

Kedua, *PAR* menempatkan subjek penelitian (warga) sebagai partisipan penelitian (unsur ‘*Participation*’ dalam *PAR*). Dalam sebuah *PAR*, warga menjadi peneliti yang mengkaji lingkungan sendiri dan para peneliti dari lembaga luar desa menjadi *co-researcher*. *PAR* berupaya menghilangkan hierarki dalam praktik penelitian dominan dalam hal hubungan kuasa antara ‘peneliti’ dan ‘yang diteliti’; warga dan peneliti dari luar berdiri sejajar sebagai sesama peneliti dalam setiap tahapan penelitian, sejak menetapkan isu penelitian, perancangan, pengumpulan data dan



analisa, serta menjalankan tindakan dari hasil analisa tersebut (yang juga didokumentasikan dan kemudian dianalisa). *PAR* juga menghilangkan hierarki antara ‘penelitian’ dan ‘tindakan’<sup>11</sup>. Di sini penelitian dan tindakan merupakan satu elemen tak terpisahkan di dalam siklus *PAR*, sesuatu yang dilakukan oleh pihak yang sama. Peneliti dari luar bukan hanya menyusun kesimpulan atau teori lalu memberi saran untuk dipakai oleh pihak lain, melainkan turut ambil bagian dalam tindakan yang dihasilkan oleh analisis, sembari membantu mendokumentasi dan kelak menganalisis/mengevaluasi tindakan tersebut.

Ketiga, *PAR* menjalankan penelitian dari paradigma nonpositivistik. Karena *PAR* sejak awal memilih sudut pandang kaum marginal, agenda penelitian ditetapkan bersama warga lewat proses dialogis di mana para partisipan-peneliti berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang suatu isu dalam setiap tahapan. Agenda itu juga mengikuti situasi atau isu nyata yang warga hadapi sehingga menjamin relevansi dan daya terap hasilnya. Dengan demikian, metode turunan yang digunakan *PAR* menjadi fleksibel menurut kebutuhan lapangan, bisa berupa pengamatan etnografis, pemetaan partisipatif, pelbagai model FGD, wawancara mendalam, atau metode-metode lainnya—atau kombinasi di antara metode-metode tersebut. *PAR* memungkinkan keterbukaan metodologi untuk tunduk pada komitmen terciptanya penelitian yang demokratis

---

11. Kindon, Sara, Rachel Pain, Mike Kesby. *Participatory Action Research Approaches and Methods: Connecting People, Participation, and Place*. New York: Routledge.

*bersama* warga marginal, ketimbang penelitian *tentang* mereka (*lihat* Kindon et. al. 2007: 2)<sup>12</sup>. Akhirnya, metodologi ini juga menjadi ajang belajar bersama bagi semua partisipan-peneliti yang terlibat sehingga menjamin terjadinya pembelajaran dan dialog antara bentuk-bentuk pengetahuan yang berbeda.

Menerapkan *PAR*, dalam PPD para peserta didorong untuk berusaha mengajak warga setempat, subjek penelitian, agar bersedia turut menjalankan penelitian tersebut. Namun, karena peserta adalah para pemula, mereka belum diharapkan langsung bisa mengajak keterlibatan warga dalam setiap tahap penelitian—sebab sebagian besar mereka pun baru belajar meneliti. Sehingga di tahap awal mereka perlu melakukan penelitian sendiri sembari mencari cara yang paling mungkin untuk mengajak warga terlibat, sebab *PAR* juga mensyaratkan pengorganisasian warga.

Program pelatihan ini berlangsung dalam tiga tahap. Tahap pertama berupa **Orientasi**: mengenalkan dan mendiskusikan *PAR*, membahas beberapa contoh kasus *PAR* yang pernah dilakukan sebelumnya di berbagai tempat. Tahap ini melibatkan diskusi, presentasi peserta, lokakarya, FGD, dan simulasi. Pada bagian lain Orientasi para peserta diperkenalkan metode etnografi sebagai salah satu alat *PAR* untuk mengenali desa secara mendalam dari sudut pandang masyarakat setempat. Metode pengamatan etnografis yang di banyak bagian mengandalkan pengamatan partisipatif sangat efektif dalam menemukan isu-isu penting yang tengah dihadapi

---

12. Idem



warga desa, termasuk meneropong bagaimana pranata informal bekerja. Isu-isu semacam ini kadang tersembunyi, sulit dilacak lewat bincang-bincang dalam situasi formal atau kunjungan singkat. Pengamatan partisipatif juga dapat membangun keakraban dengan sebanyak mungkin warga, sesuatu yang sangat penting bagi proses pengorganisasian. Metode ini juga dibarengi dengan *live in* (lihat di bawah).

Tahap Orientasi juga mengenalkan sejumlah isu desa seperti pertanyaan agrarian (*agrarian questions*), model pembangunan desa; sejumlah perspektif kritis dalam melihat situasi desa dan letak pengorganisasian dalam kerja penelitian ala *PAR*. Bagian ini dimaksudkan untuk membekali peserta melihat langsung ke akar masalah yang dialami banyak pedesaan di Indonesia, berikut beraneka dampaknya. Mereka diberi alat untuk melihat soal-soal agraria yang bukan hanya tentang tanah, tetapi juga apa yang dilakukan di atas dan di bawah permukaannya, berikut rangkaian pranata yang menentukan redistribusi sumber daya agraria. Dengan demikian, peserta juga diajak melihat bagaimana pembangunan pedesaan selama ini mengabaikan persoalan besar berupa tergerusnya ruang hidup petani oleh berbagai jenis kekuatan. Tahap ini diakhiri dengan penyusunan Rencana Tindak Lanjut peserta. Di Tahap Orientasi peserta sudah mulai bisa membayangkan apa yang akan mereka lakukan di desa dan bagaimana mereka akan memulainya.

Tahap kedua merupakan penerapan beberapa metode dalam *PAR* dengan target utama belajar menemukan isu-isu penting

desa penelitian. Untuk merasakan langsung kehidupan pedesaan dari sumber utama dan mengintensifkan interaksi dengan warga, program menjalankan *live in* dengan setiap peserta tinggal di satu rumah induk semang. Sebagaimana disebutkan, pengamatan etnografis dan *live-in* menjadi dua alat penting untuk mengakrabkan peserta dengan warga, mereka akan kenal lebih banyak dan lebih akrab dengan warga, kebiasaan sehari-hari mereka, serta model pranata yang dominan di desa. Semuanya akan berperan penting dalam kemudahan peserta mengajak warga melakukan sesuatu bersama-sama—yaitu menjalankan pengorganisasian.

Bagian pertama tahap ini mengajak peserta memulai pengamatan dengan menerapkan *grand-tour*, dengan peserta berjalan mengitari desa dan sedikit wawancara informal. Di rentang ini mereka berlatih menemukan isu utama yang dirasakan bersama oleh banyak warga desa, isu yang memengaruhi kehidupan warga secara signifikan. Metode ini juga sekaligus memungkinkan mengakrabkan diri dengan sebanyak mungkin warga dan mulai mengenali relasi-relasi antarwarga. Dari sini mereka membuat sketsa atau gambar peta desa berikut tata guna lahan dengan memanfaatkan alat GPS. Setelah itu sebuah semiloka diadakan untuk menyajikan isu-isu penting yang diungkap warga dan berdasarkan diskusi itu dibentuklah kelompok-kelompok untuk mendalami masing-masing isu—setiap peserta memilih isu yang mereka minati. Karena isu-isu yang dialami ini dirasakan cukup banyak warga dan mendesak untuk diselesaikan, isu-isu ini biasanya lebih mudah menggerakkan warga secara kolektif.



Biasanya ini termasuk isu kelangkaan air dan tanah garapan, hama tanaman, pengurangan ongkos produksi pertanian yang mahal, kesulitan memperoleh bahan bakar, perlakuan terhadap kalangan difabel, dan sebagainya.

Di sepanjang tahap penelitian lapangan ini setiap tim didampingi fasilitator dan secara teratur mengadakan semiloka yang menyajikan dan mendiskusikan temuan-temuan, sementara setiap tim mengenai ‘isu-isu penting’ di desa. Pada kesempatan ini mereka juga mengevaluasi metode dan batas-batas pengetahuan mereka tentang desa. Selama tahap ini di beberapa angkatan pelatihan (tidak semua), mereka juga meneliti bagaimana SRP Payo-Payo menjalankan kerja-kerja pengorganisasian di desa penelitian (apabila di sana pernah berlangsung pengorganisasian oleh SRP Payo-Payo). Mereka mewawancarai warga, fasilitator, dan pengurus SRP Payo-Payo untuk merekonstruksi kerja-kerja SRP Payo-Payo. Mereka kemudian menyarikan sejumlah faktor kunci dan prasyarat yang berperan dalam keberhasilan/kegagalan pengorganisasian. Seluruh peserta kemudian berkumpul dalam satu semiloka untuk membahas alternatif praktik pembangunan desa (yaitu lewat pengorganisasian), merefleksikan dan mengevaluasi metode-metode yang telah dijalankan. Pada tahap ini para peserta juga menulis laporan hasil kerja lapangan, menyajikannya di depan warga desa, lalu bersama warga dan pemerintah desa membuat Rencana Tindak Lanjut. Di sini warga desa turut bersuara untuk menentukan agenda selanjutnya, seperti isu apa yang paling prioritas untuk didalami dan diatasi dan bagaimana agenda tersebut akan dijalankan.



Tahap berikutnya ialah praktik atas keseluruhan pelajaran yang peserta peroleh sebelumnya juga menjalankan Rencana Tindak Lanjut yang sudah dibuat bersama warga desa. Pada tahap ini peserta dibagi menjadi sejumlah tim yang masing-masing tinggal di desa untuk menjalankan program pengorganisasian rakyat SRP Payo-Payo. Selama tahap ini para peserta mendapatkan pendampingan minimal dari fasilitator.

Dengan menerapkan *PAR* sebagai metodologi, PPD setidaknya sudah menghasilkan tiga capaian: Pertama, *PPD* berperan dalam 'pembelajaran' dengan mengenalkan kepada warga alternatif metode dalam kajian ilmiah (termasuk alat mengumpulkan dan analisa data); upaya ini telah menghasilkan sejumlah warga yang mengenali dan mampu menerapkan proses-proses penelitian ilmiah dasar semisal mengamati pertumbuhan padi dalam *system of rice intensification* (SRI), menghitung debit air, melakukan pemetaan, dan sebagainya.

Kedua, dengan melakukan penelitian bersama warga, menurut agenda/isu warga, pengetahuan yang dihasilkan lebih relevan, terperinci, dan berdaya terap tinggi untuk mengusahakan perubahan nyata. Dengan begitu, desa punya data milik sendiri yang relevan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan desa yang lebih inklusif. Hal ini misalnya, bisa menghindari salah sasaran bantuan atau kekeliruan meletakkan lokasi jalan tani; juga memungkinkan warga melihat desa secara utuh, seperti penyebab rusaknya jaringan air bawah tanah yang telah mengurangi debit air atau menghilangkan mata air.



Pengetahuan holistik ini beserta pengetahuan teknis yang disebut sebelumnya beredar luas di desa dan menghasilkan transparansi atau demokratisasi pengetahuan tentang kondisi desa, yang pada ujungnya berguna mengurangi ketergantungan kelompok marginal terhadap para patron, dari dalam maupun luar desa. Pengetahuan holistik juga bisa membuka mata warga terhadap agenda/isu kelompok marginal, yang kemudian dibahas dalam pengambilan kebijakan desa, semisal ketimpangan distribusi air<sup>13</sup>, pelatihan, lahan garapan, bibit, jalan tani, dan sebagainya. Kadang kala relasi patronase yang sudah dianggap wajar dan mengorbankan kelompok marginal bisa bertahan karena para patron sendiri belum tahu dampaknya secara terperinci. Mereka tidak selalu berupa “orang jahat” atau “tikus desa” sebagaimana dikesankan dalam sejumlah wacana tentang desa, mereka cuma belum menyadari dampak dari struktur sosial yang menguntungkan mereka dan merugikan yang lain. Bila pun memang demikian, para patron memang mengambil keuntungan dari struktur sosial yang timpang, keberadaan data yang komprehensif dapat memicu diskusi publik mengenai kondisi ketimpangan yang berlangsung di desa. *PAR* di sini bisa dilihat sebagai upaya membalik arus kekuasaan dan pengetahuan yang

---

13. Air sering kali bukan dianggap urusan bersama karena tidak tampak secara kasat mata. Perkara bersama (kekeringan) dilihat dan diatasi sebagai persoalan masing-masing keluarga. Setiap keluarga berusaha mengatasi sendiri-sendiri kekurangan air yang sebetulnya disebabkan oleh distribusi yang timpang (penguasaan mata air sebagai milik pribadi) dan berkurangnya debit air secara umum (akibat degradasi keanekaragaman hayati di sekitar mata air).

tadinya hanya mengalir dari kota ke desa, dari patron ke para pengikut.

Ketiga, pelatihan ini menghasilkan para pengorganisir rakyat, para kader/fasilitator terlatih yang siap bekerja bersama warga desa, baik dari luar maupun dalam desa sendiri. Hal ini menjadi penting dalam kurun pandemik ketika desa butuh penelitian lapangan untuk menyusun kebijakan (menurut UU Desa), sementara banyak perguruan tinggi belum menemukan formula untuk bisa menjalankan *PAR* di desa-desa. []



## Profil Penulis

Orang-orangan sawah dalam bahasa Mandar biasa dikenal dengan istilah “payo-payo”. Tugasnya mengusir burung pemakan padi di sawah. Meski kelihatan sepele, selama ini *payo-payo* terbukti menjadi teknologi pertanian tepat guna yang diciptakan dan dikembangkan oleh petani. Hal itulah yang menginspirasi Nurhady Sirimorok untuk membentuk *farmers learning center* bernama Sekolah Rakyat Petani (SRP) Payo-Payo. Tujuannya sebagai pusat kegiatan dan belajar bersama bagi para petani pedesaan.

Sebelumnya, ia menyelesaikan studi di bidang Rural Livelihood and Global Change di Institute of Social Studies, Belanda pada 2007. Sepulang dari sana, Nurhady menekuni isu pedesaan yang ia tuangkan dalam beragam tulisan. Baik sebagai penulis, penerjemah, maupun penyunting. Esai-esainya tersebar di berbagai media. Ia juga tergabung dalam Dewan Redaksi Jurnal WACANA-INSISTPress. Isu pedesaan yang kerap ia bahas antara lain tentang persoalan pertanian, pendidikan, dan ketimpangan sosial.

Bukunya berjudul *Catatan Perjalanan tentang Satu Bahasa, Melihat Desa Lebih Dekat*, memotret kondisi desa, akar persoalan, dan kegelisahan warganya. Buku tersebut memaparkan program pemerintah di desa yang berakhir tragis. Salah satunya, komoditas kakao. Pemerintah dengan otoriter mengajarkan, membina, dan menyuluh petani tanpa memprediksi masa depan kakao. Padahal, pohon kakao hanya produktif selama 10-15 tahun. Setelahnya, lahan menjadi aus dan kekurangan unsur hara. Sehingga petani kemudian miskin dan terpaksa menjadi buruh karena kebun mereka tidak produktif lagi.





# Saatnya Merekonstruksi Pendidikan yang Adil, Demokratis, dan Berkelanjutan<sup>1</sup>

*Fadilla Mutiarawati<sup>2</sup>*

**P**erubahan gaya hidup dan pesatnya urbanisasi telah mendorong deforestasi dan hilangnya biodiversitas. Tingkat urbanisasi

1. Makalah disampaikan dalam kegiatan Kongres Kebudayaan Desa tanggal 2 Juli 2020, Seri 3: Pendidikan yang Membebaskan
2. Relawan di Sokola Rimba sejak tahun 2005. Mahasiswa program doktoral Ilmu Pendidikan di Universitas Oulu, Finlandia

Indonesia saat ini telah mencapai 66,6 persen<sup>3</sup> dan setiap tahun terus meningkat. Padahal, Sekretaris Jenderal dan Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB, Inger Andersen, menyatakan bahwa meningkatnya penyakit zoonosis, seperti Ebola, SARS, dan Covid-19 disebabkan karena ulah manusia. Cara hidup manusia modern saat ini telah banyak merusak ekologi dan mengancam biodiversitas. Belum lagi ancaman krisis pangan, baik karena pandemi maupun perubahan iklim.

Pandemi bukan hanya persoalan di bidang medis dan kesehatan. FAO telah memberikan peringatan akan terjadinya ancaman krisis pangan dunia. Belum lagi PHK karyawan dan buruh yang diperkirakan jumlahnya mencapai 3,05 juta<sup>4</sup>. Bisa dibayangkan, betapa paniknya kaum urban menghadapi situasi ini. Tak heran pada saat awal pandemi banyak dari mereka yang *panic buying* menimbun bahan pokok untuk persediaan yang kemudian menyebabkan harga beberapa barang kebutuhan sempat naik.

Bukan berarti orang-orang di desa tidak akan menghadapi rawan pangan dan kesulitan ekonomi akibat pandemi. Ini terjadi juga, terutama di desa-desa yang menggantungkan pencahariannya pada tanaman komoditas seperti sawit, juga beberapa desa yang mengalami gagal panen. Namun, beberapa desa adat yang masih mempertahankan tradisi lumbung pangan, isu itu seakan jauh dan mustahil mengingat beras di lumbung mereka masih cukup untuk persediaan bahkan sampai beberapa tahun ke depan. Tidak sedikit

---

3. Data Badan Pusat Statistik

4. Tempo.co



pula desa-desa yang tergerak untuk menyumbangkan hasil panennya untuk membantu mereka yang terdampak pandemi, seperti yang dilakukan oleh petani di Banten dan juga di Kulonprogo yang terancam tergusur.

Sebetulnya kota-kota sangat bergantung terhadap pasokan dari desa. Petani tetap bekerja mengolah ladang dan kebun agar kebutuhan pangan terus terpenuhi. Di lain sisi, sampai saat ini kehidupan desa dan cara-cara hidup tradisional selalu dianggap tidak modern dan terbelakang. Padahal, UNESCO dalam *policy brief*-nya menyatakan pengetahuan lokal dan pengetahuan adat memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan berkelanjutan. Begitu pula dengan salah satu *goal* dalam SDG (SDG 4.7) yang harus dicapai ditahun 2030 menyatakan bahwa: “Pada tahun 2030, memastikan bahwa mereka yang belajar mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, HAM, kesetaraan gender, mendukung budaya perdamaian dan antikekerasan, kependudukan global, dan apresiasi terhadap keberagaman budaya dan kontribusi budaya kepada pembangunan berkelanjutan.” (PBB, 2017)

Dengan fakta-fakta tadi, pendidikan di Indonesia seharusnya mulai memberikan ruang yang besar pada komunitas lokal dan komunitas adat karena pengetahuan lokal dan pengetahuan adat tidak lahir dari ruang hampa dan statis. Pengetahuan lokal dan



pengetahuan adat justru kaya akan pengalaman empiris, sangat dinamis, dan sudah terbukti visioner. Keberadaan lumbung-lumbung pangan, hanyalah salah satu contoh saja.

Ketika berbicara adat atau tradisi, sekolah selalu melihat dengan pengertian yang sempit sehingga pengetahuan lokal dan pengetahuan adat dalam kebudayaan tidak terintegrasi ke berbagai bidang keilmuan yang utama seperti IPA, IPS, atau matematika. Pengetahuan lokal dan pengetahuan adat cenderung diperlakukan ornamental serta berdiri sendiri sebagai mata pelajaran seni dan budaya. Padahal, budaya sendiri memiliki pengertian yang luas. Secara etimologi, kata budaya berasal dari bahasa Sanssekerta *buddhayah* yang artinya akal dan budi. Sedangkan dalam bahasa Inggris kata *culture* berasal dari bahasa Latin *colere* yang artinya menjaga, mengolah, atau mengerjakan tanah. Jika diambil seluruh maknanya maka kebudayaan adalah seluruh pengetahuan dan pengalaman manusia dalam memahami lingkungannya.

Seperti halnya kejadian pandemi saat ini. Masyarakat adat sudah jauh lebih dulu memiliki pengetahuan dan pengalamannya. *Social distancing* yang diberlakukan di masyarakat modern hari ini sudah ratusan tahun diberlakukan oleh Orang Rimba setiap ada wabah penyakit datang, dengan bahasa Rimba disebut *besesandingon*. Sedangkan untuk menghadapi kerawanan pangan, umumnya masyarakat adat dan di pedesaan memiliki sistem lumbungnya masing-masing. Ada yang menyimpan terpisah dari pemukiman seperti Orang Baduy, menyimpan di langit-langit rumah seperti Orang Kajang, atau di pekarangan rumah seperti Orang Tengger.



Kebudayaan dalam kurikulum pendidikan diperkenalkan dengan cara yang romantis ketimbang kritis. Pelajaran seni dan budaya pada hari ini isinya masih seputar pakaian adat, rumah tradisional, atau kesenian tradisional. Pelajaran di sekolah di Sulawesi Selatan tidak mengajarkan atau memberi ruang bagi pengetahuan navigasi Bugis. Persekolahan di sekitar Ciboleger juga tidak memberikan ruang pada pengetahuan seputar ketahanan pangan di Baduy atau di Kajang tidak diperkenalkan cara pengelolaan lahan dan arsitektur rumah Kajang yang dibangun dengan gotong royong dari kayu-kayu yang ditanam sendiri. Jangankan berbicara tentang mengembangkan benih pangan lokal, sistem pengelolaan lahan dan hutan setempat saja tidak memiliki ruang di sekolah formal.

Persekolahan didominasi dengan prinsip-prinsip kompetisi dan sangat individual, padahal masyarakat yang kuat adalah masyarakat yang bergotong royong dan bergerak kolektif. Pelajaran sekolah sibuk mengenalkan pemanasan global dan perubahan iklim dari perspektif industri dan gaya hidup kaum urban atau kosmopolis. Perspektif kosmopolis ini juga yang telah mengalienasi siswa dari lingkungannya khususnya di pedesaan. Tidak heran saat ini banyak yang meninggalkan desanya di usia yang sangat muda, enggan untuk mengolah lahan. Data mengatakan bahwa saat ini jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian setiap tahunnya terus menurun dari 39,22 juta di tahun 2013 menjadi 35,7 juta di tahun 2018 (sumber: BPS). Cita-cita menjadi petani memang tidak pernah menuai pujian para guru di sekolah. Menjadi petani dianggap sangat tradisional



dan yang tradisional di sekolah dianggap tidak modern, tidak maju, atau bahkan tertinggal.

Padahal di Tengger, jagung lokal atau yang dalam bahasa Orang Tengger disebut tebon, memiliki biji yang lebih besar dan zat tepung yang lebih banyak ketimbang jagung hibrida. Tebon juga memiliki ketahanan hama yang jauh lebih baik. Lalu, biasanya tebon akan disimpan pada lumbung (sigiran) kurang lebih satu tahun lamanya untuk berjaga-jaga jika terjadi kondisi darurat. Sayangnya, pengetahuan ini juga tidak memiliki ruang di sekolah formal di sekitar Tengger. Bahkan banyak anak-anak di Tengger yang memilih tinggal jauh dari keluarga demi bersekolah yang kurikulumnya membawanya lebih jauh lagi dari lingkungannya. Jangankan untuk mendiskusikan tebon dan sigiran dengan kritis, untuk memasukkan taksonomi tebon ke dalam pelajaran IPA saja rasanya sulit karena tidak ada dalam buku pelajaran.

Tidak adanya pengakuan atas pengetahuan yang kaya akan data empiris ini membuktikan bahwa persekolahan menganggap komunitas sebagai entitas yang kosong dan lemah dan karenanya komunitas tidak diacuhkan dari proses penyusunan kurikulum dan implementasinya. Dalam sistem persekolahan, pelibatan komunitas masih sangat sempit, sekadar sebagai murid atau orang tua murid saja. Persekolahan hanya menempatkan anak sebagai konsumen informasi atau pengetahuan yang sudah diproduksi dan direncanakan satu pihak. Sementara itu, orang tua dianggap sebagai perpanjangan tangan sistem persekolahan dalam mendisiplinkan anak di rumah

dalam mengkonsumsi pengetahuan yang diproduksi di persekolahan. Baik anak maupun orang tua tidak dianggap sebagai bagian yang sejajar dengan sekolah. Anak dan orang tua tidak dianggap pantas menjadi partner dalam memproduksi pengetahuan. Bahkan masih banyak sekolah dan guru yang tidak percaya diri mengembangkan kurikulumnya sendiri.

Pendidikan seharusnya dialogis. Sehingga anak-anak tidak teralienasi dari keluarga dan lingkungannya, serta manfaat dari proses pendidikan dapat dirasakan langsung oleh komunitas. Pada pendidikan dialogis, kurikulum akan menjadi *praxis* bagi komunitas dan sekolah ketimbang produk eksklusif sekolah. Menjadi *praxis* artinya kurikulum dirancang dan dilaksanakan bersama antara komunitas dan sekolah. Dengan menjadi *praxis*, kurikulum tidak lagi berisikan sesuatu yang statis. Dengan demikian, pengetahuan dapat diproduksi bersama secara aktual antara sekolah dengan komunitas, serta diuji bersama pula. Pengetahuan yang riil dan nyata akan dapat memberikan kontribusi yang nyata juga. *Praxis* yang dilakukan dengan terus-menerus dapat melahirkan perubahan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakatnya.

Pengertian *praxis* pada pendidikan dialogis adalah aksi kritis yang didasari oleh refleksi yang juga kritis. Proses aksi-refleksi aksi bersifat dialektis, tidak terputus, dan terus terjadi. Dalam aksi-refleksi kritis pada pendidikan dialogis, komunitas termasuk siswa ditempatkan sebagai subjek, bukan objek yang harus diubah. Pendidikan dialogis justru merespons kondisi aktual dan



merefleksikan aspirasi komunitas dan bersinergi bersama dalam mengkonstruksi dan merekonstruksi kondisi yang menjadi objek dari pendidikan tersebut. Pendidikan yang kritis lebih dari sekadar menyenangkan. Pendidikan yang kritis adalah pendidikan yang dialogis dan dapat membawa perubahan untuk masyarakatnya.

Namun, sepertinya pendidikan di Indonesia masih enggan untuk bersifat dialogis. Pendidikan Indonesia masih dibayangkan oleh industri 4.0. Kurikulum Indonesia masih dibayangkan oleh standarisasi PISA yang dibuat oleh OECD ketimbang mengembangkan sendiri potensi-potensi yang dimiliki. Indonesia selalu mencoba belajar dari negara-negara yang dianggap maju, tetapi tidak mengindahkan konteks yang membentuk pendidikan di negara-negara tersebut. Sehingga sulit menerapkan pendidikan yang kontekstual untuk di negaranya sendiri.

Menurut survei yang dilakukan UNICEF di masa pandemi ini, 62 persen siswa kesulitan memenuhi kebutuhan kuota internet. Belum lagi keluhan orang tua yang merasa kesulitan membantu anaknya belajar di rumah. Padahal, di masa pandemi bukan hanya kondisi kesehatan yang terancam, banyak keluarga juga yang mengalami kekurangan ekonomi. Alih-alih menjaga asupan nutrisi keluarga, justru harus membeli kuota untuk anaknya agar “tetap bersekolah”. Ini artinya, sistem persekolahan tidak mampu merespons kondisi aktual yang terjadi di masyarakat. Sudah terlalu lama memang kemampuan merespons kondisi aktual ini dikebiri oleh sistem pendidikan kita. Dengan memaksakan materi sekolah

yang tidak aktual sebenarnya sekolah justru telah mengganggu proses belajar keluarga dari realita yang sedang dihadapi. Padahal, keterlibatan anak pada keluarga saat ini dapat menjadi proses belajar yang sangat penting untuk masa depannya, masa depan keluarga, dan lingkungannya.

Seperti halnya dalam masa pandemi ini, jika pendidikan bersifat dialogis seharusnya proses pendidikan tidak akan mengalami kendala-kendala seperti orang tua yang kesulitan membantu anaknya belajar atau keluarga menjadi harus terbebani dengan pemenuhan kebutuhan teknologi informasi. Justru sebaliknya, proses belajar anak sendiri atau bersama orang tua dapat berkontribusi pada keluarga dan lingkungannya.

Lalu, bagaimana menyiapkan pendidikan setelah masa pandemi berlalu? Ketika hasil survei UNICEF mengatakan bahwa 66 persen siswa mengeluh merasa tidak nyaman belajar di rumah, bukannya melakukan refleksi kritis, banyak pihak justru malah menyalahkan infrastruktur. Padahal, di negara-negara maju yang memiliki infrastruktur yang lebih baik, anak-anak juga mengeluhkan hal serupa dan orang tua juga banyak yang terbebani dengan kondisi belajar di rumah. Seharusnya hal ini sudah cukup menjelaskan bahwa infrastruktur bukanlah jawaban utama. Konsep pendidikan kita yang harus berubah.

Sudah waktunya merekonstruksi ulang cara kita memberikan pendidikan bagi generasi masa depan. Membangun generasi yang tidak hanya menyenangi belajar, tetapi mampu berbuat untuk



keluarga dan lingkungannya. Sudah saatnya pendidikan memberikan pengakuan pada pengetahuan lokal dan tradisional dan mau melibatkan masyarakat lebih dari sekadar konsumen. Mungkin sulit dan membutuhkan banyak waktu serta energi untuk mengubah kurikulum nasional. Namun, desa dengan otonominya niscaya bisa menjadi pihak yang mendorong proses-proses dialogis di dalam persekolahan di wilayahnya. Dengan pendidikan yang dialogis kita sudah memberikan hak belajar yang adil dan demokratis serta berkontribusi pada proses-proses berkelanjutan.[]



## Profil Penulis

Selama ini ada anggapan bahwa orang luar yang datang ke masyarakat adat itu membawa ilmu. Padahal sebaliknya, justru mereka yang banyak belajar dari kearifan lokal masyarakat adat. Contohnya, sistem lumbung yang sejak lama dipraktikkan di beragam adat. Pada kondisi ketahanan pangan yang rapuh seperti sekarang ini, justru berkat lumbung tersebut kebutuhan pangan masyarakat adat terbukti tangguh. Karena mereka memahami sejarah dan punya pengalaman empiris secara turun-temurun.

Fadilla Mutiarawati juga punya contoh lain di ranah pendidikan. Berdasar pengalamannya sebagai relawan di Sokola Rimba sejak tahun 2005. Menurutnya, Sokola Rimba punya cara belajar yang berbeda dibanding sekolah konvensional. Salah satunya adalah konsep pendidikan kontekstual. Anak diberi kebebasan ingin belajar apapun dan dilibatkan secara langsung dalam pemecahan masalah. Hal ini penting agar anak-anak belajar dari keluarga dan komunitas masyarakatnya.

Selama di Sokola Rimba ia banyak bertemu dengan masyarakat adat. Dan membuatnya makin percaya bahwa masyarakat adat sejatinya kaya pengetahuan. Mereka telah punya sejarah dan pengalaman yang panjang. Sayangnya, pendidikan di Indonesia berpusat pada dunia urban dan melihat kesuksesan dari sisi materialistik. Kini, Fadilla sedang menempuh studi doktoral Ilmu Pendidikan di Universitas Oulu, Finlandia.





# Ke Manakah Arah Dunia Pendidikan Kita?<sup>1</sup>

*Toto Rahardjo<sup>2</sup>*

Sudah bisa dipastikan bahwa setiap pergantian menteri pendidikan di Indonesia sejak zaman Orde Baru selalu ada pergantian kebijakan yang terkait dengan sekolah, dan yang paling sering menjadi sasaran adalah perombakan kurikulum. Sejak zaman Orde

- 
1. Makalah disampaikan dalam kegiatan Kongres Kebudayaan Desa tanggal 2 Juli 2020, Seri 3: Pendidikan yang Membebaskan
  2. Pendiri Sanggar Anak Alam (SALAM). Praktisi Pendidikan Populer

Baru hingga sekarang telah terjadi empat kali perubahan, antara lain pada tahun 1975, tahun 1984 (kurikulum Cara Belajar Siswa Aktif atau disingkat CBSA), tahun 1994, tahun 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK), dan tahun 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP). Tahun ini (2020), pemerintah berencana menerapkan Kurikulum 2013 yang konon menekankan kompetensi dan kreativitas.

Selain kurikulum juga lahir kebijakan-kebijakan fenomenal lain yang dapat kita runut kembali. Misalnya, pada zaman Menteri Pendidikan Daoed Joesoef; karena menganggap pendidikan Indonesia tidak memiliki visi, Daoed Joesoef merumuskan visi pendidikan serta membangun perangkat pendukungnya. Daoed Joesoef terkenal dengan kebijakan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Koordinasi Kemahasiswaan) yang intinya dimaksudkan untuk membersihkan kampus dari kegiatan-kegiatan politik (memisahkan aktivitas ilmiah dari dunia politik). Menurut Daoed, kegiatan politik hanya boleh dilakukan di luar kampus, sementara tugas utama mahasiswa adalah belajar. Melalui kebijakan ini ia menghapus Dewan Mahasiswa (DEMA) di universitas-universitas seluruh Indonesia, praktis melumpuhkan kegiatan politik mahasiswa.

Daoed Joesoef kemudian digantikan oleh Nugroho Notosusanto pada tanggal 19 Maret 1983. Nugroho dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Pembangunan IV. Ia dikenal sebagai orang yang kaya ide karena semasa menjadi menteri ia mencetuskan banyak gagasan, seperti konsep wawasan



almamater, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), Pendidikan Humaniora. Ia juga mengubah kurikulum, menghapus jurusan di Sekolah Menengah Atas (SMA), dan membuat sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru (Sipenmaru). Nugroho hanya dua tahun menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi melahirkan banyak kebijakan, antara lain Universitas Terbuka (UT) sebagai perguruan tinggi negeri paling bungsu di Indonesia, program wajib belajar orang tua asuh, dan pendidikan kejuruan di sekolah menengah. Nugroho adalah satu-satunya menteri yang mengeluarkan Surat Keputusan mengenai tata laksana upacara resmi dan tata busana perguruan tinggi. Akan tetapi, sebelum surat keputusan ini terlaksana, Nugroho telah dipanggil Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya Menteri Wardiman Djojonegoro mengintroduksi *link and match* (kesesuaian dan keterpaduan), yakni sebuah strategi penyelenggaraan pendidikan yang memfokuskan perhatian pada tenaga siap pakai. *Link and match* merupakan program utama yang dijalankan oleh Wardiman semasa menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Konsep ini sendiri sebenarnya tidak lahir dari pemikiran Wardiman, tetapi hasil tiruan dari pendidikan di Amerika Serikat. Prof. Karl Willenbrock, pakar pendidikan dari Harvard University Amerika Serikat, mengusulkan gagasan perusahaan menjadi “bapak angkat” bagi perguruan tinggi. Dalam pemikirannya, perusahaan tidak sekadar memberi tempat berlatih atau menyisihkan sebagian keuntungannya, tetapi juga terlibat

dalam pengembangan lembaga pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Dari gagasan inilah kemudian konsep *link and match* meluas di dunia pendidikan.

Gagasan ini bermula dari indikasi banyaknya lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan (lapangan kerja). Konsep *link and match* didasari oleh kebutuhan tenaga kerja terampil. Karena disinyalir lembaga pendidikan selama kurun waktu sejak kemerdekaan belum mampu memenuhi tuntutan tersebut, konsep *link and match* dimasukkan sebagai terapi untuk mengatasi persoalan tenaga kerja siap pakai. Maka dikembangkan kembali sekolah kejuruan dan disusul dengan serangkaian kerja sama Depdikbud dengan perusahaan-perusahaan serta instansi-instansi yang secara riil menikmati keuntungan, misalnya dalam hal menyediakan tempat untuk magang anak-anak sekolah. Termasuk di dalam rangkaian upaya ini adalah merealisasikan 20 persen kurikulum lokal. Dengan kata lain, kebijakan *link and match* ini merupakan kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan, kebutuhan tenaga kerja, dunia usaha, dan dunia industri.

Di era reformasi, dunia pendidikan kembali diguncang gegap gempita silang sengkabut. Gus Dur membuat kejutan memisahkan bidang kebudayaan dari departemen pendidikan. Barangkali upaya pemisahan ini dimaksudkan agar urusan pendidikan lebih fokus. Dari segi pertimbangan pragmatis memang masuk akal, tetapi secara substansial apakah bisa pendidikan dipisahkan dari kebudayaan?



Pada tahun 2008 terjadi gonjang-ganjing karena pemerintah bersikukuh dengan sistem Ujian Nasional (UN) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi kontroversi sampai sekarang. Opini ketidaksetujuan masyarakat sangat jelas, tetapi sama sekali tidak memengaruhi kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan UN. Kasus UN telah mempertontonkan pengalaman buruk yang mungkin tidak terjadi di dunia lain. Ujian sekolah harus melibatkan aparat keamanan, bahkan lebih memalukan lagi Detasemen Khusus Antiteror 88 menggerebeg rumah guru yang tengah membantu murid-muridnya mengisi *form* isian ujian. Apa pun alasannya bahwa contoh tersebut telah memperlihatkan cara pandang *security* aparatus pendidikan dalam operasional proses pendidikan.

Belum selesai urusan Ujian Nasional (UN), Mohammad Nuh membuat lagi kurikulum baru yang dinamai Kurikulum 2013. Perdebatan kembali meruyak baik yang pro dan kontra, dan Mohammad Nuh menjawabnya.

“Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang pernah digagas dalam Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, tetapi belum terselesaikan karena desakan untuk segera mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Rumusnya berdasarkan sudut pandang yang berbeda dengan kurikulum berbasis materi sehingga sangat memungkinkan terjadi perbedaan persepsi tentang bagaimana kurikulum seharusnya

dirancang. Perbedaan ini menyebabkan munculnya berbagai kritik dari yang terbiasa menggunakan kurikulum berbasis materi. Untuk itu, ada baiknya memahami lebih dahulu konstruksi kompetensi dalam kurikulum sesuai koridor yang telah digariskan Undang-undang Sisdiknas sebelum mengkritik, ungkap Mohammad Nuh.<sup>3</sup>

Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2017, banyak tulisan perkara dunia pendidikan di media massa maupun opini netizen yang berkeliaran di dunia maya. Semuanya tidak beranjak dari cerita tentang rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, ketertinggalan dari negara lain, urusan efektivitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran, rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan mahalnya biaya pendidikan.

Sama seperti yang diungkapkan Anies Baswedan ketika jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa 75 persen sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan. Berdasarkan pemetaan Kemendikbud terhadap 40.000 sekolah pada 2012, diketahui bahwa isi, proses, fasilitas, dan pengelolaan sebagian besar sekolah masih belum sesuai standar pendidikan yang baik seperti diamanatkan undang-undang. Tak hanya itu, nilai rata-rata uji kompetensi guru yang diharapkan standarnya mencapai 70 belum terpenuhi, hanya berada di angka 44,5. Pengganti Anies, Muhadjir Effendy, beda lagi pendapatnya.

---

3. *Kompas*, Kamis 7 Maret 2013



Dia meminta satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kreatif dan bisa menghasilkan uang. *“Ke depan, Kemdikbud tidak hanya menghabiskan uang, tetapi juga bisa menghasilkan uang,”* kata Muhadjir dalam rapat koordinasi penggunaan anggaran 2017. Sementara para aktivis pendidikan di luar pemerintah sibuk menyuarakan berbagai metode, teknik belajar yang memerdekakan anak, memamerkan bagaimana menghadirkan pluralitas di sekolah, dan untuk menguatkan suaranya tak lupa membawa nama besar Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantara sambil meminta serta merayu untuk diakui oleh Pemerintah, dengan berbagai label “pendidikan”, melalui berbagai perhelatan nasional, termasuk makan siang bersama presiden.

Sepanjang masih bicara pendidikan, di benak mereka hanya sekolah dan anak-anak semata. Padahal, sekolah hanya salah satu unsur dalam pendidikan—belum sampai pada pertanyaan, *apa, sih, gunanya sekolah?* Untuk apa sekolah hukum bila sehari-hari tak ada contoh keadilan? Untuk apa sekolah pertanian kalau menyaksikan nasib petani dari hari ke hari semakin terpuruk? Untuk apa sekolah pangan jika mayoritas bahan makanan masih mengimpor dan semakin marak makanan sampah? Untuk apa sekolah farmasi kalau kenyataannya obat-obatan tidak dibuat sendiri? Apa gunanya sekolah ini sekolah itu kalau setiap hari menyaksikan pencuri uang rakyat, garong yang disebut koruptor tidak semakin jera?

Dengan kata lain, sekolah membutuhkan lingkungan, ekosistem sebagai wahana belajar dari kehidupan nyata. Membentuk moral,

nilai-nilai, dan semangat sangat tidak memadai bila hanya dibebankan kepada sekolah semata. Maka negara menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem belajar. Pernyataan dua menteri di atas menunjukkan bahwa urusan pendidikan masih berhenti di tempat, tak beranjak ke mana-mana. Sementara masyarakat (baca: rakyat Indonesia) sudah telanjur menyerahkan nasib pendidikan kepada negara.

Sementara itu, para aktor swasta melihat keadaan itu sebagai peluang bahwa mendirikan sekolah dapat menjadi mesin penghasil uang. Mereka bangun sekolah dengan macam-macam “label”, mulai dari sekolah taraf internasional, sekolah berbasis agama yang akan menghasilkan akhlak mulia, sekolah alam, hingga sekolah berbasis teknologi. Iklannya pun banyak ditemui di jalan. Jumlah sekolah tidak menjamin terciptanya iklim belajar di masyarakat dan tidak korelatif dengan produksi pengetahuan.

Kalau saya amati sepintas, perkembangan arah kiblat dunia sekolah yang ada sekarang hanya ada tiga; yang pertama berkiblat ke Barat, yang kedua berkiblat ke Arab/Timur Tengah (bukan berarti Islam), dan yang ketiga golongan minoritas yang berusaha mempertahankan khazanah kehidupan setempat yang dimiliki.

Kembali ke Kurikulum 2013, pertanyaan lebih lanjut, yakni jika proses belajar-mengajar umpama membangun sebuah rumah, apakah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu membuat bestek komplet? Apakah setiap warga yang menyelenggarakan proses belajar-mengajar harus menggunakan bestek secara murni



dan konsekuen? Apa risikonya bagi masyarakat yang tidak memilih bestek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang didukung dan diperkuat oleh hukum?

Tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimplementasikan penguatan karakter penerus bangsa melalui gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang digulirkan sejak tahun 2016. Pendidikan karakter pada jenjang pendidikan dasar mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan pendidikan yang mengajarkan pengetahuan. Untuk sekolah dasar sebesar 70 persen, sedangkan untuk sekolah menengah pertama sebesar 60 persen.

Tak hanya olah pikir (literasi), PPK mendorong pendidikan nasional kembali memperhatikan olah hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), dan juga olahraga (kinestetik). Keempat dimensi pendidikan ini hendaknya dapat dilakukan secara utuh-menyeluruh dan serentak. Integrasi proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di sekolah dapat dilaksanakan dengan berbasis pada pengembangan budaya sekolah maupun melalui kolaborasi dengan komunitas-komunitas di luar lingkungan pendidikan.

## **Lima Nilai Karakter Utama**

Ada lima nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila yang menjadi prioritas pengembangan gerakan PPK, yaitu religiositas, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan kegotongroyongan. Masing-masing nilai tidak berdiri dan berkembang sendiri-sendiri,



melainkan saling berinteraksi satu sama lain, berkembang secara dinamis, dan membentuk keutuhan pribadi.

Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Implementasi nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam sikap cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, antiperundungan dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih.

Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Sikap nasionalis ditunjukkan melalui sikap apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama.

Adapun nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan,



tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Seseorang yang berintegritas juga menghargai martabat individu (terutama penyandang disabilitas), serta mampu menunjukkan keteladanan.

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Siswa yang mandiri memiliki etos kerja yang baik, tangguh, berdaya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Diharapkan siswa dapat menunjukkan sikap menghargai sesama, dapat bekerja sama, inklusif, mampu berkomitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong-menolong, memiliki empati dan rasa solidaritas, antidiskriminasi, antikekerasan, dan sikap kerelawanan.

## Penguatan Tri Pusat Pendidikan

“PPK ini merupakan pintu masuk untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap pendidikan kita,” kata Mendikbud kepada Tim Implementasi PPK yang terdiri dari berbagai unsur pemangku pendidikan beberapa waktu yang lalu. Menurut Mendikbud, PPK tidak mengubah struktur kurikulum, tetapi memperkuat Kurikulum 2013 yang sudah memuat pendidikan karakter itu. Dalam penerapannya dilakukan sedikit modifikasi intrakurikuler agar lebih memiliki muatan pendidikan karakter. Kemudian ditambahkan kegiatan dalam kokurikuler dan ekstrakurikuler. Integrasi ketiganya diharapkan dapat menumbuhkan budi pekerti dan menguatkan karakter positif anak didik. Prinsipnya, manajemen berbasis sekolah dan lebih banyak melibatkan siswa pada aktivitas daripada metode ceramah. Selain itu, juga diterapkan kurikulum berbasis luas atau *broad based curriculum* yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber belajar.

PPK mendorong sinergi tiga pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga (orang tua), serta komunitas (masyarakat) agar dapat membentuk suatu ekosistem pendidikan. Menurut Mendikbud, selama ini ketiganya seakan berjalan sendiri-sendiri, padahal jika bersinergi dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Diharapkan manajemen berbasis sekolah semakin menguat, di mana sekolah berperan menjadi pusat dan lingkungan sekitar dapat dioptimalkan untuk menjadi sumber-sumber belajar.



## Mengembalikan Jati Diri Guru

Sebagaimana ajaran Ki Hadjar Dewantara, *ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*, seorang guru idealnya memiliki kedekatan dengan anak didik. Bukan sekadar dimensi intelektualitas saja, tetapi juga kepribadian setiap anak didik. Tak hanya sebagai pengajar mata pelajaran saja, tetapi guru harus mampu berperan sebagai fasilitator yang membantu anak didik mencapai target pembelajaran. Guru juga harus mampu bertindak sebagai penjaga gawang yang membantu anak didik menyaring berbagai pengaruh negatif yang berdampak tidak baik bagi perkembangannya. Seorang guru juga harus mampu berperan sebagai penghubung anak didik dengan berbagai sumber belajar yang tidak hanya ada di dalam kelas atau sekolah. Dan sebagai katalisator, guru juga harus mampu menggali dan mengoptimalkan potensi setiap anak didik.

Berdasarkan Pasal 15 PP Nomor 19 Tahun 2017, pemenuhan beban kerja guru dapat diperoleh dari ekuivalensi beban kerja tugas tambahan. Kegiatan lain di luar kelas yang berkaitan dengan pembelajaran juga dapat dikonversi ke jam tatap muka. Guru tidak perlu mengejar jam mengajar tambahan di luar sekolahnya untuk memenuhi beban kerja mengajar, melainkan bertanggung jawab terhadap perkembangan siswanya.

Saya sangat setuju Peraturan Presiden tentang Pendidikan Karakter. Namun pertanyaannya, *bagaimana melaksanakannya?* Pertanyaan ini penting untuk dijawab mengingat Perpres tersebut



mensyaratkan pelaksanaan yang berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada, memerlukan guru-guru yang tak sama dengan guru-guru yang ada, butuh sistem relasi yang berbeda pula serta tentu saja metodologi belajar yang tepat. Sistem belajar yang ada di sekolah pada umumnya berbasis mata pelajaran, penganut penyeragaman, pemuja kompetisi, penghamba lomba dan ujian, pemuja prestasi, dan guru menjadi pusat pengetahuan. Sementara kita tahu bahwa karakter adalah *output*, akibat dari sebuah lingkungan tata kehidupan sehari-hari.

Bagaimana mau membentuk karakter kalau sekolah hanya fokus mengejar prestasi agar tidak jeblok di UN? Apakah sudah dipikirkan soal bagaimana melahirkan kemandirian siswa bila proses belajar sehari-hari seperti kerbau yang dicocok hidungnya? Perihal butir karakter terakhir yang dicanangkan, ‘gotong royong’, apakah mungkin gotong royong akan hidup bila pendidikan sudah masuk kubangan lumpur pasar?

## **Mau ke Mana Pendidikan Kita?**

Kita mendapat kesan seolah-olah perubahan kebijakan sangat dipengaruhi oleh selera dari latar belakang pendidikan para menterinya, ditambah lagi pengaruh orientasi pasar yang sangat kuat sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada komoditas pendidikan dengan instrumen yang disebut standardisasi dan sertifikasi. Namun, kalau kita memandang mundur ke belakang,



sesungguhnya hal seperti itu telah terjadi jauh sejak Belanda masih bercokol di Indonesia.

Pada September 1983 almarhum Aswab Mahasin pernah melontarkan secara jernih tentang bagaimana perkembangan sekolah yang secara berangsur-angsur mengarah kepada kebakuan dimulai dengan kutipan Surau Jembatan Besi yang ditulis oleh Hamka; “tidak ada meja, tidak ada kursi, tidak ada batu tulis, tidak ada kapur tulis. Orang semuanya duduk bersila di lantai. Ada murid yang telah sekolah di sekolah Gubernemen, dan ada yang bersekolah di Diniyah, dan ada yang buta huruf. Ada yang umur 10 tahun dan ada yang berumur 30 tahun, dalam satu kelas”.

Almarhum Aswab mengingatkan saat itu bahwa Surau Jembatan Besi tengah mengubah dirinya menjadi sekolah dengan sistem kelas. Barangkali pada saat itu orang merasa ganjil demikian juga kesan Hamka yang menuturkannya pada tahun 1951 ketika sekolah juga sudah menjadi sistem yang baku.

Nampaknya pembakuan dan penertiban jagat persekolahan sudah ada sejak dahulu kala. Pada tahun 1905, bahkan untuk mengajar agama pun orang harus memperoleh izin dari bupati (*Ordonansi Guru, Staatsblad 1905 No.505*). Walaupun dua puluh tahun kemudian diperlunak dengan hanya memberitahukan maksud dan tujuan pengajaran, melampirkan daftar murid, dan rancangan kurikulum (Stb. 1925 No. 219), tentu hal ini mulai dirasakan sebagai bentuk pengawasan yang memberatkan kalangan pendidik. Pada bulan September 1932, keluar peraturan yang jauh lebih



keras lagi: “semua sekolah yang tidak didirikan oleh pemerintah atau memperoleh subsidi pemerintah diharuskan mengajukan izin terlebih dahulu (Stb. 1932 No. 494). Ada persyaratan yang lebih berat dari sebelumnya; guru-guru harus lulusan sekolah negeri atau sekolah bersubsidi ini syarat yang tidak mudah dipenuhi oleh sekolah-sekolah kebangsaan pada saat itu.

Seluruh pergerakan nasional meradang. Ki Hadjar Dewantara secara terbuka mengirimkan telegram kepada gubernur jenderal bahwa ia akan mengorganisir perlawanan terhadap ordonansi itu. Mohammad Hatta menyerukan agar semua organisasi melakukan aksi massa untuk mendukung pernyataan Ki Hadjar. Budi Utomo juga mengancam akan menarik wakil-wakilnya dari *Volkstraad* jika ordonansi itu tetap berlaku. Di Yogya, PPKI bersama Muhammadiyah dan Tamansiswa menyelenggarakan rapat raksasa yang dihadiri oleh lebih dari 10.000 orang yang menentang berlakunya ordonansi itu di wilayah kesultanan dan kesunanan. Dalam kurun waktu sekitar lima bulan, ribuan rapat protes diorganisir di seluruh Jawa dan Sumatra hingga menarik perhatian seorang John Ingleson untuk menulis bahwa belum ada isu yang mampu mempersatukan pergerakan nasional sebelum kasus ordonansi ini. Akhirnya, Gubernur Jenderal de Jonge menyerah. Ordonansi itu dibekukan pada bulan Februari 1933, hanya lima bulan setelah dinyatakan berlaku.

Apakah usaha untuk pembakuan sekolah berhenti setelah dibekukan? Pada saat itu juga berbagai upaya dilakukan oleh penguasa, melalui pengakuan, perangsang (semacam bantuan), juga



dilakukan semacam “pembinaan”, senantiasa diupayakan agar sistem yang baku berjalan dan sistem yang dianggap menyimpang terhalang. Dasar-dasar penilaiannya bisa terkait ideologis, atau dengan bahasa pedagogis yang sesungguhnya mengandung kepentingan ideologis.

Usaha pembakuan masih terus berlangsung meskipun Indonesia telah merdeka, sekalipun pada masa penjajahan dirasakan bahwa pembakuan yang dilandasi kepentingan kekuasaan menimbulkan kerepotan tetapi tidak serta-merta setelah merdeka proses pembakuan berhenti. Masih saja ada ketakutan terhadap penyelenggaraan sekolah yang dianggap menyimpang, tidak memenuhi syarat bahkan lambat laun berkembang menjadi stigma bagi banyak lembaga sekolah nonpemerintah. Anehnya di sekolah negeri pun usaha pembakuan terus berlanjut dan dirasakan penting. Begitu pentingnya sehingga setiap kali pergantian menteri selalu diikuti dengan pergantian-pergantian ukuran-ukuran baku, sekolah lantas diperlakukan sebagai bengkel uji percobaan.

Perkembangan pembakuan dalam proses berikutnya justru lebih parah, yakni bermetamorfosa menjadi penyeragaman, padahal dalam dunia pendidikan yang satu fungsinya bernama sekolah ada dua fungsi yang tidak bisa dicampuradukkan dan diseragamkan. Pertama, dunia sekolah yang dibirokrasikan, diundang-undangkan oleh kaum penguasa dengan memiliki kepentingan dan ideologi tertentu. Kedua, jagat proses dan kehidupan nyata yang memiliki elan-vitalnya sendiri, yakni sekolah dipahami merupakan kehidupan nyata, berangkat dari kebutuhan nyata serta proses mencari jawaban

atas segala persoalan serta berbagai faktor yang memengaruhi kehidupan yang dihadapi.

Belajar dari segala zaman, yang tidak pernah berubah adalah cara pandang (paradigma). Ada dua pandangan kuat di kalangan pendidik. Pandangan pertama adalah pendidikan bagi pihak yang memiliki kekuatan mendominasi selalu digunakan untuk melanggengkan sekaligus menciptakan penguat untuk legitimasi mereka. Maka pendidikan yang dilakukan pada hakikatnya merupakan alat untuk melanggengkan sistem dan struktur sosial yang sudah ada. Pandangan seperti ini dalam pendidikan disebut teori “reproduksi”. Pandangan Kedua, berangkat dari asumsi bahwa manusia terkungkung dalam sistem dan struktur yang melahirkan dehumanisasi maka proses pendidikan merupakan upaya pembebasan manusia karena pendidikan merupakan sarana mengembalikan kemanusiaan atas manusia. Pandangan tersebut dalam pendidikan disebut teori “produksi”.

Tentu saja kedua pandangan itu dalam praktiknya tidak serta-merta mudah dilacak bagi mata biasa karena kedua pandangan tersebut masing-masing selalu menyertakan kemuliaan, juga menonjolkan tujuan kebaikan bagi manusia. Freire secara tegas telah memperingatkan para pendidik tentang bahaya dari praktik sekolah, yakni suatu proses pendidikan yang dialihkan dari atas atau yang berasal dari luar belaka, bahkan disinyalir ikut andil dalam penindasan orang miskin serta menciptakan “budaya bisu”, karena kaum elite melalui sekolah dan media massa menyampaikan



pandangan hidupnya kepada orang miskin. Akibatnya, orang miskin menyerap pandangan kaum elite untuk memandangi diri mereka dari situlah lahir “budaya bisu” itu; orang miskin menjadi bisu dan tak sanggup mengungkapkan aspirasi dan kepentingan mereka yang sebenarnya. Secara tegas Freire menunjukkan relasi sosio-budaya, proses pendidikan seperti itu menuju “dehumanisasi” baik kepada kaum yang menindas maupun kepada kaum yang tertindas. Berangkat dari pengalaman itu, dikembangkan metode penyadaran (konsientisasi) dengan menggunakan media alfabetisasi untuk mencapai jalan keluar.

Bagi para pendidik aliran kedua, dalam urusan proses pendidikan, lebih spesifik lagi yakni sekolah yang didirikan, tidak cukup hanya bicara urusan kurikulum, metode, teknik belajar-mengajar, tetapi juga penting mewujudkan prasyarat terbangunnya sistem belajar-mengajar yang tidak terjerumus dalam “kubangan dehumanisasi”. Dehumanisasi yakni anak dari paham filsafat yang bertolak dari kehidupan nyata yang melahirkan pertanyaan “mengapa mayoritas manusia menderita, sementara ada pihak yang justru menikmati penderitaan orang lain?”, “mengapa ada pihak-pihak yang menikmati keuntungan dengan cara-cara yang tidak adil dan pihak yang menikmati ini justru kelompok minoritas umat manusia?”, serta banyak pertanyaan lainnya.

Padahal ketidakadilan, penindasan, atau apa pun namanya serta apa pun alasannya adalah tidak manusiawi karena menafikan harkat kemanusiaan itulah dehumanisasi. Mayoritas kaum yang

tertindas menjadi tidak manusiawi karena kemanusiaan mereka dinistakan karena mereka dibuat tak berdaya dan dibenamkan dalam “kebudayaan bisu” (*submerged in the culture of silence*). Sedangkan minoritas kaum penindas menjadi tidak manusiawi karena telah mendustai hakikat kemanusiaannya, melupakan keberadaan hati nurani sendiri dengan memaksakan penindasan bagi manusia sesamanya. Maka tidak ada pilihan lain, yakni upaya, ikhtiar memanusiakan manusia (humanisasi) merupakan tindakan mutlak.

Dehumanisasi memang kenyataan yang terjadi dalam sejarah peradaban manusia dan tetap merupakan suatu kemungkinan ontologis di masa mendatang, tetapi dehumanisasi bukanlah keharusan sejarah. Secara dialektis kenyataan tidak harus menjadi keharusan maka menjadi tugas manusia untuk mengubahnya agar sesuai dengan apa yang seharusnya. Itulah fitrah manusia sejati (*the man's ontological vocation*).[]



## Profil Penulis

Bagi Toto Rahardjo, pendidikan kerakyatan (*popular education*) sepertinya sudah seperti candu karena ia telah menekuninya lebih dari 20 tahun. Dimulai dengan menjadi fasilitator dan pengorganisasian, terutama di Jawa Tengah, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, hingga bersama Romo Mangunwijaya mengggagas berdirinya Yayasan Dinamika Edukasi Dasar (DED) di Kali Code, Yogyakarta.

Ia juga mendirikan Sanggar Anak Alam (SALAM) di daerah pegunungan Banjarnegara, Jawa Tengah dan menghidupkannya kembali di Kampung Nitiprayan, Yogyakarta pada tahun 2000. Pendidikan di sekolah ini melibatkan orang tua murid dan lingkungan setempat karena mereka meyakini jika belajar merupakan proses untuk menemukan nilai-nilai dan pemahaman hidup yang lebih baik.

Selain itu, Toto pernah menjadi Ketua Dewan Pendidikan dan Pengembangan INSIST. Tahun 1998, ia sebagai pegiat awal berdirinya penerbitan INSISTPress, bersama Mansour Fakih, Roem Topatimasang, Anu Lounela, dan Saleh Abdullah. Beberapa buku yang pernah ia tulis dan sunting antara lain *Sekolah itu Candu*, *Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik: Mencegah Penularan HIV/AIDS di Lingkungan Seks Komersial*, dan *Jalan Sunyi Emha*. Ia juga menerbitkan buku tentang isu pedesaan, organisasi masyarakat sipil, dan pendidikan.





# Menggalakkan Pendidikan Berbasis Konteks Kehidupan<sup>1</sup>

*Ahmad Bahrudin<sup>2</sup>*

S engkarut dunia pendidikan di Indonesia beberapa tahun belakangan tak bisa dilepaskan dari model pendidikannya yang berorientasi pada masyarakat urban. Model pendidikan macam ini

1. Makalah disampaikan dalam kegiatan Kongres Kebudayaan Desa tanggal 2 Juli 2020, Seri 3: Pendidikan yang Membebaskan dan disarikan oleh Rofi Ali Majid
2. Inisiator Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah. Anggota Badan Akreditasi Nasional PAUD dan Pendidikan Non Formal

diakui memang aplikatif dan relevan jika ditujukan untuk mendidik masyarakat yang tinggal di perkotaan. Namun, mengaplikasikan model pendidikan urban secara serentak dan menyamaratakan agar dilaksanakan di seluruh Indonesia sama saja dengan memaksa peserta didik untuk menutup mata dengan realitas yang ada. Satu hal yang perlu disadari, tak semua masyarakat di negara ini hidup di daerah perkotaan.

Penyeragaman metode pendidikan tersebut membawa kita pada sebuah konsekuensi logis bahwa anak-anak muda mulai menjauh dari realitas sosialnya. Sekolah menjadi semacam tembok yang memisahkan antara peserta didik dengan lingkungan sehingga kelak melahirkan orang-orang yang kesulitan untuk memanfaatkan lingkungan, sebab telah terbiasa dididik untuk menjadi kaum urban.

Kalaupun lagi, pendidikan dengan orientasi urban akan menuntut para peserta didik untuk merantau ke kota jika ingin mengaplikasikan apa yang mereka pelajari di sekolah. Di titik ini, permasalahan yang muncul mulai bisa diuraikan, dari ledakan penduduk perkotaan hingga berbagai ketimpangan antara masyarakat desa dan kota dalam berbagai hal. Besarnya minat anak muda untuk merantau ke kota disebabkan oleh minimnya pengetahuan dalam memaksimalkan potensi desa. Padahal, jika pendidikan hari ini tidak berorientasi urban, potensi desa akan dapat dimaksimalkan secara optimal.

Seperti kita ketahui, potensi agraria di desa-desa Indonesia masih belum banyak dimaksimalkan, terbukti dari besarnya impor

bahan pangan yang dilakukan negeri ini. Dalam rentang waktu Januari-November 2018, Indonesia telah melakukan impor gandum sebanyak 9,2 juta ton, kedelai 2,4 juta ton, beras 2,2 juta ton, dan garam 2,5 juta ton serta gula seberat 4,6 juta ton<sup>3</sup>. Hal tersebut menjadi ironi mengingat desa-desa di Indonesia memiliki lahan yang subur serta laut yang luas. Produk pertanian maupun laut idealnya menjadi basis pasokan pangan yang kuat jika dikelola dengan maksimal. Di titik inilah sumber daya manusia desa harus bisa bereksplorasi. Lantas, pendidikan seperti apa yang tepat untuk membangun sumber daya manusia Indonesia saat ini?

Cakupan wilayah Indonesia yang luas secara geografis membawa kita pada suatu fakta bahwa negara ini memiliki keragaman kultur dan potensi. Ada masyarakat yang tinggal di kota, pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi maupun pesisir pantai. Masing-masing wilayah tentu memiliki sumber daya serta kebutuhan yang juga beragam. Menyeragamkan model pembelajaran yang berorientasi urban untuk seluruh wilayah di Indonesia justru langkah yang keliru dalam membangun kesiapan manusia Indonesia. Pendidikan sudah seharusnya dikembalikan pada murahnya: mampu membuat peserta didik mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Akan tetapi pertanyaannya, kenapa anak-anak di desa malah berebut ruang untuk merantau ke kota, alih-alih memaksimalkan

3. Badan Pusat Statistik



potensi desa? Mengapa disparitas penghasilan masyarakat kota dan desa begitu mencolok? Di titik inilah penyeragaman pendidikan berorientasi urban menjadi tidak relevan karena dinilai tidak mampu mengurai dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Sehingga pilihan yang paling tepat adalah dengan mengubah metode pendidikan itu sendiri: pendidikan berbasis pada konteks kehidupan.

Dalam konsep pendidikan yang berbasis konteks kehidupan terdapat dua hal utama yang wajib diperhatikan. *Pertama*, lingkungan alam adalah media belajar utama peserta didik, sehingga media pembelajaran buatan pabrik tidak lagi menjadi prioritas sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini. Peserta didik harus semaksimal mungkin berinteraksi dengan alam tempatnya tinggal sehingga memahami karakteristik lingkungannya dengan baik.

*Kedua*, pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Sebagai seorang pembelajar, peserta didik diberikan keleluasaan untuk mengeksplorasi hal-hal yang ia sukai. Proses belajar yang diawali dengan rasa suka akan mampu memaksimalkan potensi peserta didik. Di titik ini pula, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan yang berguna bagi dirinya sendiri maupun masyarakat–segendang sepenarian dengan amanah undang-undang.

Satu hal yang jelas didapatkan dari model pendidikan berbasis konteks kehidupan adalah menumbuhkan nalar kritis pada peserta didik. Nalar kritis bukan hadir dari proses menghafal tulisan-tulisan yang ada di dalam buku pelajaran, melainkan dari proses refleksi atas

apa yang dipelajari dengan praksis yang dilakukan. Sehingga mampu mengurai permasalahan, lantas mencoba untuk mencari alternatif pemecahan masalah.

Mari kita menuju ke sebuah contoh yang relevan dengan pembahasan ini. Seorang peserta didik yang tinggal di daerah persawahan idealnya telah dikenalkan dengan lingkungan pertanian sejak kecil. Cara belajar terbaik tentu saja dengan terjun dan melakukan praktik di lapangan, alih-alih duduk di kelas berjibaku dengan banyak buku. Dengan metode yang aplikatif, siswa tidak hanya mendapatkan pengalaman, melainkan juga pemahaman-pemahaman yang relevan. Pendidikan dengan orientasi urban tidak memberikan kesempatan tersebut. Inilah yang dimaksud sebagai *menjauhkan* peserta didik dari realitas.

Ketika menggunakan lingkungan alam sebagai media pembelajaran, peserta didik akan mengenali karakteristik serta permasalahan yang ada. Dari situlah mereka akan berpikir bagaimana menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Sebagai contoh, apabila lingkungannya merupakan daerah yang mengalami krisis air maka peserta didik akan bersuaha mencari tahu akar persoalan dan menemukan solusinya. Siswa akan lebih aplikatif karena hal tersebut menjadi realitas yang dihadapi dalam keseharian siswa. Apakah dengan melakukan konservasi baik buatan maupun alami? Atau mencari sumber mata air lantas memompanya dengan pompa hidrolik alami? Pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini akan melatih nalar berpikir peserta didik agar mampu lebih bersikap solutif.



Selama ini, materi-materi tentang kelokalan hanya diserahkan kepada mata pelajaran muatan lokal (mulok)—yang sayangnya materi ini masih amatlah kurang, bahkan cenderung mereduksi makna lokalitas itu sendiri. Muatan lokal biasanya hanya diisi dengan materi pelajaran bahasa daerah maupun seni budaya daerah. Padahal, permasalahan di masing-masing daerah lebih kompleks dari sekadar bahasa maupun seni budaya—yang dalam konteksnya sering diartikan secara sempit: lagu daerah dan kerajinan daerah. Permasalahan-permasalahan di daerah juga termasuk soal produktivitas pertanian, lumbung pangan, produktivitas nelayan, pupuk, hama, serta limbah. Idealnya semua permasalahan tersebut sudah diperkenalkan sejak dini sehingga dalam proses belajar peserta didik benar-benar mampu memaksimalkan potensinya. Mulok seharusnya *living context based*.

Demi menyongsong ke arah pendidikan berbasis konteks lingkungan hidup, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF) berkat dorongan kuat Kabalitbang, Totok Suprayitno, telah melakukan beberapa pembenahan, termasuk dalam paradigma proses akreditasi yang selama ini akreditasi sekadar “*compliance*” ke “*Performance*”. Pembenahan tersebut dimanifestasikan dengan perubahan instrumen akreditasi, baik instrumen Evaluasi Diri Satuan-Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) yang menekankan pada pemenuhan dokumen (*compliance*) maupun Instrumen Penilaian Visitasi yang fokus kuat pada penilaian kinerja (*performance*) Satuan Pendidikan. Jika hingga 2018 keseluruhan instrumen

selesai pada tahap pembuktian keberadaan, kelengkapan, dan kesesuaian dokumen Satuan Pendidikan (akrab disebut dengan ALS – Ada, Lengkap, Sesuai), saat ini telah ditransformasi dan menekankan kualitas performa dari satuan pendidikan itu sendiri. Sebagai contoh, apabila Satuan Pendidikan hanya menunjukkan kepemilikan kekayaan alat permainan edukatif (APE), tetapi tidak maksimal penggunaannya maka nilai akreditasi tidak akan baik. Sebaliknya, Satuan Pendidikan yang miskin APE, tetapi mampu memanfaatkan lingkungan untuk media edukasi maka bisa dipastikan nilai akreditasi dari Satuan Pendidikan tersebut akan baik. Sehingga pendidikan berbasis konteks kehidupan menjadi sangat penting untuk diterapkan, sebab sumber daya alam, sosial, dan budaya adalah media belajar yang tak punya batas dan selalu bisa dipelajari kapan saja.

Oleh karena itu, dituntut perubahan paradigma baik dari masyarakat, pendidik, maupun pemerintah. Dengan konsep pendidikan seperti ini, proses tumbuh kembang dan kelak peserta didik akan lebih maksimal dan dapat mengeksplorasi potensi serta sumber daya yang dimiliki dengan baik.

Satu hal yang barangkali cocok untuk menutup tulisan ini, mari kita galakkan pendidikan yang berbasis pada konteks kehidupan agar menghasilkan sumber daya manusia yang bernalar kritis dan siap untuk menghadapi berbagai permasalahan kehidupan di masa depan. □



## Profil Penulis

Satu-satunya anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Masyarakat (BAN-DIKMAS) yang tidak punya gelar akademik. Namun, kiprahnya pada pendidikan yang humanis diakui semua kalangan. Ahmad Bahruddin mengawalinya dari kaki Gunung Merbabu di Salatiga, Jawa Tengah. Ia mendirikan Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah pada tahun 1999. Gagasan tersebut lahir karena miris melihat petani yang berpendidikan rendah, miskin, dan terpinggirkan.

Selanjutnya, tahun 2003 ia mendirikan sekolah informal Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah untuk anak-anak petani. Di sanggar tersebut murid bebas memilih apa yang ingin dipelajari. Mulai dari membuat komik, majalah dinding, hingga film dokumenter. Di akhir tahun ajaran, mereka ikut ujian kesetaraan Program Paket B dan C. Konsep Qaryah Thayyibah ini menunjukkan bahwa sekolah mestinya punya semangat pembebasan dan perbaikan. Karena itu butuh perilaku kritis, dinamis, dan kreatif; bukan dogmatis atau statis.

Menurutnya pendidikan harus berpihak pada siapa pun karena tiap orang berhak mendapat pendidikan. Proses belajar itu harus menyenangkan. Sehingga guru perlu berperan sebagai fasilitator dan murid yang dibimbing terlibat aktif dalam pembelajaran. Belajar perlu memiliki prinsip kolaboratif dan partisipasif dalam merancang sistem. Melibatkan guru, pengelola sekolah, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Sehingga tercipta sistem sekolah yang membumi dan melek lingkungan.





# Pandemi Covid-19: Tragedi Supremasi Pedagogi Antroposen dan Urgensi Reformulasi Pedagogi yang Memerdekakan<sup>1</sup>

*AB. Widyanta<sup>2</sup>*

*Education, far from ranking as man's greatest resource,  
will then be an agent of destruction,  
in accordance with the principle "corruptio optimi pessima".*

***E.F. Schumacher, The Greatest Resources—Education, 1974***

1. Tulisan ini dikontribusikan untuk perhelatan gagasan “Pendidikan yang Membebaskan: Membalik Paradigma Pendidikan Urban” dalam Webinar Sesi 3 Kongres Kebudayaan Desa (KKD) melalui Call for Papers.
2. **AB. Widyanta** adalah staf pengajar di Departemen Sosiologi, Fisipol, Universitas Gadjah Mada. Saat ini ia tengah merampungkan naskah disertasi bertajuk “Diskursus Politik NGO di Indonesia dalam Era Demokratisasi dan Liberalisasi” untuk program doktoral pada Departemen Sosiologi, Fisipol, UGM. Terlibat dalam kerja-kerja penelitian pada Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM dan berkegiatan dalam gerakan *Critical Pedagogy for Future Indonesia (CPI)*.

*My voice is in tune with a different language, another kind of music.  
It speaks of resistance, indignation, the just anger of those who are  
deceived and betrayed.*

*It speaks, too, of their right to rebel against the ethical transgressions  
of which they are the long-suffering victims.*

**Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, 1970**

## Pengantar

Pandemi Covid-19 telah menjungkirbalikkan tatanan peradaban global, tak terkecuali Indonesia. Peradaban dunia hari ini seolah kembali ke titik nol dan butuh ditata ulang untuk menjalani kehidupan di era kenormalan baru. Merespons dunia yang tengah jungkir balik itu, muncullah sebuah “gerakan akar rumput” yang menggelar “Kongres Kebudayaan Desa” (KKD) selama hampir tiga bulan—1 Juni hingga 15 Agustus 2020—untuk mengadvokasi “narasi tanding”, arah tatanan baru maupun habitus baru atas tsunami retorika-mondial tentang “Normal Baru” yang kian terasa banal. Untuk pertama kalinya, Kongres Kebudayaan Desa terjadi dalam sejarah Indonesia dan untuk pertama kalinya juga sebagai kongres virtual (1-16 Juni 2020) di sebuah desa di kawasan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>3</sup>

Kongres Kebudayaan Desa yang bertajuk “Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A: Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa” merupakan inisiatif Sanggar Inovasi Desa (SID) Desa

3. Fx. Rudy Gunawan, Kongres Kebudayaan Desa: Membaca Desa Mengeja Ulang Indonesia, Opini Kompas, 19 Juli 2020.



Panggungharjo untuk menjawab perubahan tatanan masyarakat desa akibat pandemi Covid-19. Mengawali perhelatan kongres, Lurah Desa, Wahyudi Anggoro Hadi, dengan lugas menyatakan bahwa ‘Desa merupakan sumbu peradaban dalam tatanan masyarakat Indonesia. Selama pandemi desa terdampak secara sosial, ekonomi, budaya, agama, hingga hukum. Namun, di saat bersamaan desa juga mengajarkan tentang puncak-puncak relasi di masyarakat. Bahwa puncak relasi sosial adalah kekeluargaan, puncak relasi ekonomi adalah kerja sama, dan puncak relasi politik adalah musyawarah. Ketiga puncak relasi tersebut berujung pada semangat gotong royong dan kolaborasi multipihak’.<sup>4</sup>

Melalui Kongres Kebudayaan Desa, Ketua KKD, Ryan Sugiarto, menegaskan arti pentingnya merumuskan arah tatanan baru dari desa untuk mengelak dari kepunahan manusia. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa ‘Pandemi mengajarkan sisi positif bahwa manusia dengan segala daya, akal budi, dan kreativitasnya harus mencari ruang ‘perlawanan’ yang lebih baik. Menyerah berarti mengantarkan kematian atas kemanusiaan. Maka tak ada kata lain selain terus berjuang dan perjuangan itu harus dimulai dari desa. Sebuah entitas negara yang paling dekat dengan warganya. Tak ada jenjang pemerintahan yang lebih dekat dengan warga selain desa’.<sup>5</sup>

---

4. Wahyudi Anggoro Hadi. Konferensi Pers Kongres Kebudayaan Desa, di Kampoeng Mataraman, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, Kamis, 25 Juni 2020.

5. Ryan Sugiarto, Kongres Kebudayaan Desa: Mencari Arah Tatanan Baru dari Desa, Opini Kompas, 9 Juli 2020.



Terinspirasi dan tergerakkan oleh tekad dan keyakinan yang puguh dari para taruna muda Desa Panggungharjo yang didukung oleh antusiasme jejaring gerakan yang begitu luas atas KKD, tulisan ini muncul sebagai andil gagasan untuk proses diskusi dan refleksi lanjut atas sejumlah persoalan pendidikan di Indonesia, sebagaimana telah dipergulatkan dalam Webinar Kongres Kebudayaan Desa Hari ke-2 yang bertajuk ‘Pendidikan yang Membebaskan: Membalik Paradigma Pendidikan Urban’.<sup>6</sup> Namun, boleh juga jika pembaca hendak memposisikan tulisan ini sebagai parodi atas igauan “merdeka belajar” yang terlontar dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, pada penghujung tahun 2019 silam.<sup>7</sup>

Secara ringkas, tulisan ini hendak mengusung tiga pokok argumen dasar berikut. *Pertama*, gelombang besar pandemi Covid-19 yang menggulung peradaban dunia modern abad ke-21 saat ini adalah tragedi supremasi “pedagogi antroposen” yang berlangsung sekurangnya empat abad lalu. *Kedua*, dalam konteks pendidikan di Indonesia, pedagogi antroposen terperagakan secara mutakhir dalam “pedagogi neoliberal” yang memerangkap setiap

---

6. KKD. 2020. Webinar Kongres Kebudayaan Desa Hari ke-2 (Part-1), ‘Pendidikan yang Membebaskan: Membalik Paradigma Pendidikan Urban’. Youtube, dilihat 20 Juli 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=kAre--GNSs>.

7. Albertus Adit. 2020. Gebrakan “Merdeka Belajar”, Berikut 4 Penjelasan Mendikbud Nadiem. *Kompas*, 12 Desember 2019, dilihat pada 20 Juli 2020. <https://edukasi.kompas.com/read/2019/12/12/12591771/gebrakan-merdeka-belajar-berikut-4-penjelasan-mendikbud-nadiem?page=all>.

subjek didik warga negara dalam tiga sengkela besar sejak berjayanya kapitalisme atas sosialisme di Asia Tenggara melalui gebalau politik, kudeta berdarah, tahun 1965. *Ketiga*, rute pembebasan dari tiga belunggu besar yang utama dan terutama adalah agenda mendesak reformulasi pedagogi kritis politik kewarganegaraan atau peri kepublikan (“*masalah*” atau “*bonum commune*”) bagi tersemainya praktik-praktik pendidikan demokratis dan emansipatoris yang akan memerdekakan setiap subjek didik (pendidik dan/atau siswa didik) warga negara dalam semesta hidup dan penghidupan bersamanya.

## ‘Pedagogi Antroposen’

Suka tidak suka, pandemi Covid-19 yang menghajar kehidupan ras manusia di 213 negara di dunia<sup>8</sup> adalah buah kegagalan dari supremasi “pedagogi antroposen” yang berlangsung sekurangnya empat ratus tahun silam. Pandemi Covid-19 merupakan revolusi-balik zoonosis yang menelanjangi kedok-kedok supremasi “pedagogi antroposen(tris)” yang mengglorifikasi praktik-praktik dominasi, kekerasan, dan ketidakadilan terhadap entitas keanekaragaman hayati—mikroorganisme, tumbuhan, hewan, manusia, dll—dalam semesta ciptaan di planet Bumi ini. Kekerasan itu bahkan telah menjelma menjadi spiral kekerasan struktural yang teramat panjang seperti eksploitasi alam, penghancuran ekosistem lingkungan,

---

8. Worldometers. 2020. Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance. Worldometers, dilihat 20 Juli 2020. <https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries>.



hingga berujung pada penyingkiran liyan atau orang lain (*other*), berdasarkan identitas tertentu seperti suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, orientasi seksual, kelas, dll.

Di sini ‘pedagogi antroposen’ bisa diartikan sebagai nilai-nilai dan pengetahuan yang diturunkan dari model pendidikan yang fanatik terhadap paham *anthropocentrism*, yaitu paham yang meyakini bahwa manusia dengan kuasa rasionalitasnya berposisi sebagai makhluk yang memiliki kasta tertinggi, agung, digdaya, dan sentral dalam menentukan, menundukkan, menguasai, dan mengeksploitasi alam, lingkungan, dan hewan nonmanusia.<sup>9</sup> Sejak dihajar dan digulung balik oleh revolusi zoonosis, dunia pendidikan manusia modern dipaksa untuk bergegas berkaca, berbenah, sekaligus bertanggung jawab atas petaka pandemi Covid-19 ini.

Dalam konteks ini, dunia pendidikan urgen merespons imperatif moral tentang reformulasi pedagogis kritis yang memerdekakan demi terciptanya ruang kemungkinan bagi tersemainya habitus baru, tegaknya martabat manusia dalam kesetaraan dan keadilan, dan terwujudnya semesta ciptaan yang lebih lestari, persis di masa darurat pandemi Covid-19 saat ini sebagai momentum titik balik peradaban yang layak diperjuangkan.<sup>10</sup>

- 
9. G. Steiner . 2010. *Anthropocentrism and Its Discontents: The Moral Status of Animals in the History of Western Philosophy*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press; R. Boddice. 2011. *Anthropocentrism: Humans, Animals, Environments*. Leiden: Brill; P. Butchvarov. 2015. *Anthropocentrism in Philosophy: Realism, Antirealism, Semirealism*. Berlin: de Gruyter.
10. AB. Widyanta. 2020. “Pandemi Covid-19 dalam Diskursus Ecofeminisme”, presentasi Webinar PMKRI Yogyakarta “Ekofeminisme dan Kritik atas

Imperatif moral itu sayup-sayup masih bisa kita dengar dari seorang ekonom *cum* filsuf Ernst Friedrich Schumacher separuh abad silam. Menurutnya, pendidikan adalah sumber daya terbesar dalam kehidupan manusia.<sup>11</sup> Kendati demikian, ia secara tegas memperingatkan “*The Greatest Resources—Education*” mudah terpeleset ke dalam “*corruptio optimi pessima*” (*the corruption of the best is the worst of all*) yang secara harfiah berarti “korupsi atas hal terbaik adalah hal terburuk dari segala hal yang buruk.”<sup>12</sup>

Nukilan adagium itu dipakai Schumacher untuk menarasikan model pendidikan modern yang cenderung gandrung pada rasionalitas yang menyingkirkan basis nilai spiritualitas dan keanekaragaman nilai kehidupan. Menurutnya, sumber-sumber terpenting kehidupan manusia itu justru berpotensi menjadi petaka dan azab terbesar bagi peradaban manusia. Alih-alih menjadi berkah, pendidikan justru menjadi pangkal dari kutuk ketika terjadi penyalahgunaan, manipulasi, korupsi, dan sesat pikir. Kembali ia menyatakan, berbagai problem pendidikan merupakan cerminan atas akar persoalan terdalam dari masyarakat industrial yang tak akan tersolusikan oleh kebijakan organisasi, pemerintah, ataupun anggaran belanja (*the expenditure of money*). Menurut Schumacher, masyarakat modern menderita penyakit metafisis, oleh karena itu

---

Pembangunan”. Youtube, 22 Juni 2020, dilihat 20 Juli 2020. [https://www.youtube.com/watch?v= oKo29d6p-O8&t=2165s](https://www.youtube.com/watch?v=oKo29d6p-O8&t=2165s).

11. E.F. Schumacher. 1974. *Small is Beautiful: A Study of Economics as if People Mattered*. London: Abacus, hlm. 64.

12. Lihat <https://www.merriam-webster.com/dictionary/corruptio%20optimi%20pessima> diakses pada 20 Juli 2020.



obatnya pun haruslah metafisis. Sepanjang antimetafisika masih bercokol kuat dalam sistem pendidikan maka ia menjadi *an agent of destruction*.<sup>13</sup>

Tengarai Schumacher itu jelas merujuk pada terkorupsinya metafisika (basis nilai-nilai filosofis dan spiritual) dari ilmu-ilmu modern pasca-Revolusi Cartesian (Zaman Pencerahan ber-*credo: cogito ergo sum*)—tak terkecuali ilmu ekonomi. Tercerabutnya metafisika dari *corpus* ilmu ekonomi telah memunculkan praktik-praktik ekonomi yang alienatif, bengis, dan bahkan predatoris bukan saja terhadap kohesi sosial antarmanusia, tetapi juga kohesi manusia dengan ekologiannya. Ilmu ekonomi yang dalam kithahnya adalah ilmu moralitas sosial telah direduksi, dikorupsi, dipreteli, dan diringkus ke dalam ilmu ekonomi sesat (*economism*) yang pertama-tama dan terutama berfokus pada mekanisme pasar (*the market system*). Ilmu ekonomi sesat ini telah memobilisir mayoritas tindakan individual masyarakat modern untuk melakukan cara produksi baru yang digerakkan oleh dan untuk mekanisme kompetisi berdalil-tunggal permintaan dan penawaran (*supply and demand*), dengan monoklausulnya yang berbunyi *ceteris paribus*. Schumacher

---

13. E.F. Schumacher, *Small is Beautiful...*, hlm.83; AB. Widyanta. 2013. “Ekososialisme: Mengungkap Kembali Pemikiran Ekonomi-Politik Lingkungan Ernst Friedrich Schumacher”. Tesis pada Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.111.

menengarai kapitalisme modern membudidayakan watak tamak, iri hati, dan musnahnya kecerdasan (*collapse of intelligence*).<sup>14</sup>

Pandangan Schumacher itu relevan dengan penjelasan antroposentrisme di atas. Dalam berbagai karyanya, Schumacher menggugat realitas dan praktik turunan antroposentrisme sekurangnya dalam lima poin pokok berikut:<sup>15</sup> **pertama**, terhadap sistem filsafat dan ilmu-ilmu modern Barat yang antimetafisika, positivistik dan antroposentris; **kedua**, terhadap ilmu ekonomi arus utama yang bersifat positivistik dan materialistik; **ketiga**, terhadap praktik-praktik ekonomi dan gaya hidup masyarakat industrial Barat yang tamak, individualistis, konsumeris, dan pemboros (*wasteful*); **keempat**, terhadap sekularisasi agama Barat yang secara tidak langsung dan sublim turut ‘membiarkan’—untuk tidak mengatakan melegetimisi—berbagai praktik ekonomi kapitalistik-individual yang mendefisitkan ruang hidup bersama; **kelima**, terhadap praktik kebijakan politik negara-negara Barat yang ekspansif dan dominatif melancarkan generalisasi, homogenisasi, dan monokulturisasi produk nilai dan pengetahuan modern, sistem-sistem, dan praktik-praktik ekonomi materialistik di negara-negara Dunia Ketiga, melalui berbagai rezim dan aparatus lintas zaman, baik pada era kolonial (*colonialism*) atau imperialisme (*imperialism*),

---

14. E.F. Schumacher, *Small is Beautiful...*, hlm.26; AB. Widyanta, *Op.Cit.*, hlm. 112

15. E.F. Schumacher, *Small is Beautiful...* ; E.F. Schumacher, *The Age of Plenty*. MANAS. Volume XXVIII. No. 5 January 29, 1975; E.F. Schumacher, *A Guide for The Perplexed*. London: Abacus, 1978; E.F. Schumacher, *Good Work*. London: Abacus, 1980.



pembangunan (*developmentalism*), dan globalisasi neoliberal (*neoliberal globalization*) mutakhir.<sup>16</sup>

## ‘Pedagogi Neoliberal’

Subbab pertama mengantarkan narasi bahwa ‘pedagogi antroposen’ telah bertransformasi menjadi ‘pedagogi neoliberal’ sebagai suatu ‘*govern-mentality*’. Dalam terminologi Foucault, ‘*governmentality*’ dijelaskan sebagai “suatu kecenderungan, lini kekuatan, dalam periode panjang yang berlangsung di Barat telah lambat laun memunculkan bentuk-bentuk tipe kuasa lain (kedaulatan, disiplin, dll) yang bisa disebut “*government*” dan yang telah menghasilkan perkembangan serangkaian aparatus pemerintahan khusus di satu sisi dan serangkaian pengetahuan di sisi lain.<sup>17</sup>

Untuk konteks Indonesia, *governance* ‘pedagogi neoliberal’ bisa dilacak dalam rekam jejak sejarah ‘proyek politik neoliberal’ yang berlangsung selama hampir enam dekade (1965-2020) dalam tiga sekuensi berikut: ***pertama***, developmentalis-otoritarian

---

16. AB. Widyanta. Ekososialisme..., hlm.133.

17. Michel Foucault. 2007. *Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France 1977–1978* (hlm. 108). trans. Graham Burchell. New York: Palgrave Macmillan; Leonard Lawlor & John Nale. 2014: 176. *The Cambridge Foucault Lexicon*. New York: Cambridge University Press; B Sokhi-Bulley. 2014. “Governmentality: Notes on the Thought of Michel Foucault”. *Critical Legal Thinking*, 2 Desember 2014, dilihat 20 Juli 2020. <https://criticallegalthinking.com/2014/12/02/governmentality-notes-thought-michel-foucault/>.

di awal era Soeharto; *kedua*, liberalisasi 1980-an dan negara neoliberal-otoritarian; dan *ketiga*, negara neoliberal-nonotoritarian pascaliberalisasi 1998.<sup>18</sup> Dalam proyek politik neoliberal di kapitalisme pinggiran itu, David Harvey menengarai watak negara neoliberal selalu mengandalkan model perencanaan sektor publik dan negara melalui kerja sama yang kuat dengan modal domestik dan korporasi untuk menggenjot akumulasi kapital dan pertumbuhan ekonomi.<sup>19</sup>

Demi menjaga persistensi proyek politik neoliberal itu, kaum-kaum intervensionis sangat aktif menstimulasi, mengakselerasi, mengintensifikasi, dan mengekstensifikasi bekerjanya trisula program liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi demi terwujudnya infrastruktur holistik bagi iklim bisnis yang baik dalam sirkuit pasar bebas. Hegemoniknya proses neoliberalisasi multilini dan front itu, menurut Harvey, membuka berbagai kemungkinan negara mendongkrak posisi tawar mereka dalam kompetisi internasional melalui struktur-struktur baru dari intervensi negara, semisal pemberian dukungan bagi riset dan pengembangan.<sup>20</sup>

- 
18. Muhtar Habibi. 2016. *Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran: Relasi Kelas, Akumulasi, dan Proletariat Informal di Indonesia sejak 1980-an* (hlm. 49-70). Jakarta: Marjin Kiri; AB. Widyanta. 2019a. *Menyingkap Wajah Muram Buruh Sektor Tambang di Indonesia dalam Blokade Fundamentalisme Pasar dalam Falikul Isbah*. Yogyakarta: Departemen Sosiologi Fisipol UGM; \_\_\_\_\_ . 2019b. *Berkarya Tiada Henti: Tiga Lentera Bulaksumur* (hlm. 199). Yogyakarta: Departemen Sosiologi Fisipol UGM.
19. David Harvey. 2005. *A Brief History of Neoliberalism* (hlm. 71). New York: Oxford University Press; AB. Widyanta, *Op. Cit*, hlm.200
20. David Harvey, *Op. Cit*, hlm.72.



Persis dalam perkara riset dan pengembangan inilah proses neoliberalisasi berlangsung intensif di arena *core business* lembaga pendidikan (sekolah/universitas) dan lembaga penelitian di Indonesia. Dalam konteks itu, niscaya kaum intelegensia (pendidik, peneliti) dalam institusi sekolah, universitas, dan penelitian berikut alumninya telah menjadi agensi/aparatus utama yang bergumul dalam pusaran diskursus kuasa *neoliberal governance, neoliberal subjectivity, production and reproduction of neoliberal knowledge*.<sup>21</sup>

Bila mengacu pada rekam jejak dalam lini masa ‘proyek politik neoliberal’ di atas, terdapat tiga skandal neoliberalisasi yang berdampak serius bagi sistem pendidikan (formal, informal, nonformal) maupun proses pembentukan subjek-subjek didik warga negara di Indonesia. Tiga sengkela besar tersebut adalah: **pertama**, fundamentalisme politik (*authoritarianism*); **kedua**, fundamentalisme pasar (*free trade*); dan **ketiga**, fundamentalisme agama (*religious political identity*).<sup>22</sup> Penjelasan atas tiga sengkela itu bisa dijelaskan dalam paparan ringkas berikut.

- 
21. Simon Dawes & Marc Lenormand. 2020. *Neoliberalism In Context: Governance, Subjectivity And Knowledge*. Switzerland: The Palgrave Macmillan; Sheila L. Macrine. 2020. *Critical Pedagogy in Uncertain Times: Hope and Possibilities*. Switzerland: The Palgrave Macmillan; Henry A Giroux. “Neoliberal Dis-Imagination, Manufactured Ignorance, and Civic Illiteracy” dalam *Simon Dawes & Marc Lenormand. Op.Cit.*
  22. CPI dan CTSS. 2020. *Module Youth Leadership Training Towards Sustainable Landscape for Future Indonesia: Modul Pelatihan Kepemimpinan Kaum Muda Menuju Lanskap Berkelanjutan untuk Indonesia Masa Depan* (hlm 55). Bogor: Critical Pedagogy Indonesia (CPI) dan Centre for Transdisciplinary and Sustainability Sciences (CTSS).



*Pertama*, fundamentalisme politik (totalisasi invasi politik atas seluruh dimensi kehidupan warga negara) bermula sejak kudeta berdarah 1965 disertai pembantaian kaum yang dituduh berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai penanda akhir masa perang dingin di Asia Tenggara. Gebalau politik ini menjadi titik balik pergeseran pembangunan di Indonesia menjadi berciri kapitalistik, berbasis akumulasi kapital, dan berkiblat pada pasar komoditas ekspor di bawah rezim otoritarianisme Soeharto. Demi memacu laju gerak pertumbuhan ekonomi yang tinggi, segenap program pembangunan negara dikawal dengan derap sepatu dan tolongan moncong senjata militer. Totalisasi invasi politik ini menandai efektivitas politik ‘depolitisasi’ oleh ‘mesin antipolitik’ rezim Orde Baru.<sup>23</sup>

Pemberangusan hak-hak asasi, hak-hak politik, hak-hak sipil warga negara membuat subjek-subjek politik tumbuh kerdil, inferior, dan saling curiga. Dalam dunia pendidikan, subek-subjek didik didisiplinkan di bawah kontrol, represi, intimidasi, dan teror aparat militer. Perubahan kurikulum sekolah dirancang untuk memproduksi dan mereproduksi pengetahuan bagi subjek didik yang sejalan dengan hasrat dan kuasa rezim otoriter. Kehidupan kampus pun disterilkan dari berbagai bentuk aktivitas dan kegiatan politik, kebebasan berpikir, kebebasan mimbar akademik dengan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan

---

23. James Ferguson, 1994. *The Anti-Politics Machine: Development, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho*. Minnesota: University Of Minnesota Press.



(NKK/BKK). ‘Budaya bisu’ pun tertanam, berakar, dan membiak dalam relung pikir dan praktik hidup subjek didik warga negara.

*Kedua*, fundamentalisme pasar (totalisasi invasi ekonomi atas seluruh dimensi kehidupan warga negara) bermula tak lama setelah rezim otoriter berkuasa. Sistem infrastrukturnya pun telah dipersiapkan matang dalam kawalan ‘ekonom-ekonom bersenjatakan bedil’ di era 1960-1968.<sup>24</sup> Atas bantuan lembaga-lembaga multilateral Bank Dunia dan IMF, pembangunan otoritarian (*authoritarian development*) dijalankan dengan menguasai berbagai sumber daya alam strategis dan menjaga stabilitas politik melalui kontrol represif di pedesaan dan perkotaan, utamanya kelompok massa yang dianggap radikal seperti serikat tani, serikat buruh, asosiasi pemuda, kelompok keagamaan, dll. Semua didedikasikan pada terealisasinya visi pertumbuhan ekonomi yang tinggi.<sup>25</sup>

Invasi ekonomi babak baru muncul sejak kelahiran ‘bayi kembar’ demokratisasi dan liberalisasi. Bermula dari peristiwa krisis ekonomi 1997, pemberlakuan paksa atas program penyesuaian struktural (*structural adjustment program*) paska krisis dan perpecahan di lingkaran pendukung Orde Baru, penguasa otoriter Soeharto oleh gerakan oposisi pada 1998. Di bawah kendali IMF, pemulihan krisis ekonomi Indonesia sampai di ‘jalan tol’ bagi ‘proyek politik

24. Bradley R. Simpson. 2008. *Economist with Guns: Authoritarian Development and US-Indonesia Relations 1960-1968*. California: Stanford University Press.

25. Habibi, M. 2016. *Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran: Relasi Kelas, Akumulasi, dan Proletariat Informal di Indonesia sejak 1980-an* (hlm. 49-58). Jakarta: Marjin Kiri.

neoliberal'. Proses liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi melenggang bebas dari hambatan.<sup>26</sup> Dalam dunia pendidikan, subjek-subjek didik tunduk menjadi konsumen yang didisiplinkan menurut mekanisme pasar. Pendidikan sebagai *public good* dikomodifikasi dan dikomersialisasi secara masif.<sup>27</sup> Kurikulum sekolah dan perguruan tinggi menjadi ajang produksi dan reproduksi nilai dan pengetahuan *entrepreneurial* sebagai penopang hasrat dan kuasa korporasi-korporasi.<sup>28</sup> Kecilnya anggaran publik untuk pendidikan memaksa perguruan tinggi mereposisi diri menjadi agen-agen aktif dalam perekonomian global, untuk mengakumulasi kapital dari pungutan uang kuliah mahasiswa. Mahasiswa pun terpaksa membayar mahal biaya kuliah untuk masa depan yang ringkih (*precarious futures*)<sup>29</sup>, tak jelas, dan suram.

**Ketiga**, fundamentalisme agama (totalisasi invasi agama atas seluruh dimensi kehidupan warga negara) terinseminasi pascatragedi pembantaian terhadap 'musuh bersama', siapa pun yang dituduh berafiliasi dengan PKI sebagai 'kaum anti-Tuhan', oleh 'kelompok-kelompok agama'. Hilangnya 'musuh bersama' ini mengubah drastis pola relasi kuasa antarberbagai kekuatan di masa setelahnya. Produksi-reproduksi berbagai narasi 'hantu PKI', 'hantu komunis',  
26. *Ibid.*

27. Wahono, F. 2001. *Kapitalisme Pendidikan: Antara Kompetisi dan Keadilan*. Yogyakarta: Insist Press

28. Giroux, H.A. 2009. *Youth in a Suspect Society: Democracy or Disposability?* (hlm. 113). New York: Palgrave Macmillan.

29. Allmer, T and Ergin Bulut. "Academic Labour, Digital Media and Capitalism" dalam *tripleC: Communication, Capitalism & Critique*, 16 (1), pp. 44:240, hlm. 44. 2018.



‘hantu anti-Tuhan’ dipakai oleh kekuatan tertentu saat hendak ‘menyingkirkan’ pihak lawan. Silih berganti, kelompok militer ataupun kelompok agama sama-sama berkepentingan mereproduksi itu untuk menjadi kekuatan dominan.

Sejak rezim otoriter militer tumbang, pertarungan kekuatan menjadi bersifat horizontal berupa konflik-konflik SARA. Di arena kehidupan warga, terjadi praktik-praktik beragama secara involutif berupa fanatisme dan fundamentalisme keyakinan yang tidak jarang berujung pada penyingkiran liyan. Di arena politik, muncul penggalangan kekuatan politik berbasis agama atau ‘politik identitas’ (yang mengartikulasikan negara khilafah) di satu sisi dan munculnya kekuatan antagonis ‘hipernasionalisme’ (yang mengartikulasikan NKRI harga mati).

Dunia pendidikan kita pun tergerus oleh berbagai praktik beragama yang involutif semacam itu. Subjek-subjek didik ditundukkan menjadi ‘kombatan-kombatan’ yang didisiplinkan seturut hasrat ‘purifikasi agama’ dan/atau ‘politisasi agama’. Alih-alih menjadi ‘instrumen pembebasan, perdamaian, keselamatan, dan kemaslahatan’ bagi umat manusia sebagaimana yang dinubuatkan para Nabi, agama justru menjadi ‘instrumen penghancur’ martabat kemanusiaan. Fragmentasi pendidikan formal, informal, dan nonformal kian diperparah dengan ketidakadilan atas subjek-subjek didik yang tersegregasi karena perbedaan latar identitas keagamaannya.



## Urgensi ‘Pedagogi (Publik) Kritis’

Paparan tentang tiga sengkela besar di atas merepresentasikan *governmentality* dalam sekuensi dan konteks lanskap historis Indonesia dengan ragam variasi, kompleksitas, dan nuansa praktik dan pikir neoliberal. Lantas, bagaimana dunia pendidikan di Indonesia mesti merespons tiga sengkela itu agar terlahir subjek-subjek didik warga negara yang merdeka? Tulisan ini hanya akan menyajikan catatan makro yang masih perlu dipertajam, diperdalam, dan diturunkan ke dalam item-item kegiatan operasional yang mampu menysar problem-problem aktual pendidikan kita. Catatan simptomatik berikut bisa menjadi indikator bagi reformulasi pedagogi yang memerdekakan di masa depan.

**Pertama**, pedagogi neoliberal telah menjinakkan subjek didik warga negara tenggelam dalam praktik ‘budaya bisu’, bungkam, tidak artikulatif, tidak berani ambil risiko (*taking risks*), dan tidak otoritatif. **Kedua**, pedagogi neoliberal telah memproduksi dan mereproduksi subjek-subjek didik warga negara yang menghidupi hasrat partikularitas-individual yang terlemahkan daya imajinasinya. **Ketiga**, pedagogi neoliberal telah mencetak subjek-subjek didik warga negara yang ‘dungu’, ‘masa bodoh’, terhadap genealogi diri (*genealogy of the self*) dan keterikatan orientasi hubungannya dengan ‘liyan’ dalam hidup bersama. **Keempat**, neoliberal telah membiakkan subjek-subjek didik warga negara yang alam pikir dan praktik



hidupnya ‘tidak melek’ terhadap perkara-perkara kepublikan atau kewargaan (*civic illiteracy*).<sup>30</sup>

Simptom-simptom itu bisa menjadi titik tolak kita mereformulasikan ‘pedagogi yang memerdekakan’ atau bisa juga kita sebut sebagai ‘pedagogi publik kritis’. Prakarsa bisa bermula dari: **pertama**, mengkonseptualisasikan pedagogi sebagai proses pelibatan yang setara antara guru dan subjek didik dalam pembelajaran; **kedua**, proses pelibatan diletakkan pada cara pandang humanistik tentang nilai dan kemartabatan manusia; dan **ketiga**, “*act of knowing*” yang bisa melahirkan seluruh proses pelibatan itu perlu dipahami hakikatnya sebagai pertukaran (visi dan afeksi) antarmanusia, ketimbang pertukaran finansial.<sup>31</sup>

Sebagai catatan penutup, izinkan saya menyajikan ungkapan Shore (1992) tentang ‘*Empowering Education*’ untuk meneguhkan prakarsa reformulasi pedagogi yang memerdekakan dalam

- 
30. Paulo Freire. 2014. *Pedagogy of The Oppressed*. Translated by Myra Bergman Ramos with an Introduction by Donaldo Macedo. New York: Bloomsbury Academic; Henry A Giroux. “Neoliberal Dis-Imagination, Manufactured Ignorance, and Civic Illiteracy” dalam *Simon Dawes & Marc Lenormand, Op. Cit.*; Wilonoyudho, S. 2012. “Pendidikan yang Membebaskan”. *Kompas*, 2 Juli 2012, dilihat 20 Juli 2020. <https://edukasi.kompas.com/read/2012/07/02/09463238/Pendidikan.yang.Membebasan?page=all>; Heru Nugroho, Arie Sujito, AB. Widyanta, dan G. Ragil Wibawanto. 2019. “Membongkar Delusi Subyek-Subyek Algoritmik Dalam Masyarakat Digital: Prospek Emansipasi, Keadilan, dan Inklusi Sosial dalam “Ruang Kecepatan”” dalam *Buku Pidato Dies Natalis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada ke-64*, 28 November 2019.
31. Stephen Cowden (ed.), Gurnam Singh (ed.). 2013. *Acts of knowing : critical pedagogy in, against and beyond the university*. Bloomsbury.



kutipan berikut: “pedagogi kritis-demokratis bagi diri maupun perubahan sosial adalah program pedagogi yang berpusat pada subjek didik bagi demokrasi multikultural di sekolah maupun masyarakat. Pendekatannya tertuju pada perkembangan individu sebagai proses yang bersifat aktif, kooperatif, dan sosial karena antara diri dan masyarakat saling membentuk dan menciptakan satu sama lain. Tujuan pedagogi kritis-demokratis ini adalah menghubungkan pertumbuhan personal dalam kehidupan publik melalui pengembangan keterampilan yang pугuh, pengetahuan akademik, kebiasaan meneliti, dan rasa keingintahuan yang besar terhadap masyarakat, kekuasaan, ketimpangan, dan perubahan.<sup>32</sup>

Bila ‘mendidik anak adalah mendidik rakyat’<sup>33</sup> maka ‘pedagogi (publik) kritis’ adalah pedagogi pemerdekaan bagi subjek didik warga negara yang mensyaratkan ruang-ruang belajar yang selalu terbuka pada ajang perjumpaan masyarakat-plural untuk saling memahami dalam kesetaraan, keadilan, dan penghormatan. Persis pada silang budaya ras manusia dalam semesta ciptaan yang majemuk itulah ‘manusia merdeka’—yaitu manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri—akan ditentukan proses pembentukannya.<sup>34</sup> []

- 
32. Ira Shore & Paulo Freire. 2001. *Menjadi Guru Merdeka; Petikan Pengalaman*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara; Jeffrey Michael, Reyes Duncan-Andrade, Ernest Morrell. 2008. *The Art of Critical Pedagogy: Possibilities for Moving from Theory to Practice in Urban Schools* (hlm. 29). New York: Peter Lang, 2008.
33. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. 1977. *Karya Ki Hajar Dewantara, Bagian Pertama: Pendidikan* (hlm. 3). Yogyakarta: Tamansiswa.
34. *Ibid.*



## Profil Penulis

AB. Widyanta adalah staf pengajar di Departemen Sosiologi, Fisipol, Universitas Gadjah Mada. Saat ini tengah merampungkan naskah disertasi bertajuk “Diskursus Politik NGO di Indonesia dalam Era Demokratisasi dan Liberalisasi” untuk program doktoral pada Departemen Sosiologi, Fisipol, UGM. Minat risetnya berkaitan dengan isu-isu NGOs, gerakan sosial dan lingkungan, advokasi *disaster risk reduction*, dan kajian kritis atas pembangunanisme. Dalam 4 tahun terakhir, selain terlibat dalam kerja-kerja penelitian pada Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, ia juga berkegiatan dalam gerakan *Critical Pedagogy for Future Indonesia (CPI)*.





# Reaktualisasi Konsep Ki Hadjar Dewantara, Jawaban bagi Dunia Pendidikan<sup>1</sup>

*Ubaidillah Fatawi<sup>2</sup>*

## Pendahuluan

**D**iah Widuretno sudah 10 tahun mendampingi anak-anak Wintaos, Panggang, Gunung Kidul untuk meningkatkan

- 
1. Tulisan ini dikontribusikan untuk perhelatan gagasan “Pendidikan yang Membebaskan: Membalik Paradigma Pendidikan Urban” dalam Webinar Sesi 3 Kongres Kebudayaan Desa (KKD), melalui Call for Papers.
  2. Fasilitator SMA Eksperimental Sanggar Anak Alam.

taraf hidup mereka. Setiap akhir pekan, Diah menempuh jarak 30 km untuk mengajak anak-anak belajar bersama; bimbingan belajar, bertani, hingga merencanakan hidup. Anak-anak yang biasanya setamat bangku SMP diminta orang tua untuk memilih menikah atau bekerja, oleh Diah diajak untuk mempertinggi pendidikannya dan memikirkan desanya. Harapannya, anak-anak yang berpendidikan tinggi ini mau kembali ke desa dan mengembangkan potensinya. Sayangnya, tak satu pun anak-anak dari angkatan pertama asuhannya ini kembali. Mereka memilih pindah ke kota dan meninggalkan desa. Anak-anak yang dibesarkan dan disekolahkan oleh petani, justru pada akhirnya memilih menjadi buruh urban. Meninggalkan desa bersama orang-orang yang telah tua<sup>3</sup>.

Kasus berbeda tetapi dengan kegelisahan serupa juga nampak di kampung halaman saya, di pinggiran Salatiga. Tak banyak pemuda yang hijrah ke kota. Para pemuda di sana tetap tinggal di kampung, akan tetapi tetap mencari penghidupan di kota. Desa hanya menjadi tempat tinggal, sedang untuk bekerja mereka merasa harus ke kota. Tak ada pemuda yang bekerja di desa, hanya para lansia yang mencari nafkah dan menetap di sana; menanam pisang, merawat ayam, atau berdagang jajanan pasar. Tak ada pula yang mengajari pemuda bertahan hidup dari sumber daya yang dimiliki oleh desa. Pekerjaan yang ditawarkan oleh akses sekolah mereka dulu adalah pekerjaan yang bias kota; buruh pabrik, pegawai bank, hingga usaha kecil-kecilan.

---

3. Diah Widuretno. 2020. *Gesang di Lahan Gersang*. Yogyakarta: -----.



Ironi ini tak bisa dilepaskan dari geliat perjalanan sistem pendidikan kita. Entah disengaja atau tidak, pada akhirnya ia malah mencabut akar, alih-alih memberdayakan. Negara yang terseret arus globalisasi dan ekonomi liberal pada akhirnya ikut menyeret sistem pendidikan beserta manusia-manusianya ke dalam arus ideologi yang sama.

Berangkat dari latar belakang tersebut, tulisan ini mencoba melihat kilas balik perjalanan arah pendidikan Indonesia, mulai dari zaman kolonial hingga kemerdekaan. Bagaimana pendidikan menjauhkan manusia Indonesia dari desa? Artikel ini juga disertai sedikit upaya reflektif untuk melihat kembali ajaran Ki Hadjar Dewantara dan memberikan pertimbangan kemungkinan praktik pendidikan pembebasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.

## **Orde Baru dan Politik Pendidikan Urban**

Bergesernya rezim turut memengaruhi pergeseran ideologi. Soekarno yang menentang habis-habisan praktik kapitalisme global, akhirnya digantikan Soeharto yang cukup lunak menghadapi tekanan kapitalisme global<sup>4</sup>. Dengan dibukanya keran industri maka kebutuhan pekerja (murah) juga semakin tinggi. Indonesia yang baru saja merdeka, tentu belum siap memenuhi stok pekerja industri ini. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia adalah petani.

---

4. Hasyim Wahid. 1999. *Tikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.



Akhirnya, sekolah sebagai lembaga pendidikan diatur sedemikian rupa supaya adaptif terhadap kebutuhan pasar.

Kita terus-menerus melakukan pergantian kurikulum. Akan tetapi, tidak ada perubahan apa-apa yang berarti. Hal tersebut dikarenakan watak ‘menciptakan kelas kerani’ yang dimulai sejak zaman kolonial tak pernah hilang. Malah diperparah dengan dukungan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada Industri. Baru-baru ini, Menko PMK Muhajir Effendy menyebut bahwa kampus di Indonesia banyak yang tidak cocok dengan industri. Untuk itu, pendidikan tinggi harus mengatur langkah misalnya dengan menambah kuantitas pendidik dan peserta didik dari jurusan sains. Hal itu disebabkan dunia industri membutuhkan pekerja-pekerja dari bidang tersebut<sup>5</sup>. Cara berpikir semacam ini semakin memperjelas kecenderungan pengambil kebijakan pendidikan kita. Narasi yang dikembangkan seolah-olah menekankan bahwa pekerjaan yang berarti ada di sektor industri. Tidak peduli model pendidikan demikian dapat membantu subjek didik menjawab kebutuhan di sekitarnya atau tidak.

Pendidikan memang selalu punya keterkaitan dengan kepentingan penguasa. Dulu, ketika penjajah masih berkuasa, mereka membuka sekolah untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan. Ki Hadjar Dewantara menjadikan hal ini sebagai pijakan

---

5. Reporter. 2020. “MENKO PMK sebut prodi di kampus tak sesuai kebutuhan industri”. *CNN Indonesia*, 4 Juli 2020, dilihat 18 Juli 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200704152119-20-520839/menko-pmk-sebut-prodi-di-kampus-tak-sesuai-kebutuhan-industri>.

untuk memulai Taman Siswa. Ia menyebutkan pula, *pengajaran yang diberikan oleh pemerintah kolonial hanya diperuntukkan supaya kita menjadi 'buruh' karena memiliki 'ijazah', tidak untuk isi pendidikannya dan mencari pengetahuan guna kemajuan jiwa-raga*<sup>6</sup>. Maka ketika penjajah pergi dimulailah perumusan arah pendidikan kita.

Menurut Abdurrahman Wahid dalam pengantarnya di buku *Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan* karya Paulo Freire, awalnya arah pendidikan nasional dirumuskan sebagai 'penanaman semangat kemerdekaan' yang merupakan respons atas arah pendidikan sebelumnya yang hanya menciptakan pekerja murah. Namun ternyata, semangat kemerdekaan saja tidak cukup. Semangat kemerdekaan dianggap tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang masif. Bertepatan dengan bergantinya pemerintahan, dirumuskanlah arah baru untuk menjawab kebutuhan itu.

Arah pendidikan lalu dirumuskan sebagai 'melayani kebutuhan pembangunan nasional'<sup>7</sup>. Akhirnya, profesi teknik, sains, dan pegawai menjadi laku keras. Profesi itu dianggap paling dibutuhkan dalam pembangunan nasional. Secara sepiantas, terlihat peningkatan di bidang ekonomi. Meskipun sebenarnya hal tersebut juga bisa dianggap sebagai pemiskinan. Desa pun ikut merasakan dampaknya. Sebab tidak hanya mengambil tenaga kerja murah dari sana, desa juga menjadi tempat strategis untuk mendapatkan bahan mentah

---

6. Darsiti Soeratman. 1985. *Ki Hadjar Dewantara* (hlm. 103-104). Jakarta : Kementerian Pendidikan.

7. Pengantar Abdurrahman Wahid dalam buku Paulo Freire. 1985. *Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan*. Jakarta: Gramedia.



bagi industri ekstraktif yang kebanyakan hasilnya diekspor ke mancanegara.

Pada akhirnya, pendidikan kehilangan relevansinya dengan kebutuhan sekitar. Pendidikan hanya menjadi lembaga pemberi status sosial. Dengan segala atributnya, ia telah menjadi produsen kelas sosial baru: kaum terdidik. Dalam sebuah artikel berjudul “Corona, Desa, dan Negara”, Puthut EA mendeskripsikan fenomena ini sebagai “orang-orang terbaiknya dicabut untuk ikut menggerakkan roda ekonomi kota lewat proses sekolah”<sup>8</sup>.

## Pendidikan yang Membelenggu

Kontrol negara atas pendidikan dilakukan dari hulu sampai hilir, dari tujuan hingga praktik keseharian, dari cara berpikir hingga pakaian. Salah satu indikator kontrol bisa dilihat dari ketentuan pemakaian seragam. Seragam di berbagai jenjang sekolah adalah wujud pengekan atau normalisasi (merujuk pada Normalisasi Kehidupan Kampus tahun 1978) yang dilakukan pada tingkat TK sampai pendidikan sekolah menengah oleh pemerintah, melalui SK No. 052/C/kep/D/1982 tentang pakaian seragam sekolah<sup>9</sup>. Dalam SK tersebut juga dicantumkan langkah-langkah memperlakukan seragam sekolah secara hormat, seperti menjaga selalu bersih, rapi, tidak kusut, tidak dibiarkan robek atau lepas jahitannya, dan sesuai

8. Puthut EA. 2020. *Corona, Desa, dan Negara*. Yogyakarta: Terbit daring di Mojok.co.

9. Ed. Nugroho. 2010. *BIKIN JALAN SAMBIL BERJALAN: Perbincangan Setelah 30 Tahun Bergerak dalam Isu Anak*. Yogyakarta: Save The Children.

fungsinya seragam untuk upacara berbeda dengan seragam untuk harian. Langkah-langkah penghormatan semacam ini sesungguhnya adalah satu metode bagaimana memperlakukan tubuh dan dengan demikian menjadi tubuh yang lunak, tubuh yang bisa diperintah<sup>10</sup>.

Selain itu, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah hanya berkuat pada metode. Ia hanya berubah dari yang tadinya luring menjadi daring, dari yang tadinya satu arah menjadi dua arah. Sayangnya, transformasi pendidikan tidak bisa sekadar mempertanyakan metode atau teknik. Lebih dari itu, pendidikan harus menjadi jembatan penghubung antara pengetahuan dan masyarakat<sup>11</sup>. Freire, salah seorang pemikir pendidikan asal Brazil, menjadikan pengalaman pahit semasa kecilnya sebagai refleksi kritis. Lahir dari keluarga yang miskin, para gurunya hanya bercerita tentang realitas-realitas di luar lingkungannya. Seolah-olah sesuatu itu tidak bergerak, statis, terpisah satu sama lain, dan dapat diramalkan. Akhirnya, para guru mengisi proses pembelajaran dengan bahan yang dituturkan, padahal hal itu belum tentu berhubungan dengan realitas yang dialami para murid. Murid diarahkan secara mekanis untuk menghafal apa-apa yang telah diceritakan oleh guru. Pendidikan, dengan demikian, menjadi kegiatan “menabung”. Ketika dewasa Freire menamai aktivitas ini dengan pendidikan gaya ‘Bank’<sup>12</sup>.

---

10. Ibid

11. Paulo Freire & Ira Shor. 2000. *Pendidikan Kaum Tertindas* (hlm. 53-54). Jakarta: LP3ES.

12. Lies Marcoes dkk.. 2004. *Pokok-Pokok Pikiran Dr. Mansour Fakih: Refleksi Kawan Seperjuangan*. Yogyakarta: SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel)



Situasi ketidakadilan dan ketertindasan, dominasi budaya dominan, budaya bisu, juga metode pendidikan monologis merupakan wajah pendidikan kita; sesuatu yang dengan mudah bisa kita temui dalam keseharian pendidikan. Oleh Ki Hadjar Dewantara gejala ini sudah dibaca jauh hari ketika pendidikan Belanda masih bercokol di Indonesia. Ia pun merumuskan antitesisnya dengan tumpuan kemanusiaan melalui Sistem Among dan Tri Pusat Pendidikan.

## **Reaktualisasi Konsep Ki Hadjar Dewantara sebagai Jawaban**

Menyodorkan konsep Ki Hadjar dewantara sebagai jawaban atas keruwetan pendidikan ini bukan soal romantisisme masa lalu belaka. Bukan pula karena Ia orang Indonesia, lantas sebaiknya kita menggunakan gagasannya. Penulis menawarkan gagasan Ki Hadjar Dewantara karena memang konsep dan pikirannya adalah hasil pergulatannya belajar pendidikan di barat dan kultur masyarakat Indonesia, dengan demikian sangat kontekstual. Inilah yang membedakan Paulo Freire dan Ki Hadjar, meski sama-sama berangkat dari analisis atas dunia ketiga yang terjajah, tetapi keduanya berada dalam lingkungan budaya yang berbeda.

Ki Hadjar menawarkan dua alat: Among dan Tri Pusat Pendidikan. Kedua sistem ini berangkat dari penindasan yang terjadi di dunia pendidikan, yakni relasi yang menindas dan pendidikan yang tercerabut dari akar. Dalam relasi yang menindas, murid hanya

dicekoki dan dibentuk menurut keinginan gurunya. Atas kondisi ini, Ki Hadjar menawarkan konsep Among.

Dalam sistem Among, pembelajaran berarti mendidik anak agar menjadi manusia yang *merdeka batinnya*, *merdeka pikirannya*, dan *merdeka tenaganya*. Guru tidak hanya memberikan pengetahuan yang perlu dan baik saja, tetapi juga harus mendidik murid agar dapat *mencari sendiri pengetahuan* itu dan memakainya guna amal keperluan umum<sup>13</sup>. Dalam praktik yang lebih modern, sistem Among yang dimaksudkan oleh Ki Hadjar Dewantara sangat erat dan dekat kaitannya dengan sistem fasilitasi. Dalam sistem ini, murid ditempatkan tidak saja menjadi ember penampungan informasi dari guru, tetapi juga memiliki kemandirian untuk mencari dan mengungkapkan pengetahuannya. Sementara tugas guru adalah mendampingi dan mengarahkannya. Sehingga anak menjadi pribadi yang mandiri, yang merdeka jiwa raganya. Ki Hadjar Dewantara sendiri membedakan kemerdekaan atau kemandirian menjadi: berdiri sendiri (*zelfstandig*), tidak tergantung kepada orang lain (*onafhankelijk*), dan dapat mengatur dirinya sendiri (*vrijheid, zelfbeschikking*)<sup>14</sup>. Sikap merdeka ini bisa menjadi parameter yang bisa digunakan untuk mengukur praktik pendidikan kita selama ini.

Kemandirian adalah satu sikap hidup yang harus dan terus-menerus dibentuk sejak dini. Hal ini beriringan dengan memupuk sensitivitas dan kepekaan atas situasi sekitar. Sekolah sebagai

---

13. Ki Hadjar Dewantara. 1977. *Piagam Dan Peraturan Besar Persatuan Taman Siswa* (hlm. 27). (Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa).

14. Ibid.



lembaga pendidikan sudah lama berdiri bagai menara gading. Ia telah dibentuk sedemikian rupa untuk jauh dari realitas sekitar; abai terhadap persoalan daerah, tetapi malah melilih untuk menghafal angka, tanggal, hingga nama ilmiah binatang, yang belum tentu berguna bagi kehidupannya kelak. Bahkan bangunan sekolah selalu dipagari dengan besi atau semen sehingga menghalau siapa pun untuk masuk ke dalam, termasuk orang tua. Orang tua hanya bisa mengantarkan sampai luar pagar sekolah. Seakan-akan setiap pagi mereka memasukkan anaknya ke dalam kandang untuk dilatih supaya terlihat cerdas.

Sekolah akhirnya menjadi entitas yang berdiri sendiri di satu daerah. Begitu pula yang terjadi di desa. Sekolah berada di desa, tetapi tak pernah belajar dari desa. Ia justru mengimpor pengetahuan dan standar hidup dari luar yang rata-rata bias kota. Maka sebagai sebuah upaya pembebasan perlu diciptakan satu ekosistem pendidikan yang tak menjauhkan subjek didik dari lingkungan dan kultur sekitarnya.

Sekolah dengan pagar-pagar tinggi hendaknya dirobohkan dan diganti dengan jembatan-jembatan yang menghubungkannya dengan konteks sekitar. Sekolah tidak cuma antara guru dan murid, tetapi juga guru, murid, orang tua, dan lingkungan. Seperti halnya Ki Hadjar Dewantara tuliskan, “Perlulah anak-anak, kita, dekatkan hidupnya dengan perikehidupan rakyat agar mereka tidak hanya dapat ‘pengetahuan’ saja tentang hidup rakyatnya, namun juga dapat ‘mengalami’ sendiri dan kemudian tidak hidup berpisah

dengan rakyatnya”<sup>15</sup>. Dengan begitu, pendidikan tidak membuat orang pergi meninggalkan identitas desanya. Justru memperkuat dan mengembangkannya.

Gagasan Ki Hadjar Dewantara untuk menjembatani sekolah dengan realitas sekitar adalah konsep Tri Pusat Pendidikan. Tri Pusat Pendidikan merupakan satu ekosistem belajar yang terdiri dari keluarga, sekolah, dan pergerakan pemuda (organisasi). Keluarga menjalankan fungsi sebagai pendidik budi pekerti dan sosial, sekolah melatih kecerdasan pengetahuan, dan organisasi membantu anak mengasah karakternya. Ini dinamakan Tri Pusat Pendidikan<sup>16</sup>.

Diantara ketiganya, sekolah berfungsi sebagai titik pusat dari ketiga pusat tersebut. Ia menjadi perantara antara keluarga dan anak-anaknya dengan masyarakat. Pada hakikatnya, Ki Hadjar Dewantara mengutamakan ‘hak diri’ dan ‘tertib damai’ pada anak. Artinya, tiap-tiap anak harus mendapat kemerdekaan yang seluas-luasnya, dengan syarat tidak merugikan tertib damainya masyarakat. Kepentingan masyarakat ini harus diletakkan di atas kepentingan diri sendiri<sup>17</sup>. Organisasi sebagai salah satu pilar dari Tri Pusat Pendidikan memainkan peran yang vital bagi anak. Pada zaman Ki Hadjar, organisasi adalah alat untuk mengorganisasi rakyat.

---

15. Sebagaimana disampaikan Ki Hadjar Dewantara dalam Pidato Penerimaan Gelar Doktor Honoris Causa (HC) dari UGM tahun 1956 yang dimuat dalam *Masalah Kebudayaan* (1964)

16. Darsiti Soeratman. 1985. *Ki Hadjar Dewantara*. Jakarta: Kementerian Pendidikan

17. Idem



Itu artinya melalui organisasilah seorang anak dapat berhubungan dengan realitas masyarakat sekitarnya.

## **Belajar dari Sanggar Anak Alam**

Mustahil mengharapkan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan revolusi pendidikan. Lagi pula terlalu banyak yang harus dikorbankan untuk melakukannya: industri seragam, percetakan, hingga guru-guru tua yang selama puluhan tahun dididik dan mendidik dengan kultur 'kolonial'. Akan tetapi, perubahan dapat dimulai dari bawah meskipun dengan langkah kecil.

Di pinggiran kota Jogja, terdapat satu sekolah nonformal bernama Sanggar Anak Alam (KB-SMA) yang sudah 20 tahun bereksperimen dengan sistem sekolah yang melibatkan orang tua dan masyarakat sekitar. Sekolah yang tidak menggunakan mata pelajaran ini menjadikan riset sebagai penggantinya. Dengan riset, anak diberi kebebasan untuk menentukan minat belajarnya. Orang tua pun dilibatkan dalam proses pemilihan ini. Setiap bulan anak-anak mengadakan *Home Visit*. Tidak sekadar berkunjung, mereka juga belajar dari orang tua salah satu anak. Orang tua bergiliran menjadi guru/fasilitator bagi para peserta didik. Sehingga setiap orang adalah guru. Begitu pula dengan masyarakat sekitar. Setiap semester anak-anak mengadakan pesta seni. Setiap dua tahun sekali, mereka mengadakan ritual pesta panen wiwitan. Pesta panen wiwitan merupakan satu tradisi sedekah bumi yang diselenggarakan secara kolaboratif antara anak-anak sekolah dengan masyarakat sekitar.



Tidak ada penjejalan pengetahuan yang terus-menerus dilakukan oleh guru. Anak-anak merekonstruksi sendiri pengetahuannya melalui riset yang mereka lakukan. Mereka dilatih untuk bertanya sekaligus merespons permasalahan lingkungan sekitarnya. Kemandirian berpikir dibangun sejak dini, misalnya dengan menentukan pelajaran yang akan dipelajarinya selama satu semester ke depan.<sup>18</sup>

Pada akhirnya, kita tidak bisa menggunakan perspektif pertentangan kelas seperti cara komunisme bekerja dengan gagasan revolusinya. Ketika kita bersikap menentang negara, yang ada malah pemukulan balik oleh kekuasaan. Jika tujuan kita adalah melakukan pemberdayaan desa maka lakukan pendekatan kultural. Syukur-syukur terjadi kolaborasi kritis.

## Kesimpulan

Pendidikan yang hanya memperpanjang rantai pengisapan kapitalisme atas rakyat dan harus diakhiri. Pendidikan dengan kesantunan lingkungan sekitar harus segera dimulai. Pendidikan tak melulu diarahkan untuk menciptakan pekerja murah. Ia juga perlu diarahkan untuk menghasilkan petani yang mandiri, usahawan kecil yang berswadaya, dan pengrajin yang dapat bersaing.

Konsep-konsep Ki Hadjar Dewantara bisa dijadikan tawaran pegangan. Sistem *Among* sebagai bentuk relasi yang sehat antara guru dan murid, serta *Tri Pusat Pendidikan* sebagai upaya menjembatani

18. Toto Rahardjo. 2018. *Sekolah Biasa Saja*. Yogyakarta: Insistpress.



antara sekolah, keluarga, anak-anak, dan masyarakat sekitar. Dengan begitu, harapannya anak-anak yang disekolahkan oleh petani dapat menjadi orang yang berdaya dan dihidupi atau menghidupi desa, alih-alih meninggalkan kampung untuk jadi tenaga kerja murah (baik di luar maupun dalam negeri).[]

## **Profil penulis**

Ubaidillah Fatawi dilahirkan di desa Gedangan, Semarang. Fasilitator SMA Eksperimental Sanggar Anak Alam (SALAM). Ubaidillah pernah aktif di Gusdurian dan PMII Sleman.





# **Menilik Pendidikan Kritis di dalam Pendidikan Agroekologi: Proses Pembelajaran dari Pesantren Agroekologi di Kaki Gunung Halimun Utara**

*Bunga Pertiwi Tontowi Puteri*

## **Pendahuluan**

**P**endidikan Indonesia yang sentralis dan seragam menghasilkan berbagai dampak negatif terhadap perkembangan sumber daya manusia di Indonesia khususnya daerah perdesaan. Pendidikan

Indonesia terutama pendidikan formal cenderung menjauhkan peserta didik terhadap realitas sebenarnya dari lingkungan sekitar mereka sehingga menyebabkan peserta didik kehilangan kemampuan kritis melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kehidupan mereka sendiri. Salah satunya adalah kerusakan ekologis yang dialami perdesaan. Pendidikan Indonesia memiliki andil berlangsungnya kerusakan ekologis ini. Utina menjelaskan bahwa pendidikan Indonesia tidak mampu menumbuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dalam memahami dan mengelola lingkungan mereka dan cara pandangan yang berjarak terhadap alam dalam proses pembelajaran menghasilkan generasi yang tidak lagi memiliki karakter dan kecerdasan ekologis.

Pendidikan agroekologi merupakan sebuah pendidikan yang hadir untuk membangun sebuah kesadaran terhadap lingkungan yang tidak mampu dibangun oleh pendidikan konvensional. Agroekologi sendiri merupakan sebuah paradigma dalam agrikultur yang lahir dari kritik terhadap paradigma agrikultur modern–modernisasi ekologi–dan teori modernisasi. Pendekatan agroekologi mengkaji pertanian berkelanjutan yang melayani tujuan ekologi dan sosial ekonomi petani skala kecil. Agroekologi memberikan perhatian pada semua aktor dalam sistem pangan dan berbagai sumber daya mereka, serta penggalian potensi dari itu semua untuk mengembalikan nutrisi pada lingkungan. Diskursus agroekologi berkembang menyentuh sistem pengetahuan masyarakat lokal, berkembang sampai pada sistem agropangan, kerawanan pangan, dan

cara mengatasinya: Aspek kunci dari agroekologi adalah diversifikasi sistem pertanian dan kedaulatan pangan, serta ekologi produksi dan ekologi politik. Kajian literatur menunjukkan bahwa terdapat tiga ranah kajian agroekologi, yaitu praktik pertanian, gerakan, dan pengembangan keilmuan yang memiliki bentuk sendiri.

Proses pembelajaran agroekologi inilah yang membentuk pendidikan agroekologi. Pendidikan agroekologi banyak diulas di perguruan tinggi luar negeri dan juga banyak diaplikasikan pada pendidikan orang dewasa yang dilakukan oleh kaum petani. Konsep agroekologi tidak hanya mengulas tentang praktek pertanian, tetapi konsep ini berkembang sampai dengan gerakan mewujudkan kedaulatan pangan dan praktik keilmuan yang memiliki prinsip-prinsip pembelajaran unik.

Pembelajaran dalam agroekologi menuntut aspek epistemologi tersendiri, yaitu penekanan pada pembelajaran transdisiplin, partisipatif dan transformatif. Kajian yang dilakukan oleh Francis dkk (2003) menunjukkan bahwa pembelajaran agroekologi menuntut pendekatan transdisiplin sehingga dapat melihat tidak hanya aspek fisik dalam pertanian, tetapi juga aspek sosial. Hal ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Mendez dkk (2013) yang menyatakan bahwa produksi keilmuan agroekologi perlu mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan sistem pengetahuan, seperti pengetahuan lokal dan pengalaman petani. Lebih jauh lagi, Mendez dkk menjelaskan bahwa produksi keilmuan agroekologi menekankan pada pendekatan partisipatif dari semua pemangku



kepentingan untuk memiliki peran yang aktif dalam proses penelitian. Sedangkan pendekatan transformatif menurut kajian yang dilakukan Rosset & Torres (2012) adalah mengenai produksi keilmuan agroekologi yang bertendensi kepada kelompok petani yang terpinggirkan, di mana produksi keilmuan agroekologi harus berupaya untuk melakukan transformasi menyeluruh dalam sistem agrikultur. Maka dari itu, pengembangan keilmuan agroekosistem juga harus berdialog kritis dengan pembangunan pedesaan (Mendes dkk, 2013).

Agroekologi dengan pendidikan kritis memiliki kedekatan, meskipun sejauh ini masih sedikit kajian yang mencoba mengulasnya secara mendalam. Konsep pendidikan kritis banyak mengacu pada pemikiran Paulo Freire. Bagi Freire, manusia yang memiliki kesadaran kritis adalah mereka yang memahami bahwa manusia dan dunia memiliki hubungan yang tidak terpisah, mampu memahami bahwa realitas merupakan sebuah proses dan dapat berubah, serta bersedia terlibat dalam pemecahan masalah-masalah di masyarakat. Freire dalam Pendidikan kritis memperkenalkan istilah *conscientisation*. Robert (1996) menjelaskan bahwa konsep kesadaran ini merupakan sebuah representasi dari gerakan-gerakan kesadaran menuju kesadaran kritis, yang kemudian banyak dikenal sebagai 3 tahap perkembangan kesadaran, yaitu kesadaran magis, naif, dan kritis.

Tulisan ini mencoba mengulas tentang proses pembelajaran agroekologi yang dilakukan oleh salah satu pesantren di Indonesia.

Tujuan dari tulisan ini adalah menilik bagaimana proses pembelajaran agroekologi yang dilakukan pesantren membangun kesadaran kritis para santri dan santriwatinya. Tulisan ini merupakan hasil telaah ulang penulis dari hasil penelitiannya yang dilakukan pada tahun 2018.

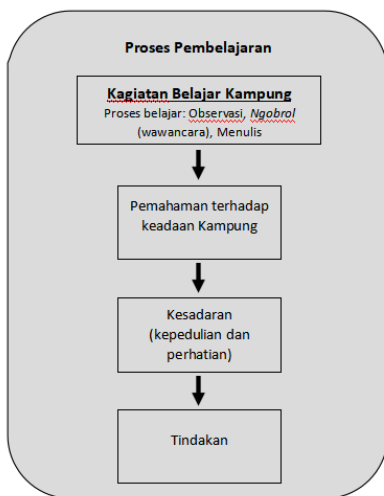
## **Pesantren Agroekologi**

Pesantren agroekologi yang terdapat di kaki Gunung Halimun, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor merupakan sebuah pesantren salafi. Para santri dan santriwati pesantren ini merupakan anak-anak dari lingkungan sekitar Kecamatan Cisarua, meskipun terdapat santri yang berasal dari luar kota, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Pesantren yang dibangun secara kolektif ini memiliki tujuan jangka panjang untuk: 1) mengembalikan masyarakat Halimun untuk bertani yang merupakan akar dari kehidupannya; 2) membangun sumber daya manusia setempat untuk dapat mengelola sumber daya alam di wilayahnya.

Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, kegiatan kunci yang berusaha diterapkan oleh pesantren, yaitu penggalian sejarah kampung dan membangun lingkaran belajar serta jejaring belajar. Penggalian sejarah kampung merupakan usaha pesantren untuk mendorong para santrinya memahami sejarah kampungnya sendiri. Kegiatan ini penting agar para santri dan santriwati tidak tercerabut dari akar kehidupannya dan menjadikan kampungnya sebagai bagian dari kehidupannya. Sedangkan lingkaran belajar adalah simpul-simpul



pembelajaran yang terbentuk dari masyarakat di desa-desa sekitar wilayah lereng gunung Halimun Utara yang memiliki perhatian kepada krisis sosial-ekologis yang dihadapi wilayah mereka. Adapun jejaring belajar adalah pihak luar mulai dari LSM, akademisi, maupun individu-individu yang ikut belajar bersama untuk perkembangan pesantren.



Sumber: Hasil Penelitian Penulis Tahun 2018

## Metode Pembelajaran di Pesantren Agroekologi

Pesantren memiliki beberapa proses pembelajaran, salah satunya adalah kegiatan Belajar Kampung. Melalui Belajar Kampung para santri dan santriwati didorong untuk memahami sejarah dan keadaan kampungnya sendiri. Dalam kegiatan ini, para santri dan

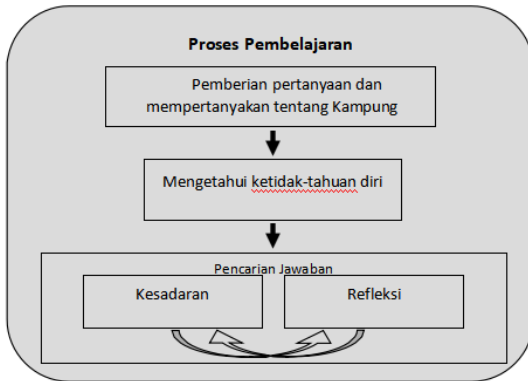
santriwati diminta untuk menggali kondisi fisik maupun sosial dari kampungnya hingga tingkat terkecil yaitu keluarga, melalui metode pembelajaran kritis yang menekankan pada pertanyaan “ada apa” dan “kenapa”.

Proses pembelajaran ini dimulai dengan observasi dan *ngobrol* bersama masyarakat sekitar. Informasi dari observasi dan *ngobrol* mereka diskusikan bersama, yang kemudian mereka uraikan kembali menjadi tulisan. Proses pembelajaran ini tidak hanya menggali masalah-masalah yang dihadapi kampung, tetapi juga berbagai wawasan dan kearifan lokal yang ada di kampung. Hasil dari Belajar Kampung menghasilkan beberapa tindakan solutif untuk permasalahan yang ada di kampung. Kemauan bertindak ini dihasilkan dari proses pembelajaran yang menimbulkan kesadaran pada para santri dan santriwati.

Proses pembelajaran selanjutnya adalah proses pembelajaran yang menekankan pada pertanyaan. Para pembina pesantren sering memberikan pertanyaan-pertanyaan pemicu kepada para santri dan santriwati tentang kampung dan keluarganya. Hal ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada para santri dan santriwati bahwa mereka sebenarnya tidak secara mendalam mengetahui tentang kampung, bahkan keluarga mereka sendiri. Mengetahui bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan terhadap hal terdekat mereka, memicu para santri dan santriwati untuk mencoba mencari tahu jawabannya. Keadaan tersebut kemudian membuat mereka merefleksikan pertanyaan dan jawaban yang ada dengan diri,



kehidupan, dan pengalaman mereka. Dalam refleksi ini mereka menemukan sebuah kesadaran-kesadaran tentang keadaan kampung mereka yang akan terus mereka refleksikan untuk menemukan kenyataan dan kesadaran baru.

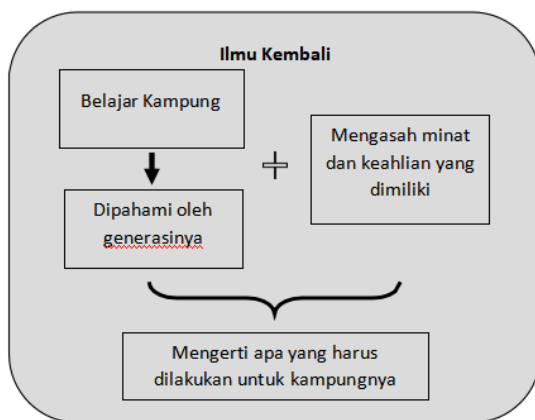


Sumber: Hasil Penelitian Penulis Tahun 2018

Proses pembelajaran yang terakhir adalah prinsip Ilmu Kembali. Prinsip Ilmu Kembali merupakan proses pembelajaran yang dibangun atas kritik terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah konvensional. Proses pembelajaran sekolah konvensional dinilai menyebabkan para siswa desa meninggalkan desa mereka karena ilmu yang mereka dapatkan tidak dapat diaplikasikan dan dikembangkan di desa.

Ilmu Kembali adalah prinsip pembelajaran yang mengharapkan bangunan ilmu yang menjadikan santri dan santriwati mampu

berkontribusi dan mengerti apa yang dapat mereka lakukan terhadap kampungnya dengan potensi yang mereka miliki. Terdapat dua hal dalam Ilmu Kembali yang diasah dari para santri dan santriwati, yaitu pemahaman tentang kampung halaman dan mengasah minat serta keahlian mereka khususnya pertanian, meskipun tidak menutup kemungkinan pada minat atau keahlian lainnya.



Sumber: Hasil Penelitian Penulis Tahun 2018

## Pendidikan Kritis dalam Pendidikan Agroekologi

Proses pembelajaran agroekologi tidak terlepas dari bentuk pendekatan disiplin ilmu agroekologi. Pendekatan ini menghasilkan sebuah metodologi penggalan pengetahuan yang dapat ditempatkan sebagai proses pembelajaran. Keilmuan agroekologi yang menekankan pendekatan transdisiplin berpengaruh terhadap proses pembelajaran



pesantren yang tidak hanya mengulas terkait bagaimana bertani secara eksakta, tetapi juga terkait dengan keilmuan sosial.

Proses pembelajaran pesantren dalam Belajar Kampung menunjukkan sebuah metode transdisiplin dalam menggali wawasan dan kondisi ekologi yang ada. Dalam pendekatan transdisipliner yang diusung oleh keilmuan agroekologi, pengetahuan lokal, atau kearifan lokal ditempatkan sebagai sebuah pengetahuan atau keilmuan yang harus diperhatikan. Selain itu, proses Belajar Kampung, Pembelajaran yang Menekankan pada Pertanyaan, dan Prinsip Ilmu Kembali dapat mendorong pembelajaran yang menghasilkan sebuah transformasi masyarakat perdesaan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh pesantren merupakan sebuah upaya transformasi generasi perdesaan agar lebih memahami kondisi wilayah mereka sendiri. Lewat proses pembelajaran ini juga diharapkan para generasi ini memiliki daya dan upaya untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kampung atau desanya.

Proses transformasi tersebut tidak terlepas dari proses pembelajaran pesantren yang bertumpu pada pembelajaran partisipatif dan *action oriented* yang sejalan dengan pendekatan partisipatif dalam kajian agroekologi. Seluruh proses pembelajaran melibatkan secara aktif dan partisipatif para santri dan santriwati untuk membangun pemahaman dan wawasan mereka sendiri. Para santri dan santriwati tidak hanya disuapi oleh sebuah materi, tetapi mereka ikut menggali berbagai materi yang ingin mereka kembangkan. Proses ini didukung dengan pembelajaran yang

berorientasi pada tindakan, di mana keilmuan berkembang bersama dengan pengalaman.

Proses pembelajaran pesantren yang sejalan dengan pembelajaran agroekologi ini menunjukkan bentuk-bentuk pendidikan kritis. Metode-metode pembelajaran yang dilakukan oleh pesantren menunjukkan kesamaan dengan metode hadap masalah pendidikan kritis yang ditawarkan oleh Paulo Freire. Mulai dari kegiatan observasi kampung, *ngobrol* bersama warga kampung, pemberian pemicu pertanyaan tentang kampung dan keluarga, dan prinsip ilmu kembali merupakan sebuah upaya untuk menghadapkan para santri dan santriwati terhadap berbagai masalah yang ada di sekitar mereka dan yang mereka hadapi, di mana sering kali tidak mereka sadari. Tujuan dari penghadapan ini adalah tidak hanya untuk menimbulkan pemahaman, tetapi juga respons tindakan terhadap masalah tersebut.

Proses timbulnya pemahaman yang kemudian membuahkan tindakan ini dalam pendidikan kritis sejalan dengan proses kesadaran. Pendidikan kritis melalui proses pembelajaran hadap masalah berupaya mengembangkan kesadaran siswa sampai dengan kesadaran kritis. Kesadaran kritis dapat dilihat dengan menggali pemahaman manusia tentang pengalaman sosial yang dia hadapi, alasan kausalitas mengapa hal tersebut terjadi, tindakan apa yang akan dilakukan, dan posisi penalaran moral (Robandi dkk, 2016). Proses pembelajaran yang dilakukan oleh pesantren juga menunjukkan upaya terhadap hal tersebut. Proses kesadaran para santri dan santriwati adalah



salah satu tahapan yang dituju, seperti kesadaran terhadap kondisi kampungnya, kesadaran ketidaktahuan dirinya, sampai pada kesadaran untuk bertindak demi kampungnya.

Tujuan akhir baik dari pendidikan agroekologi maupun pendidikan kritis adalah sebuah transformasi. Prinsip ilmu kembali merupakan sebuah bentuk transformasi yang coba diusahakan oleh pesantren agar kampung atau desa memiliki generasi yang memiliki perhatian, kepedulian, dan wawasan terhadap kampung atau desanya sehingga mampu menjadi agen transformasi bagi kampung dan desanya.

## **Kesimpulan**

Pendidikan agroekologi yang dijalankan oleh pesantren secara umum sejalan dengan konsep atau teori dari prinsip pembelajaran agroekologi yang berkembang secara akademis. Bahkan di beberapa hal proses pembelajaran di pesantren menunjukkan perkembangan yang lebih inovatif, meskipun tidak dimungkiri terdapat berbagai kekurangan. Hasil telaah di atas menunjukkan bahwa proses pembelajaran dari pesantren agroekologi di kaki gunung Halimun tidak hanya menunjukkan keselarasannya dengan kajian pembelajaran agroekologi, tetapi juga menunjukkan bentuk-bentuk pendidikan kritis. Hal ini karena penekanan dari ketiganya yang sama mengenai metode pembelajaran dan tujuan pembelajaran.

Proses pembelajaran pesantren agroekologi ini dapat dijadikan salah satu referensi proses pembelajaran “alternatif” untuk mengatasi masalah pembelajaran konvensional yang sentralis, seragam, dan bias kota, meskipun masih diperlukan berbagai perbaikan dan perkembangan. Proses pembelajaran yang menekankan pada pemahaman terhadap lingkungan hidupnya dan upaya untuk menumbuhkan kesadaran dapat menjadi proses transformasi generasi desa untuk mau dan mulai bergotong royong mengatasi masalah dan membangun desanya.[]

## **Profil Penulis**

Bunga Pertiwi Tontowi Puteri dilahirkan di Jember, 28 Agustus 1994. Alumnus Universitas Indonesia Jurusan Sosiologi. Saat ini sedang menempuh program magister di Universitas Indonesia jurusan Sosiologi dan bekerja sebagai Asisten Program di unit kajian Sosiologi (*LabSosio*) FISIP UI. Selain itu Bunga aktif membantu di *Research Cluster Rural Ecological Society LabSosio* Departemen Sosiologi FISIP UI.





# Pendidikan yang Membebaskan: Penguatan Nilai Dasar Pendidikan dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045<sup>1</sup>

*Agung Kresna Bayu<sup>2</sup>, Clara Dhisa Sumunaring Ratna<sup>3</sup>*

## Pendahuluan

Tidak diketahui secara pasti sejak kapan pembahasan, pengarusutamaan, pengkajian tentang pendidikan yang

1. Tulisan ini dikontribusikan untuk perhelatan gagasan “Pendidikan yang Membebaskan: Membalik Paradigma Pendidikan Urban” dalam Webinar Sesi 3 Kongres Kebudayaan Desa (KKD), melalui Call for Papers.
2. Alumnus Departemen Sosiologi, Fisipol, Universitas Gadjah Mada. Terlibat aktif di berbagai kegiatan penelitian dan kajian terkait demokrasi-pluralisme, pembangunan daerah, dan kebijakan publik. Tergabung dalam gerakan *Critical Pedagogy for Future Indonesia (CPI)*
3. Alumnus Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Saat ini menjadi guru sekolah dasar di Jogjakarta Montessori School

membebaskan di Indonesia. Namun, hal itu berkembang sejalan dengan dinamika kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya bangsa Indonesia. Artinya, perkembangan konsep pendidikan yang membebaskan berkelindan sesuai dengan konteks zamannya<sup>4</sup>. Selain itu, pendidikan yang membebaskan memiliki pengertian dan pemaknaan tergantung dari masing-masing perspektif untuk menilainya. Oleh sebab itu, tidak terdapat definisi tunggal terkait arti pendidikan yang membebaskan.

Pendidikan di Indonesia telah ada sejak masuknya agama-agama Hindu, Buddha, dan Islam ke Nusantara, tetapi pada waktu itu masih berorientasi pada upaya penyebaran ajaran agama-agama<sup>5</sup>. Orientasi itu berlaku sampai pada masa kedatangan bangsa Portugis dan Belanda, yaitu untuk menyebarkan agama Katolik dan Kristen Belanda, tetapi pada akhir abad 18—VOC—mengalami kemunduran dan pada waktu yang sama mulai berkembang pola pemikiran aufklarung di Eropa, di mana ditandai dengan tidak lagi memaksakan agama tertentu kepada peserta didik, tetapi membebaskan mereka untuk memilih agamanya<sup>6</sup>.

---

4. Lihat: Asrohah, Hanun. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu; Buchori, Mochtar. 2007. *Evolusi Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press dan; Djohan, Makmur; dkk. 1993. *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*. Jakarta: Direktorat Jederal Kebudayaan.

5. Hasbullah. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

6. Djumhur, 1979. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV Ilmu



Hal ini berpengaruh terhadap orientasi dan pola pendidikan di Indonesia meskipun tidak secara signifikan, sebab pihak pemerintah Belanda hanya membuka sekolah bagi kelas bangsawan saja. Namun, pada awal abad 20 terjadi perubahan dengan berkembangnya kebijakan politik etis. Hal ini membuat van Deventer mulai membuka sekolah bagi golongan kelas bawah berupa sekolah-sekolah desa yang berorientasi untuk memenuhi tenaga buruh, terdidik, dan murah, guna memenuhi kepentingan modal Belanda<sup>7</sup>.

Sejak itu, pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan hingga terjadinya krisis Malaise pada tahun 1930, di mana terjadi penurunan ekonomi di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Akibatnya, banyak sekolah-sekolah di desa tutup. Penutupan itu tidak berpengaruh terhadap jumlah murid dan malah bermunculan alternatif tempat belajar di luar sekolah bentukan pemerintah Belanda.

Tahun 1922 momen penting dalam perkembangan pendidikan Indonesia ketika Ki Hadjar Dewantara mendirikan Tamansiswa yang dilatarbelakangi oleh ketidakpuasaan terhadap sistem pendidikan Belanda dan mengembangkan sistem *among*. Ki Hadjar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilinginya, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat<sup>8</sup>. Ia juga menekankan bahwa proses pendidikan itu

7. Moestoko, Somarsono. 1986. *Sejarah Pendidikan dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Balai Pustaka

8. Dewantara, Ki Hadjar. 1961. *Pendidikan*. Yogyakarta: UST-Press.



melekat pada setiap anak sejak ia lahir dan tujuan dari pendidikan adalah *hamemayu hayuning manungso* atau memanusiaikan manusia<sup>9</sup>.

Periodisasi tersebut menjadi dasar awal untuk memahami soal pendidikan yang membebaskan di Indonesia, di mana pada masing-masing periodenya pendidikan menjadi bagian penting untuk mencapai tujuan tertentu dari kekuasaan yang berlaku. Artinya, pendidikan menjadi bagian dari strategi, teknik, taktik relasi kuasa dalam upaya mempertahankan kekuasaannya dan membentuk pengetahuan publik yang mendukung kepada kekuasaan tersebut. Posisi pendidikan itu tidak banyak mengalami perubahan pasca-Indonesia merdeka pada tahun 1945. Akan tetapi, periode ini menjadi penting bagi perkembangan pendidikan di Indonesia, sebab tujuan kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dirumuskan dalam dasar negara. Pendidikan menjadi bagian yang selalu berelasi dengan berbagai aspek kehidupan bangsa, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan paradigma pendidikan yang setara dan dapat berkolaborasi dengan berbagai hal itu?

Pemahaman terhadap konsep pendidikan yang membebaskan dapat dilakukan melalui beberapa langkah: *pertama*, merefleksikan kembali arti dan makna soal pendidikan; *kedua*, mengurai kembali arti dan makna tentang “membebaskan”; *ketiga*, membedah hubungan antara pendidikan dan membebaskan, artinya saat terdapat konsep pendidikan yang membebaskan berarti terdapat ketidakbebasan di

9. Wiryopranoto, S., dkk. 2017. *Perjuangan Ki Hadjar Dewantara : Dari Politik ke Pendidikan*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional



dalam pendidikan; *keempat*, melacak ketidakbebasan yang ada di dalam pendidikan.

## Mengurai Kembali Pendidikan yang Membebaskan

Pendidikan berasal dari bahasa latin yaitu *educare* dan *educere*<sup>10</sup>. *Educare* berarti *to train or to mold* atau berarti untuk penghidupan, sedangkan *educere* berarti *to lead out* atau untuk kehidupan. Dalam bahasa Inggris, pendidikan berasal dari kata *education* atau berarti sebuah proses fasilitasi pembelajaran yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kemampuan, dan nilai-nilai kepercayaan serta tingkah laku. Berdasarkan KBBI, pendidikan berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Berbagai pengertian tersebut menekankan adanya proses dan perubahan yang terjadi dalam pendidikan.

Penekanan ini berbeda dengan Ki Hadjar Dewantara dan Paulo Fraire yang menekankan adanya perjuangan dan pembebasan di

---

10. Bass, R. V. 1997. *The Purpose of Education*. The Educational Forum 61(2): 128–32

Bass, Randall V and J. W. Good. 2004. “Educare and Educere: Is a Balance Possible in the Educational System”. *The Educational Forum* 68: 161 – 168.

Craft, M. 1984. *Education for diversity*. In Education and cultural pluralism, ed. M. Craft, 5–26. London and Philadelphia: Falmer Press.

dalam proses pendidikan<sup>11</sup>. Henry Giroux mengartikan pendidikan sebagai wahana mengasah sikap kritis dan politis untuk menciptakan demokrasi sesungguhnya<sup>12</sup>. Hal ini menggambarkan bahwa pengertian dan pemaknaan terhadap pendidikan itu sendiri tergantung dari latar belakang dan situasi batin yang ada. Artinya, pendidikan memiliki beragam tujuan dan cara, tetapi harus terdapat fondasi bersama, yaitu adanya kesamaan nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini bukan berwujud tunggal dan solid melainkan terbentuk secara terus-menerus yang selaras dengan konteks zamannya, di mana menekankan imajinasi, rasa, praktik tentang hidup bersama.

Pemahaman tersebut sejalan dengan pandangan Mochtar Buchori, di mana dasar dari pendidikan adalah keluarga untuk menanamkan nilai-nilai dasar kemanusiaan, sekolah sebagai institusi berkewajiban meneruskan atau memperbaiki nilai dasar tersebut dengan menambahkan pengetahuan di dalamnya, dan masyarakat sebagai ruang praktik atas nilai-nilai tersebut. Selain itu, Driyarkara menggambarkan bahwa pendidikan merupakan proses ganda terjadinya perubahan dalam diri manusia yang harus menyatu dalam perubahan masyarakat serta budaya<sup>13</sup>. Ia mengembangkan konsep pendidikan hominisasi dan humanisasi, sebuah konsep pendidikan

---

11. Fraire, Paulo. 1985. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: PT Temprint.

12. Giroux, Henry. 2011. *On Critical Pedagogy*. London: The Continuum International Publishing Group.

13. Aziz A. 2016. "Konsep hominisasi dan humanisasi menurut Driyarkarya". *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*. Vol. XIII, No. 1.



yang humanis<sup>14</sup>. Berdasarkan ketiga tokoh tersebut, pendidikan dapat dimaknai sebagai proses edukatif bernuansa humanis yang melibatkan tiga lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Membebaskan sendiri berasal dari kata bebas yang berarti tidak tergantung atau lepas. Arti ini seiring dengan makna merdeka menurut Ki Hadjar Dewantara, yaitu tidak bergantung, melainkan bersandar pada kekuatan sendiri. Kita memahami bahwa orientasi pendidikan sejalan dengan kekuasaan yang berlaku pada masing-masing periodenya. Poin ini menegaskan bahwa terjadi dehumanisasi dalam proses pendidikan sehingga pendidikan yang membebaskan adalah upaya untuk keluar dari praktik-praktik dehumanisasi tersebut, sebab dasar dari pendidikan adalah tentang humanisasi dan emansipasi.

Namun persoalannya, pendidikan pada satu sisi terdiri dari berbagai elemen yang ada di dalamnya, tetapi pada sisi yang sama menjadi bagian dari berbagai aspek lain kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, saat pendidikan tidak memiliki fondasi kuat maka rentan ditunggangi oleh berbagai kepentingan. sehingga menyebabkan terjadinya depolitisasi, komodifikasi, dan purifikasi.

Hal ini penting menjadi refleksi kita bersama agar kita tidak terjebak dalam mengartikan pendidikan yang membebaskan. Sebab sebagian orang sering memahaminya sebatas pada bentuk dan praktik pendidikan yang secara tidak sadar terkadang justru

---

14. Sutrisno, Mudji. 2006. *Drijarkara: Filsuf yang Mengubah Indonesia*. Yogyakarta: Galang Press.

melanggengkan dehumanisasi yang terjadi di dalam pendidikan dengan wajah yang berbeda.

Tantangan selanjutnya, saat kita telah memahami dasar nilai dari pendidikan yang membebaskan adalah bagaimana mewujudkan nilai itu dalam konteks penduduk yang plural dengan berbagai latar identitas maupun kelas sosial. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak mudah menggenaralisasi pendidikan yang membebaskan dengan bentuk dan praktik tertentu. Saat kita telah memiliki imajinasi tentang martabat kemanusiaan dalam pendidikan otomatis berbagai bentuk dan praktiknya akan mengikuti dasar tersebut.

## **Fondasi dan Visi Pendidikan yang Membebaskan**

Berbagai konsep pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hadjar, Mochtar Buchori, Driyarkarya, Freire, Giroux menekankan pentingnya nilai kemanusiaan dalam proses pendidikan. Nilai kemanusiaan sendiri tidak memiliki nilai dan bentuk yang tunggal, di mana akan terus berproses sesuai konteks zamannya. Dalam bahasa Jawa, nilai kemanusiaan dapat dipahami sebagai “*nguwongke uwong*” yang berarti bagaimana kita memperlakukan, menghargai, dan menghormati orang lain seturut kodrat alam. Sehingga sekat nilai dalam beragama, suku, dan ras tidak berlaku dalam kemanusiaan yang universal. Oleh karena keuniversalan nilai tersebut terdapat perubahan yang dinamis sesuai konteks zaman.



Berbicara mengenai zaman yang selalu mengalami perubahan, pun dengan pendidikan sekarang ini yang banyak dipengaruhi oleh teknologi informasi. Sehingga akan selalu ada perubahan dalam dunia pendidikan seturut dengan aspek lain yang berikatan, sama dengan nilai kemanusiaan. Sehingga baik pendidikan maupun kemanusiaan tidaklah bersekat, tetapi berada dalam satu level untuk saling melengkapi. Sehingga, apabila fondasi pendidikan sudah terbentuk melalui kemanusiaan maka permasalahan pendidikan dan aspek terkait dalam bernegara dapat diselesaikan. Pendidikan merupakan dasar dan kunci pemecahan masalah yang bersifat multidimensi<sup>15</sup>. Oleh karena itu, penguatan akan fondasi dan nilai pendidikan menjadi modal pertama dalam arah berbangsa dan bernegara.

Pendidikan yang bernilai kemanusiaan akan memfasilitasi dan menuntun anak untuk memiliki rasa untuk menghargai orang lain sesuai dengan perubahan zaman. Hal ini dapat dimulai dari perubahan dalam ekosistem pendidikan dan melibatkan anggotanya. Ekosistem pendidikan yang termuat dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2015 terurai menjadi tujuh poin, diantaranya (1) sekolah yang kondusif, (2) guru sebagai penyemangat, (3) orang tua yang terlibat aktif, (4) masyarakat yang sangat peduli, (5) industri yang berperan penting, (6) organisasi yang berkontribusi besar, (7) pemerintah yang berperan optimal. Ekosistem pendidikan dapat

15. Magini, A. P. 2013. *Sejarah Pendekatan Montessori*. Yogyakarta : Kanisius.  
Trabalzini, P. 2003. *Maria Montessori, da Il Metodo a La Scoperta del Bambino*. Aracne.

tercermin dalam relasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menerapkannya dalam tata kelola pendidikan yang ada saat ini?

Perlu dipahami bersama bahwa pendidikan adalah proses edukatif yang dinamis dan melibatkan banyak pihak. Keterlibatan tersebut bersifat aktif dalam pembangunan tata kelola pendidikan di Indonesia sehingga diperlukan pembentukan visi pendidikan yang membebaskan. Visi merupakan upaya awal untuk mengakomodasi berbagai gagasan dan ide tentang pendidikan yang membebaskan. Fondasi yang kuat dengan visi mengembangkan pendidikan nasional akan mampu membawa perubahan dalam dunia pendidikan.

## **Mengeja Pendidikan yang Membebaskan pada 100 Tahun Indonesia Merdeka**

Terhitung 25 tahun lagi kita akan menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka. Terdapat berbagai harapan dan visi, salah satunya terkait dengan ekosistem pendidikan yang berlandaskan nilai humanisme dan emansipasi. Sebagian besar warga negara memiliki mimpi yang hampir sama bagi dunia pendidikan: bisa menyekolahkan anak tanpa harus berpikir biaya yang tinggi, anak mendapatkan *sangu urip* dari institusi pendidikan formal, dan harapan-harapan lainnya sejatinya masih menitikberatkan pendidikan pada institusi formal.

Hal tersebut tidaklah salah sebab UU No 20 tahun 2003 mendorong publik untuk memakani pendidikan sebagai usaha



sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Di masa pandemi, di mana semua tatanan hidup mengalami perubahan yang drastis, kita perlu merefleksikan kembali menyoal pendidikan yang berorientasi pada manusia merdeka. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya mengakomodasi berbagai elemen dalam ekosistem pendidikan.

Pendidikan sejatinya mampu memfasilitasi dan menuntun manusia dalam menemukan kemerdekaan dirinya. Kebebasan dan kemerdekaan tersebut bersifat berdiri sendiri, tidak tergantung kepada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Ini menjadi tantangan, sebab dalam kebebasan tersebut kita juga harus mengatur relasi dengan kemerdekaan orang lain. Dengan demikian, diperlukan kesatuan aksi dan persatuan atas nama kepentingan bersama yang diakui oleh semua golongan. Tidak ada rumus baku dalam proses pendidikan yang membebaskan. Akan tetapi, terdapat fondasi orientasi bagi kemerdekaan diri manusia. Oleh karenanya, penting dalam pendidikan untuk memberikan pemahaman tentang sejarah dan bahasa dalam proses dan perjuangannya.[]

## **Profil Penulis**

Agung Kresna Bayu dilahirkan di Malang, 6 Juni 1997. Alumnus Departemen Sosiologi, Fisipol, Universitas Gadjah Mada. Pernah terlibat di berbagai kegiatan penelitian dan kajian terkait demokrasi-pluralisme, pembangunan daerah, dan kebijakan publik dan tergabung dalam gerakan *Critical Pedagogy for Future Indonesia (CPI.)*

Clara Dhisa Sumunaring Ratna dilahirkan di Sleman, 14 April 1996. Alumnus Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Saat ini mengajar di Jogjakarta Montessori School.





# Epilog

**Kongres Kebudayaan Desa**

**Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A:  
Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa**

*Oleh:*

*Ryan Sugiarto*

*(Ketua Penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa,  
Ketua Yayasan Sanggar Inovasi Desa)*

## **Pengantar: Cerita dari Ruang Kendali dan Operasi**

**T**epat dua hari sebelum Idulfitri (24 Mei 2020), ruang Pusedalop (Pusat Data dan Operasi) Balai Desa Panggungharjo masih tampak riuh. Sejumlah anak muda mengoperasikan komputer, mengelola sistem informasi, dan menulis modul mitigasi Covid-19.

Ruangan ini merupakan tempat konsolidasi dan mitigasi Covid-19 Desa Panggungharjo. Dari ruangan ini pula beberapa langkah mitigasi klinis dan nonklinis (sosial, ekonomi, keamanan) Desa Panggungharjo disusun untuk memandu seluruh *stakeholder* desa bersama-sama melawan Covid-19.

Desa Panggungharjo melalui Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19) mengajarkan bagaimana desa tidak harus melakukan *lockdown* total, tetapi justru menjadi pemecah masalah Covid-19. Desa Panggungharjo dalam situasi darurat telah melakukan serangkaian pencegahan dengan aksi tanggap melalui identifikasi kondisi klinis harian warganya, baik secara fisik maupun psikologis. Desa Panggungharjo berinisiatif menghadirkan pelayanan dari negara untuk penanganan Covid-19 dengan mengedepankan penggunaan teknologi melalui dua platform utama yakni Platform Laporan dan Platform Dukung.

Selain mitigasi klinis, ekonomi, dan sosial, desa juga mentransformasikan dirinya sebagai representasi negara yang paling depan untuk mengorganisir segala sumber daya. Pemerintah desa aktif menggerakkan kemampuan kerelawanan warga mulai dari logistik hingga bantuan nonfisik. Warga juga didorong menjadi warga negara aktif untuk saling membantu sesama dengan prinsip *tanggung renteng*. Semua dilakukan berbasis data desa.

Dari sisi mitigasi ekonomi, *pasardesa.id* menjadi platform penting pengelolaan ekonomi di tengah pandemi dan sesudahnya. Pasar desa menjadi *market place*—toko barang-barang warga desa—



agar ekonomi terus berputar di desa, alih-alih lari ke luar desa. *Tagline* berbagi belanja menjadi napas lini ini.

Bagaimana dari sisi tata pemerintahan dan pengaturan hidup bersama warga? Kongres Kebudayaan Desa disusun sebagai panduan merevisi rencana pembangunan jangka menengah desa. Tepat dua hari sebelum lebaran, gagasan ini dilahirkan sebagai respons terhadap pandemi dan bagaimana hidup serta kehidupan warga desa kemudian dirumuskan. Selama 2 minggu awal, konsep dirumuskan, kerangka acuan kerja dituliskan, 18 tema sekaligus *term of reference* disusun, ide digelindingkan. Dan kita tahu gagasan ini menjadi gerakan bersama. Cukup banyak jejaring kemudian turut mengukung gagasan ini, membantu dalam implementasi, pewacanaan gagasan, hingga perumusan-perumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa. Pertanyaannya, kenapa Kongres Kebudayaan Desa?

## **Memahami Situasi di Tengah Pandemi**

Bangunan kebudayaan Indonesia bukanlah sesuatu yang terberi (*given*) begitu saja. Kebudayaan Indonesia adalah hasil interaksi historis pelbagai kebudayaan nusantara, mulai dari Melayu, Jawa, Bugis, Papua, Aceh, dan suku bangsa lain yang hidup dalam ruang kultural dan sosial kepulauan nusantara. Interaksi historis kebudayaan Indonesia itu adalah bukti sejarah kebudayaan kita yang dinamis. Interaksi jalin menjalin antarkebudayaan-kebudayaan nusantara menghasilkan rona kebudayaan yang plural sebagai kekayaan negara bangsa kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000



pulau di Indonesia yang terhubung melalui media laut, pelayaran, perdagangan, dan pertukaran-pertemuan antarkebudayaan sejak berabad-abad lalu. Jadi, generalisasi bahwa kebudayaan Indonesia adalah umum dan abadi perlu kita kaji ulang.

Perubahan kebudayaan menempatkan manusia menjadi ekosistem hidup yang sangat berkuasa dengan teknologi yang ia miliki: mengeksploitasi alam habis-habisan dengan kecenderungan besar merusaknya, alih-alih hidup berdampingan dengan alam dan memeliharanya. Dengan teknologi, manusia memproduksi barang yang tak diperlukan. Nilai barang pun ditentukan oleh kemasan. Sebagai contoh, air yang seharusnya dimiliki oleh publik berubah kepemilikannya di tangan korporasi yang memproduksi dan mengemasnya dalam botol-botol plastik. Pertambahan nilai inilah yang menyebabkan harga air menjadi jauh lebih mahal ketimbang nilai aslinya.

Rantai produksi-konsumsi manusia pun semakin panjang. Pola ini mengingatkan kita bahwa dunia telah bergeser dari paradigma *kosmosentris* ke paradigma antroposentris. *Kosmosentris* memandang alam sebagai sesuatu yang sakral. Kosmos yang sakral membuat hidup manusia tidak terpisah dari alam. Dengan demikian, pada paradigma ini, manusia tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan karena alam merupakan bagian tidak terpisahkan dari dirinya dan berada dalam pola relasi yang sederajat. Dalam paradigma antroposentrisme, manusia menjadi pusat segala sesuatu. Manusia sangat mengandalkan rasionalitas dan subjektivitas yang individualis. Hal ini berdampak



pada pola relasi manusia dan alam. Pola relasinya menjadi *subordinatif* dan *dominatif*. Alam tidak lagi dipandang sakral dan tidak menjadi bagian dari dirinya sendiri. Alam dianggap sebagai benda mati yang bisa diatur. Akibatnya, manusia seenaknya melakukan eksploitasi terhadap alam untuk kepentingan diri sendiri. Ujungnya, sistem ekonomi pun menjadi terbalik. Semula orang memproduksi untuk memenuhi kebutuhan, sementara sekarang sistem ekonomi berfokus menciptakan kebutuhan konsumsi (yang perlu atau tidak perlu) dan produksi pun mengikutinya. Akibat dorongan konsumsi yang selalu diciptakan dan produksi yang terus digenjot maka bumi kita pun menjadi korban. Bumi dieksploitasi habis-habisan. Kapitalisme neoliberal diamini meski bencana ekologis mengintip dan perlahan pasti datang.

Hari-hari ini manusia tengah menuai bencana itu. Sejak Desember 2019, pelan tapi pasti, dunia memasuki *retreat* yang panjang. Aktivitas berhenti, pemerintahan di seluruh dunia menghadapi virus Covid-19 yang belum ditemukan vaksinnnya. Alam menunjukkan taringnya, mengurung manusia untuk tidak serakah. Manusia kemudian menjadi resah: ekonomi, agama, teknologi, birokrasi terkendala luar biasa. Negara-negara yang sebelum Covid-19 memberi jarak pada pengaturan ekonomi dan memberikan tempat seluas-luasnya kepada peran swasta melalui kapitalisme neoliberal kini kembali memainkan kendali penuh meski akhirnya tampak keteteran dan merapuh. Birokrasi yang menjadi

kaki tangan negara macet. Semua orang frustrasi dan kecewa dengan gerak negara yang cenderung lamban berhadapan dengan Covid-19<sup>1</sup>.

Di Indonesia, sejak pertengahan Maret 2020, seluruh pekerja kantor mengubah ritme kerjanya menjadi *work from home* (WFH). Kondisi ini menjadi pukulan telak di berbagai sektor kehidupan. Kelas menengah yang biasanya sibuk beraktivitas di berbagai tempat kini berdiam di rumah. Sektor informal bubar karena sepihnya aktivitas akibat pembatasan sosial berskala besar. Pekerja warteg, buruh bangunan, pedagang kecil, tukang parkir serabutan, pengemudi ojol dan taksi, sampai mal, kafe, gedung bioskop, hotel dan ruang-ruang diskusi serta seminar mengalami hibernasi. Saat roda ekonomi berhenti, risiko yang dihadapi ke depan semakin menyieramkan. Sebanyak 1,2-2 juta pekerja terkena PHK<sup>2</sup>.

Angka kemiskinan yang sejak reformasi bergulir coba dikurangi, dalam sekejap naik berkali-kali lipat. Mereka yang sempat terangkat dari kemiskinan, akibat Covid-19 akhirnya kembali ke jurang kemiskinan. Bantalan dan jaring pengaman sosial diturunkan. Dana 110 triliun direlokasi menjadi bantuan sosial bagi masyarakat. Hingga 8 Mei 2020, 479 daerah telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD. Dari laporan ini, komposisi belanja daerah mengalami perubahan, yaitu adanya penurunan belanja barang/

- 
1. Wibowo, A. Setyo. 2020. "Covid 19: Meditasi Heideggerian". Dalam *Majalah Basis*, Nomor 05-06, Tahun ke 69 2020, hlm. 11.
  2. Wibowo, A. Setyo. 2020. *Ibid.* Lihat pula <http://www.cnbcindonesia.com/news/20200408213040-4-150737/bikin-merinding-12-juta-pekerja-kena-phk-dirumahkan>.



jasa dari 24,87% menjadi 20,86% dan modal dari 18,16% menjadi 12,89%. Di sisi lain, ada kenaikan belanja lainnya, yaitu dari 24,63% menjadi 30,33% yang ditujukan untuk bansos dan belanja tidak terduga. Total belanja yang direalokasi dan *refocusing* sebesar Rp51,09 triliun, yang ditujukan untuk bidang kesehatan (Covid-19) sebesar Rp22,34 triliun, jaring pengaman sosial sebesar Rp18,88 triliun, dan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp9,88 triliun<sup>3</sup>.

Selain dampak ekonomi, Covid-19 juga membawa dampak lain dalam kehidupan sosial masyarakat. Timbul rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang di seputar kita, juga pada orang yang kita belum kenal. Sebagai contoh, saat membeli makanan, baik di rumah makan maupun warung kaki lima, ada kecurigaan yang muncul. Apakah pelayan bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus atau tidak, apakah pekerja warung mencuci tangan pada saat mengolah makanan yang dipesan atau tidak, dan seterusnya. Keraguan pun muncul. Prasangka dan diskriminasi terus terjadi, bukan hanya karena apakah seseorang menderita Covid-19, melainkan juga karena identitas yang sudah melekat padanya. Mereka diberikan label, stereotip, didiskriminasi, diperlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan status karena terasosiasi dengan sebuah penyakit. Relasi berubah, perilaku pun demikian.

Di sektor pendidikan, sekolah dan kampus lumpuh. Seluruh proses pendidikan dilakukan dari rumah. Covid-19 menyadarkan

3. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-perkembangan-ekonomi-dan-refocusing-anggaran-untuk-penanganan-covid-19-di-indonesia/>.

kita bahwa pendidikan yang selama ini sepenuhnya ditanggungkan pada sekolah telah berubah dan dikembalikan pada intinya, yaitu pendidikan keluarga. Orang tua diajak kembali memperhatikan pendidikan anak. Anggapan bahwa sekolah sebagai penanggung jawab tunggal atas pengajaran kini direvisi total. Kondisi ini membuat seluruh tatanan keluarga berbenah. Mau tidak mau, keluarga diharapkan menjadi tangguh karena ia satu-satunya ruang yang dianggap aman secara fisik maupun secara psikologis dari Covid-19.

Wabah ini telah merenggut ribuan nyawa manusia dan membuat dunia panik, takut, dan cemas. Orang tak lagi mampu menguasai serta mengendalikan diri dengan menciptakan situasi yang kondusif. Orang cenderung responsif terhadap penyebaran wabah ini sampai-sampai melupakan orang di sekitarnya. Bahkan berita-berita hoaks oleh berbagai media pun akan dibenarkan karena setiap pribadi dihalusinasi oleh keadaan.

Pada bagian lain, tata kelola dan perlakuan kita terhadap alam harus direfleksikan ulang. Proyek modernitas yang menurut Immanuel Kant merupakan proses “pendewasaan manusia” harus dikritik agar proyek ini tidak terus-menerus merusak alam yang artinya merusak dirinya sendiri (manusia). Salah satu pendapat kritis muncul dari filsuf Fritjof Capra yang mengungkapkan keberadaan dan makna kehidupan manusia dalam segala tingkatan, baik pada level biologis sampai ke level ekonomis dan spiritual, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan alam semesta dan seluruh isinya.



Berdasarkan pandangan Capra, pandemi Corona adalah bentuk pembalasan alam terhadap manusia yang telah mengingkari dirinya sendiri. Dalam terminologi Jawa, kita mengenal *sapa nandur bakal ngunduh* ‘siapa yang menanam akan menuai’.

Covid-19 telah membuat peradaban manusia modern dikoyak-koyak menjadi tak berharga. Kehidupan manusia modern yang dibangun berdasarkan pada kecepatan gerak, *linearitas* berpikir, ketajaman rasio, kemenangan cara pandang individualis, dan perang teknologi kini lumpuh total di hadapan virus yang tak kasat mata. Kita baru sadar bahwa manusia modern adalah manusia-manusia rapuh. Peradaban politik, ekonomi, sosial di bawah bendera modernisme kini berada di titik nadir dan layak untuk kembali dipertanyakan ulang. Mau dibawa ke manakah kehidupan manusia dan bumi ini? Apakah kita sudah berada di arah membangun yang benar? Mungkin inilah waktu yang diberikan kepada manusia untuk mempertanyakan apa yang telah mereka jalani selama ini. Mungkinkah manusia sedang berada pada ujung kepunahannya?

## **Pandemi yang Mendekonstruksi dan Upaya Merumuskan Tatanan Baru**

Fakta dan data virus Corona membuka sudut pandang bahwa ketidakpastian kognitif berhubungan dengan tingkat ketidakpastian yang terkait dengan kepercayaan dan sikap. Dalam situasi ini, satu sama lain tidak mampu diatasi oleh perusahaan industri kesehatan.

Setidaknya sejauh ini positivisme juga fenomenologi belum mampu menjawabnya.

Covid-19 menyadarkan kita bahwa manusia dan sistem pemikirannya sangat rapuh dan rentan. Kapitalisme sebagai buah gagasan manusia telah menghancurkan dirinya sendiri. Konsepsi neoliberalisme luluh lantak oleh Covid-19. Ideologi sistem ekonomi pasar kapitalisme dan sistem demokrasi dunia mengindikasikan kegagalan dalam membangun industri kesehatan untuk menghormati martabat manusia yang dibuktikan dengan langkanya alat-alat kesehatan. Di beberapa negara, industri tradisional mulai dilibatkan untuk menanggulangi kondisi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas basis ideologi pembangunan ekonomi tidak dapat menjamin martabat manusia dan keadilan sosial. Sementara sosialisme juga tak mampu menawarkan apa pun dalam kondisi semacam ini.

Kesimpulannya, ideologi ekonomi dan paradigma pembangunan kesehatan manusia dengan fakta empiris data wabah virus Corona sama dengan apa yang dikatakan oleh Daniel Bell dalam buku *The End of Ideology* (1960). Ia menuturkan bahwa ideologi *grand-humanistik* yang lebih tua, yang berasal dari abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah habis, dan ideologi baru yang lebih baik akan segera muncul. Daniel Bell berpendapat bahwa ideologi ekonomi, demokrasi, dan sistem politik telah menjadi tidak relevan di antara orang-orang yang “masuk akal”, dan pemerintahan masa depan akan didorong oleh penyesuaian dekonstruksi tatanan baru.



Maka perlu upaya dekonstruksi atas isme-isme dan instrumen pelaksanaannya. Tatanan baru pun mesti dirumuskan. Meminjam konsep filsafat analitik pascamodern yang dipopulerkan oleh Jacques Derrida (1930-2004), *dekonstruksi* ditujukan kepada upaya pembongkaran terhadap kemapanan pemaknaan simbol dan bahasa (analitik) yang melekat kesedaran manusia. Dekonstruksi istilah gerak sosial dalam konteks bencana wabah justru membatasi gerak persinggungan fisik yang bermuara pada jalinan sosial dan bertentangan dengan pemaknaan yang selama ini melekat kesedaran masyarakat umum sebagaimana aktivitas jabatan, berkelakuan, atau aktivitas fisik lain. Gerak sosial tersebut kemudian dapat diarahkan kepada aktivitas akal budi yang melibatkan segenap instrumen *ruhiah* meliputi rasa, karsa, dan cipta, untuk memproduksi konsep gerak sosial baru.

Selama ini, Covid-19 sering kali dinilai dari sisi negatif sebagai sebuah ancaman, tetapi satu hal yang luput dari kesadaran kita adalah bahwa wabah ini mendekonstruksi semua tatanan. Berangkat dari kenyataan bahwa pemerintah tidak membangun perencanaan yang baik dan selalu bergerak lambat, tata ruang itu kemudian diambil alih oleh swasta dan kekuatan modal. Tebersit di pikiran, “Apakah Covid-19 diciptakan bukan bebas nilai? Apakah ada sebuah gelombang baru pasca-Covid-19? Apakah ada sebuah upaya dekonstruksi dan konstruksi lain yang sudah disiapkan?”

## Hipotesis

Dalam kondisi ini penting untuk setidaknya membangun gagasan alternatif dan konstruksi baru dalam relasi-relasi sosial kebudayaan. Selama 3-4 bulan bercengkerama dengan Covid-19 telah menyadarkan banyak hal. *Pertama*, kita tidak bisa hidup sendiri. Institusi sekolah dan agama tidak lagi penting dan keluarga menjadi sandaran akhir sekaligus juga awal dari segalanya. Nilai utama relasi sosial berasal dari keluarga hingga melahirkan etik baru dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya.

Covid-19 mendekonstruksi semua tatanan tanpa teriakan revolusi. Maka hipotesis yang perlu dibuktikan adalah apakah puncak dari relasi sosial adalah gotong royong? Apakah puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama? Apakah puncak dari relasi politik adalah musyawarah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang ingin diuji dan dibuktikan dari serangkaian agenda Kongres Kebudayaan Desa. Dan kesemuanya itu tentu saja membutuhkan kesetaraan yang oleh Habermas dinamai sebagai *demokrasi deliberatif*. Rebut kesempatan untuk membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*. Dan hal ini tidak lepas dari nilai-nilai luhur nusantara, sehingga gagasan alternatif ini bercorak khas nusantara. Kita tidak lagi mengadopsi gagasan dari luar yang berjarak dengan konteks kita. Kita punya gagasan gotong royong, selain sosialisme dan kapitalisme.



## Kongres Kebudayaan Desa

Kita telah mencermati, mengalami, dan berjibaku dengan Covid-19 dan kenyataannya hingga hari ini kita belum bisa keluar darinya. Namun, tidak ada kata menyerah di dalamnya. Perjuangan harus berumur panjang. Maka siasat-siasat kebudayaan perlu dirumuskan untuk mengelak dari kehancuran dan kehilangan nyawa yang lebih banyak lagi, mengelak dari kepunahan manusia. Pandemi memberikan sisi positif bahwa manusia dengan segala daya, akal budi, dan kreativitasnya harus mencari ruang “perlawanan” yang lebih baik. Menyerah berarti mengantarkan kematian dan hancurnya kemanusiaan. Maka tidak ada kata lain selain terus berjuang. Dan perjuangan itu harus dimulai dari desa, sebuah entitas negara yang paling dekat dengan warganya. Tidak ada jenjang pemerintahan yang lebih dekat dengan warga selain desa.

Karena itulah perlu disusun serangkaian upaya untuk merumuskan tata nilai dan tata kehidupan baru bernegara dan bermasyarakat di era pandemi dan sesudahnya. Sekali lagi, dimulai dari desa. Apa dan bagaimana tatanan baru itu? Kongres Kebudayaan Desa (KKD) yang akan menjawabnya.

Kongres Kebudayaan Desa adalah pertemuan antara para pemangku desa (pemerintah desa, lembaga, komunitas, dan warga desa), para pemikir, akademisi yang memiliki ketertarikan terhadap isu desa ataupun bisa jadi lahir dan tumbuh dalam ekosistem desa, para praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan pekerja media yang



berupaya merumuskan kembali arah tatanan Indonesia baru dari desa.

Kongres ini melibatkan beberapa *stakeholder* yang meliputi ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community*, *government*, *finance*, dan media. Kesemuanya akan berkontribusi untuk bersama-sama dengan warga desa merumuskan tatanan Indonesia baru dari desa. Kongres ini bergerak pada dua ranah sekaligus. *Pertama*, tataran konseptual dengan menggali pemikiran-pemikiran dari para akademisi, pemikir, peneliti, praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan media yang menghasilkan dokumen-dokumen konseptual hasil olah pikir dan nalar budi. *Kedua*, tatanan praksis dengan menghasilkan dokumen panduan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) yang memberi pola tata kelola pemerintahan dan tata hidup baru warga desa untuk desa-desa di Indonesia.

## **Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara**

Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa. Dua bagian ini menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Kongres Kebudayaan Desa sebagai bagian dari upaya serius untuk merumuskan kembali tatanan Indonesia baru dari desa, sedangkan Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari perayaan kebudayaan, perayaan gagasan, rekognisi desa-masyarakat adat di Indonesia. Perayaan nusantara. Kongres adalah perayaan kebudayaan itu sendiri.



Maka tepat di sini jalinan dan upaya saling melengkapi antara bentuk kongres dan festival mewujud. Istilah *kongres* yang selama ini lekat dengan kesan serius dan penuh khidmat diubah menjadi sebuah perayaan. Pengertian *kongres* yang biasa dipahami sebagai bentuk pertemuan tertinggi, eksklusif, dan terpusat dari organisasi-organisasi sosial dan politik, kini dikembangkan menjadi semacam perhelatan dari ruang-ruang partisipasi masyarakat.

Maka festival kebudayaan ini didorong untuk merayakan dua hal sekaligus. *Pertama, culture experience*. Pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Dengan demikian kebudayaan lokal selalu dapat lestari. *Kedua, culture knowledge* yang merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri.

## **Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A: Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa**

Desa adalah tempat di mana sebagian besar kita berasal. Karenanya kita lebih fasih membaca desa *tinimbang* Indonesia. Faktanya, desa lebih dulu ada dibandingkan Indonesia. Bahkan hingga hari ini kita masih selalu saja terbata-bata membaca Indonesia. Artinya kita perlu mengeja ulang Indonesia. *Reason d'etre* agenda ini adalah desa maka yang harus dieja ulang adalah Indonesia yang sudah



sengkarut. Apakah Indo-nesia, Indon-esia, Ind-one-sia, In-do-nesia ataukah akan kita sebutkan dalam satu tarikan napas: Indonesia? Artinya, tanpa (huruf) D-E-S-A, kata Indonesia tak akan sempurna.

Bagaimana cara kita mengeja ulang sangat tergantung dari kemampuan kita membaca desa sebagai ibu bumi. Desa menjadi sosok ibu yang *nuturing, ngopeni, ngrumat, ngemonah, nggulowentah, murakabi* semua anggota keluarga.

Lihatlah di masa pandemik seperti ini. Orang-orang desa yang merantau ke kota mengalami kecemasan. Ia yang papa tak diterima di lingkungan kota dan terusir darinya. Kota menjadi tidak ramah. Lihatlah bagaimana orang mencuri-curi cara agar tetap pulang kampung ketika kota tak lagi menyediakan kerja dan orang-orang kelas menengahnya mengurung diri di rumah. Mereka pulang ke desa.

Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi tempat kembalinya para petarung kehidupan yang harus rela meninggalkan desa untuk bekerja di ibu kota dan karena kondisi saat ini harus kembali pulang. Kembalilah ke pangkuan ibu bumi, selayaknya ibu. Desa akan menerima kehadiran kembali, apa pun adanya kita saat ini. Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi, tempat kembali dan berbagi.

Tema ini ingin menguatkan Indonesia dari desa. Dan tampaknya ungkapan “masa depan Indonesia adalah desa” semakin relevan. *Merdesa* berasal dari kata *desa* dalam bahasa Jawa Kuno, artinya ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Dalam pengertian ini juga tersirat makna desa, suatu kawasan yang merdeka dan berdaulat.



Dalam rumus *otak-atik gathuk*, ada persamaan antara *paradise* (surga) dengan *paradesa*, *para* (tertinggi), maka kedudukan desa diletakkan dalam *maqam*, derajat, dan martabat di puncak paling atas. Desa merupakan visi, cita-cita tertinggi, pencapaian pembangunan surga di dunia nyata, yakni ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Layak secara ekonomi, layak secara sosial budaya, layak secara politik. Itulah sejahtera. Sedangkan patut (kepatutan) memiliki dimensi yang holistik: adanya pola hidup yang bersahaja, rukun, penuh kesederhanaan, tak ada individualisme karena sistem kehidupan dilandasi oleh pertimbangan kebersamaan, *komunalitas*, berjemaah, tidak mudah mengumbar keserakahan dan eksploitasi, tak ada yang dominan pada kepentingan diri pribadi karena orang yang mementingkan diri pribadi justru diyakini sedang membangun neraka dan dianggap durhaka, *dur-angkara*. Semua ada takarannya. Gandhi pun pernah berkata: “Bumi ini cukup untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, tetapi tidak cukup untuk keserakahan satu manusia.”<sup>4</sup>

Karenanya, upaya menuju kemandirian desa menjadi bagian penting dari Kongres Kebudayaan Desa. Terwujudnya kedaulatan politik dan pemerintahan desa, kedaulatan perekonomian desa, kedaulatan data desa, adalah syarat desa sebagai “*paradise*”. Tata kelola pemerintahan dan warga desa dalam tatanan baru Indonesia dengan sendirinya harus memastikan tata kelola pemerintahan dan

---

4. Raharjo, T. 2013. “Menyambut Buku Indonesia Bagian dari Saya”. <https://www.caknun.com/2013/menyambut-buku-indonesia-bagian-dari-desa-saya/>.

kehidupan sosial warga yang bersih dan antikorupsi, sejahtera lahir dan batin, pendidikan yang merdeka, dan seterusnya.

Penekanan kongres ini selain mengkaji tata kelola pemerintahan dan aspek-aspek kehidupan warga desa juga mengarusutamakan isu-isu antikorupsi. Membangun pemerintahan yang bersih dan politik yang bermartabat sangat mungkin didorong dari ruang negara yang lebih kecil, yaitu desa. Dan desa jauh lebih memungkinkan untuk menerapkan praktik tata kelola dan implementasi negara yang bebas dari korupsi.

Langkah yang lebih jauh, kongres ini berupaya memberikan tawaran alternatif untuk membangun kembali tatanan yang lebih setara, lebih adil, bermartabat, dan antikorupsi, serta model kehidupan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Tawaran alternatif tentang “*new normal*” akan mengisi ruang-ruang kosong tentang reproduksi pengetahuan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang selama ini seolah direduksi hanya pada tataran tata cara teknis kehidupan (cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). Tawaran ini juga menyediakan seperangkat panduan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa yang bisa diadopsi oleh sebanyak mungkin desa di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah desa-desa adat beserta masyarakat adat di seluruh nusantara.



## Kongres Kebudayaan Desa dalam Angka

Dua setengah bulan persiapan dan pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa (Juni-Agustus), memberikan gambaran-gambaran angka partisipasi berbagai *stakeholder* dalam KKD. Pertama, riset kondisi dan imajinasi masyarakat desa tentang arah tatanan Indonesia baru dari desa. Riset ini merespons pandemi dan harapan warga desa. Sebanyak 1.231 responden telah terlibat dan memberikan pandangannya. Rentang responden bergerak dari berbagai provinsi dari Aceh hingga Papua. Pengambilan data yang menggunakan Google Form cukup mampu menjangkau jumlah responden, warga, dan pemangku pemerintahan desa. Dilihat dari komposisi gender, responden cukup seimbang.

Kedua, *call for papers* Kongres Kebudayaan Desa. Menyadari bahwa tidak semua gagasan dan keterwakilan bisa diringkus dalam 20 seri webinar, KKD membuka seluas-luasnya ruang bagi masyarakat desa, akademisi, peneliti, warga desa, birokrat, aktivis sosial, mahasiswa, dan siapa pun yang memiliki ikatan serta pemikiran tentang desa untuk *urun rembuk* tentang tatanan Indonesia baru. Sebanyak 57 naskah masuk melalui *call for papers* KKD. Jumlah tersebut tentu saja diseleksi secara ketat untuk bisa masuk dalam buku yang diterbitkan sebagai bagian dari *output* KKD. Hasilnya, sebanyak 31 naskah lolos kurasi dan berhak masuk dalam buku yang diterbitkan.

Ketiga, seri webinar KKD yang dilaksanakan dalam rentang 10 hari berturut-turut (1-10 Juli 2020), 100 jam webinar dengan 20

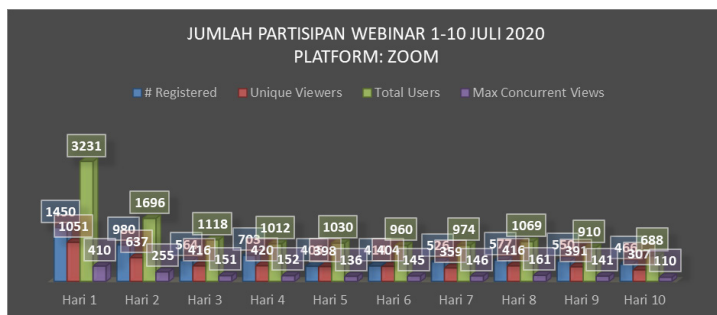


tema dan 20 *term of reference*, melibatkan 20 moderator di berbagai tempat di Indonesia serta 100 narasumber dari berbagai perspektif keilmuan dan keahlian.

Dua puluh tema webinar tersebut adalah: Seri 1. Arah Tatanan Baru Indonesia: “New Normal” Apa dan Bagaimana Hidup di Era Pandemi dan Sesudahnya; Seri 2. Ekonomi Berkeadilan: Perekonomian Desa dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 3. Pendidikan yang Membebaskan: Membalik Paradigma Pendidikan Urban; Seri 4. Kesehatan Semesta: Menghadirkan Kembali Kesehatan yang Setara untuk Semua dari Desa; Seri 5. Keamanan dan Ketertiban: Menghadirkan Rasa Aman dan Pelindungan dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Perempuan untuk Masa Depan Desa dan Arah Tatanan Indonesia Baru yang Inklusif; Seri 7. Kedaulatan Pangan dan Lingkungan Hidup: Merdeka Sandang, Pangan, dan Papan dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 8. Pemuda Desa: Merekonstruksi Ulang Formasi Strategis Pemuda Desa di dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 9. Agama: Dari Ritus ke Substansi (Transformasi Peran Agama dalam Mengawal Tatanan Nilai Indonesia Baru); Seri 10. Kebudayaan: Mengonstruksi Ulang Alam Pikiran Nusantara sebagai Basis Peradaban dan Tata Nilai Indonesia Baru; Seri 11. Tata Ruang Desa dan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman: Menegosiasikan Ulang Peta Ruang dan Lingkungan Pemukiman Desa; Seri 12. Reformasi Birokrasi: Merumuskan Tata Birokrasi Desa yang *Compatible* untuk Tatanan Indonesia Baru;



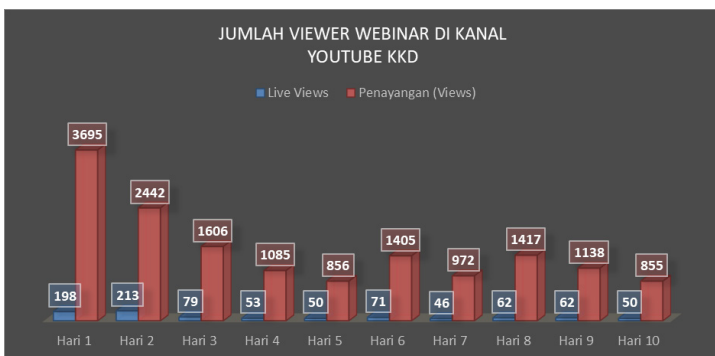
Seri 13. Hukum dan Politik Desa: Membangun Habitus Politik dan Regulasi yang Memuliakan Martabat Manusia dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 14. Prinsip Antikorupsi, Akuntabilitas, dan Transparansi: Membangun Sistem dan Habitus Antikorupsi dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 15. Datakrasi: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Berbasis Data Menuju Tatanan Indonesia Baru; Seri 16. Keluarga: Reformulasi Peran Strategis Keluarga dalam Pemuliaan Martabat Manusia untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 17. Kewarganegaraan: Merumuskan Pola Relasi Baru Warga Desa dan Negara untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 18. Komunikasi, Media, dan *Influencer*: Merumuskan Kebijakan Komunikasi Publik dalam Tata Pemerintahan Desa Menuju Indonesia Baru; Seri Khusus Inklusi Sosial: Mewujudkan Masyarakat Inklusif dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri Khusus Revitalisasi Desa: Merajut Desa Membangun sebagai Bagian Gerakan Global.



Tabel 1 Jumlah Peserta Webinar Melalui Aplikasi Zoom

Dari sisi partisipan seri webinar KKD menunjukkan angka partisipasi yang cukup besar. Dilihat dari data yang ditarik langsung dari aplikasi Zoom dan merupakan gambaran partisipan webinar dalam satu hari, tabel berikut menggambarkan jumlah partisipasi webinar melalui kanal Zoom.

Selain melalui kanal Zoom, peserta juga bisa mengikuti keseluruhan seri webinar melalui kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa, baik secara *live* atau tayang ulang. Sampai tanggal 18 Juli 2020, berikut data penayangan video webinar Kongres Kebudayaan Desa:



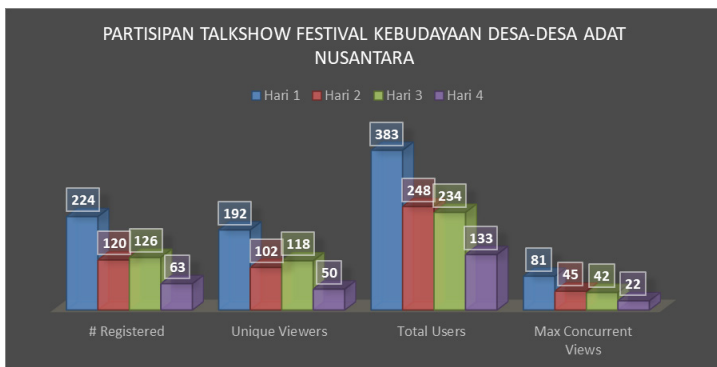
Tabel 2 Jumlah Peserta Webinar KKD Melalui YouTube

Selain ditayangkan melalui kanal resmi Kongres Kebudayaan Desa, serial webinar juga ditayangkan melalui kanal YouTube suara. com, *live* Facebook kata desa, bumdes.tv, Gatra.tv, kanal YouTube wiradesa dengan perkiraan *audience* lebih dari 10 ribu.

Keempat, Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara. Festival ini membicarakan secara khusus gagasan dan pemikiran tentang



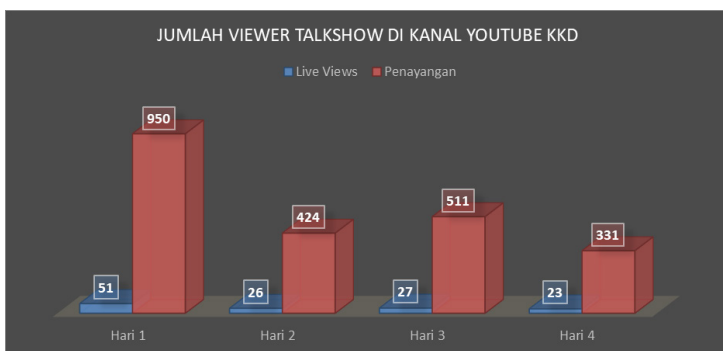
arah tatanan Indonesia baru dari perspektif desa-masyarakat adat di Indonesia. Ada 13 desa-masyarakat adat yang ambil bagian dalam seri *talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara, yaitu: Desa Adat Boti, NTT; Desa Adat Papua; Desa Adat Sigi, Sulawesi Tengah; Desa Adat Baduy, Banten; Desa Adat Aceh; Desa Adat Minang; Desa Adat Melayu; Desa Adat Batak; Desa Adat Tidore; Desa Adat Dayak; Desa Adat Bajo; dan Desa Adat Sasak. Desa adat menyampaikan gagasan, pemikiran, serta praktik-praktik hidup dan penghidupan dalam konteks sehari-hari, misalnya tentang bagaimana membangun desanya masing-masing untuk memberi perspektif yang lebih besar bagi tatanan Indonesia baru. Ada 34 narasumber yang berasal dari 13 desa-masyarakat adat di Indonesia dan 8 moderator serta 8 video yang diproduksi untuk tiap-tiap *talkshow*.



Tabel 3 Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via Zoom

Sama halnya dengan serial webinar Kongres Kebudayaan Desa, *talkshow* Festival Kebudayaan Desa juga ditayangkan langsung

melalui kanal YouTube resmi Kongres Kebudayaan Desa selama *talkshow* berlangsung. Selain itu, video *talkshow* juga diunggah ke kanal YouTube tersebut untuk memfasilitasi peserta yang tidak dapat mengikuti *talkshow* secara langsung. Berikut gambaran dari penayangan video *talkshow* Festival Kebudayaan Desa di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa sampai tanggal 18 Juli 2020.



Tabel 4 Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via YouTube

Kelima, penerbitan buku. Rangkaian KKD ini menghasilkan 21 buku, terdiri dari 19 buku dari seri webinar, 1 buku bunga rampai strategi pemajuan kebudayaan nusantara, dan 1 buku putih (berisi hasil riset KKD dan panduan penyusunan RPJMDesa). Desain buku ini menggambarkan keseluruhan hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa. Sampul tiap-tiap buku adalah bagian dari peta Indonesia mulai Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, yang menggambarkan kekayaan endemik satwa dan tetumbuhannya. Salah satunya seperti yang tengah Anda baca sekarang ini.

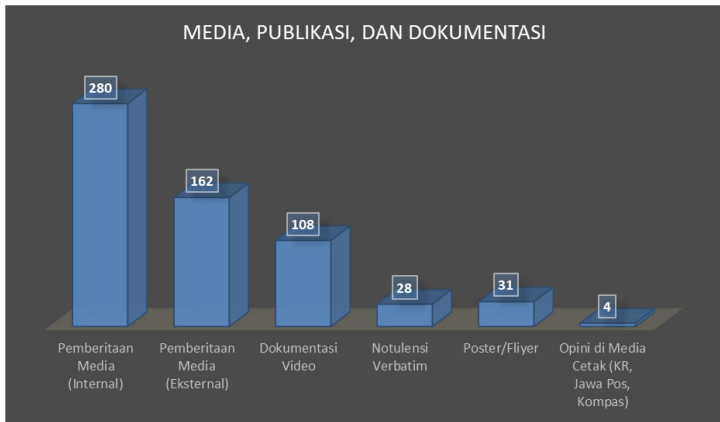


Keenam, buku putih Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa: Panduan Penyusunan RPJMDesa. Buku ini secara khusus merangkai hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa dan rekomendasi-rekomendasi yang selama pelaksanaan kongres terekam dengan baik. Selain itu buku ini juga merumuskan gagasan dan rekomendasi yang dihasilkan dari pembacaan atas diskusi/tanya jawab selama webinar, *call for papers*, maupun hasil riset.

Ketujuh, publikasi dan media. Ada 280 berita yang diproduksi oleh tim media KKD di laman [www.kongreskebudayaandesas.id](http://www.kongreskebudayaandesas.id); 162 berita yang tayang di media nasional, baik *online* maupun cetak; 108 video dokumentasi yang diproduksi dan terunggah di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa; 35 poster untuk tiap-tiap agenda kongres; dan ada 4 opini yang dimuat di koran *Kedaulatan Rakyat*, *Jawa Pos*, dan *Kompas*. Keseluruhan agenda webinar kongres dan *talkshow* festival juga didokumentasikan dalam *notulensi* verbatim sejumlah dua puluh delapan. Dan sebanyak 35 poster publikasi mengantarai semua agenda kongres.

Seluruh aktivitas pemberitaan dimulai dari 22 Juni hingga 27 Juli (ketika naskah ini dituliskan), artinya rerata dalam 1 hari ada sedikitnya 12 berita, baik yang diproduksi oleh tim internal KKD maupun media-media nasional, baik cetak maupun *online*.

Hampir keseluruhan rangkaian Kongres Kebudayaan Desa menggunakan platform *online*. Karena itu kanal-kanal informasi juga berbasis *online*. KKD menggunakan *landing page* utama web, diseminasi juga didesain menggunakan media sosial. Berikut jumlah



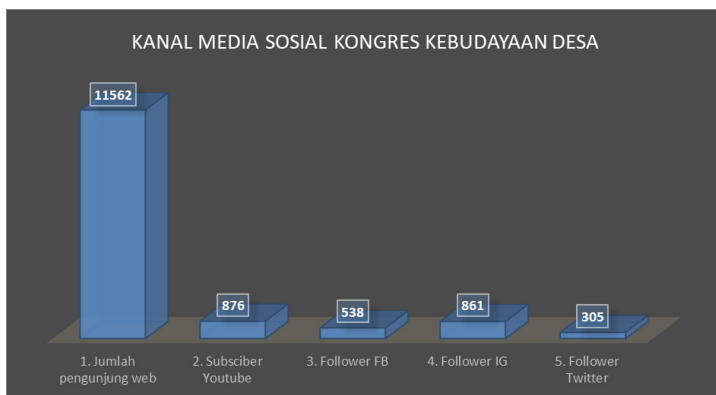
Tabel 5 Jumlah Pemberitaan, Publikasi, dan Dokumentasi KKD

jangkauan dari web utama dan media sosial yang digunakan selama pelaksanaan kongres. Catatan ini diambil tepat ketika epilog ini ditulis.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung [www.kongreskebudayaandesa.id](http://www.kongreskebudayaandesa.id) sejumlah 11.562 kunjungan, jumlah *subscriber* kanal YouTube 876, *follower* FB 538, *follower* IG 861, dan *follower* Twitter sebanyak 305. Angka itu dibukukan sejak 20 Juni 2020.

Kedelapan, dua kali “syukuran”. Di sela-sela pelaksanaan rangkaian kongres, penyelenggara menggelar dua *event offline*, yaitu Andrawina Budaya dan Suluk Kebudayaan. Andrawina Budaya dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta sekjen; Kiai Jadul Maula; serta berbagai jaringan pendukung kongres. Kedua, Suluk Kebudayaan yang digelar untuk memungkasi agenda Festival Desa-Desa Nusantara dan





Tabel 6 Gambaran Jangkauan Melalui Kanal Media Sosial KKD

menghadirkan budayawan Wani Dharmawan, Irfan Afifi, Nanang Garuda, dan lain-lain. Seluruh pelaksanaan agenda *offline* ini tetap menjalankan protokol kesehatan.

Kesembilan, jaringan kerja dan kepanitiaan. Kerja-kerja Kongres Kebudayaan Desa ini melibatkan 90 orang panitia penyelenggara yang terbagi dalam bagian-bagian kerja, mulai dari *steering committee*, tim LO, tim IT, tim festival, tim riset, tim *call for papers*, tim media, tim dokumentasi, tim buku, tim acara, tim perumus, tim administrasi dan keuangan, tim desain visual, tim medsos, tim konsumsi, tim *runner*, dan lain-lain. Selain itu pelaksanaan kongres juga didukung oleh 51 jaringan dan lembaga, dengan pendukung utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan GIZ. Secara umum kolaborasi

dari berbagai *stakeholder* ini dirumuskan ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community, government, finance*, dan media.

Kesepuluh, deklarasi arah tatanan Indonesia baru dari desa. Agenda deklarasi dibacakan Presiden Joko Widodo dua hari menjelang peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melibatkan para kepala desa dan seluruh rakyat Indonesia.

## Mengintip Hasil Kongres

Hingga epilog ini ditulis, tim perumus hasil-hasil kongres masih bekerja. Tim mencermati seluruh proses webinar, *notulensi*, makalah narasumber, naskah-naskah *call for papers*, hasil penelitian, hingga melihat ulang tayangan yang tersimpan di YouTube KKD. Semua itu akan menjadi bagian dari buku putih arah tatanan Indonesia baru dari desa yang disusun dalam panduan penyusunan RPJMDesa. Buku ini terdiri dari analisis kebijakan terkait desa, *review* RPJMN, *problematika*, dan isu-isu strategis kemandirian desa; visi Indonesia baru, asas, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, serta indikator-indikator arah tatanan Indonesia baru dari desa.

Dari sekian banyak rekomendasi yang dihasilkan dari Kongres Kebudayaan Desa, klaster utama rekomendasi adalah mewujudkan kemandirian desa melalui tiga pilar: *pertama*, kedaulatan politik dan pemerintahan desa; *kedua*, kedaulatan perekonomian desa; *ketiga*, kedaulatan data desa. Tiga pilar kemandirian desa inilah yang akan diintrodusir untuk bersama-sama membangun gerakan kemandirian



desa. Jika 75 ribu desa bergerak untuk membangun kemandiriannya maka gelombang ini akan dengan sendirinya mampu memperbaiki kondisi negara. Masa depan Indonesia adalah desa. Detail hasil-hasil kongres bisa Anda simak di buku *Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa* (Panduan Penyusunan RPJMDesa).

\*\*\*

Pada bagian akhir epilog panjang ini, kami hendak *menghaturkan* terima kasih *kagem* Bapak Dr. (H.C). Drs. H Abdul Halim Iskandar, M.Pd., Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta jajaran Kemendesa yang telah memberikan dukungan penuh terhadap Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJ KAKI) KPK, untuk dukungan yang luar biasa. Rasa terima kasih kami sampaikan pula kepada Bapak Dr. Hilmar Farid, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Mbak Meta Yanti mewakili GIZ untuk semua diskusi dan dukungannya. Juga kepada segenap jaringan kerja Kongres Kebudayaan Desa dengan segenap dukungan dan bentuknya. *Matur nuwun.*

Ucapan terima kasih sungguh-sungguh pula kami sampaikan kepada seluruh moderator, narasumber, dan tentu saja sobat Kongres Kebudayaan Desa yang selama pelaksanaan kongres terus terlibat



secara aktif, baik sebagai responden riset, *call for papers*, maupun sobat kongres yang mengikuti webinar dan *talkshow* festival.

Rasa bangga disertai ucapan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, inisiator Kongres Kebudayaan Desa, Lurah Desa Panggungharjo, beserta jajaran pemerintah desa yang terus *ngesubi* dan *ngemong* seluruh tim penyelenggara. Dan tentu saja kepada seluruh panitia penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa yang telah bekerja keras dan bekerja cerdas untuk bersama-sama menyelenggarakan KKD serta mengemas gagasan arah tatanan Indonesia baru dari desa. Sungguh sebuah kerja yang menyejarah. Untuk itu *matur nuwun*, terima kasih.

Akhirnya, semoga Kongres Kebudayaan Desa yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini memberi sumbangan yang besar kepada sebanyak mungkin desa juga kepada Indonesia. Sekali lagi kami sampaikan *sakalangkong, matur nuwun, hatur nuhun, matur suksme, amanai, muliate, tampiaseh, tarimo kasi, kurusumang'epanngawang*, terima kasih. Salam budaya desa. Panjang umur perjuangan![]

Senin, 28 Juli 2020

Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta





# Deklarasi

## ARAH TATANAN INDONESIA BARU DARI DESA

**M**engingat kekuatan tatanan kehidupan masyarakat desa merupakan hasil pergulatan nenek moyang dalam menggeluti pengalaman kosmologis, *epistemologis*, dan ontologis sehingga filosofi desa adalah filosofi yang mewujud dalam budi pekerti, perilaku, dan tindakan; serta mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 maka kekuatan desa harus dijadikan modal sosial, budaya, ekonomi, dan politik bagi arah tatanan baru masyarakat.

Pandemi membuat manusia harus terus berjuang mencari ruang kehidupan yang lebih baik. Dan perjuangan itu telah dimulai melalui Kongres Kebudayaan Desa yang mengajak desa-desa Indonesia bergerak dan bangkit dengan kesadaran *kebhinekaan* dalam merumuskan tatanan baru bangsa Indonesia. Bahwa desa-desa yang membentuk ke-Indonesia-an harus membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*.

Bahwa tatanan itu lahir dari kekayaan sejarah panjang pengetahuan nusantara dan cara pandang jauh ke depan dengan kesadaran bahwa puncak dari relasi sosial adalah gotong royong, puncak dari relasi politik adalah musyawarah, dan puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama. Bahwa semua itu bersumber dari kekayaan kebudayaan desa dari Aceh hingga Papua.

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur maka desa menyatakan cita-cita tatanan Indonesia baru dari desa adalah terselenggaranya politik pemerintah desa yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif, emansipatif, tenggang rasa, berdaya tahan, mandiri, serta memuliakan kelestarian semesta ciptaan melalui pendayagunaan datakrasi yang ditopang oleh cara kerja pengetahuan dan pengamalan lintas ilmu bagi terwujudnya distribusi sumber daya yang setara untuk kesejahteraan warga.

Bahwa perwujudan tatanan Indonesia baru dari desa tersebut ditempuh dengan cara menjadikan desa sebagai arena demokratisasi politik lokal sebagai wujud kedaulatan politik, menjadikan desa



sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal sebagai wujud kedaulatan ekonomi dan *pemberkuasaan* desa melalui aktualisasi pengetahuan warga sebagai wujud kedaulatan data.

Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kemandirian dan inovasi desa yang mampu mengelola kewenangan dan hak atas asal-usulnya, yang mampu memberikan *pemberkuasaan* pada warga desa. Kita berdoa memohon rahmat, hidayah, kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, menyongsong Tatanan Indonesia Baru dari Desa.

Salam budaya desa. Panjang Umur Perjuangan.[]

Yogyakarta 15 Agustus 2020



## KERABAT KERJA KONGRES KEBUDAYAAN DESA 2020

### Dewan Pengarah

1. Wahyudi Anggoro Hadi (Ketua)
2. Rumakso Setyadi
3. FX Rudy Gunawan
4. Andreas Budi Widyanta
5. Eko Pambudi
6. Ilham Yuli Isdiyanto
7. Achmad Musyaddad
8. Ryan Sugiarto

### PANITIA KONGRES KEBUDAYAAN DESA

#### Ketua: Ryan Sugiarto

#### A. Strategis Business Unit: Sholahuddin Nur'azmy

##### Administrasi dan Keuangan

1. Ahmad Arief Rohman  
(Koordinator)
2. Any Sundari
3. Rindy Widya Rasmono
4. Cintya Raffa Fathiya

##### Tim Media

1. Edy SR (Koordinator)
2. Ahmad Za'im Yunus
3. Ashilly Achidsti
4. Elyvia Inayah
5. Endah Sulistyorini
6. Gunawan Wibisono
7. Lutfi Retno Wahyudyanti
8. Vitus Kevinda Bramantya Viastra

##### Tim Humas

1. Muhammad Zidny Kafa  
(Koordinator)
2. Aina Ulfah
3. Lina Listia

4. Nava Anggita Ardiana
5. Yesseta Novi Sukma

##### Tim Dokumentasi

1. Akhmad Nasir (Koordinator)
2. Amirul Mukmin
3. Annisa Suryantari
4. Ari Aji Heru Suyono
5. Khoiril Azmi
6. Shavira L. Phinahayu
7. Syaiful Choirudin
8. Veronika Yasinta
9. Windi Meilita W.

##### Tim IT

1. Muhammad Hanif Rifai  
(Koordinator)
2. Ahmad Mizdad Hudani
3. R. Nurul Fitriana Putri
4. Adam Hanafi Syafrudin
5. Damar Saksomo Jati



## **B. Program: Aditya Mahendra Putra**

### **Tim Webinar**

1. Ambar Sari Dewi (Koordinator)
2. Angga Kurniawan
3. Emira Salma
4. Farhan Al Faried
5. Johan Visky Catur Aga
6. Okky Yayan Putra Armanda
7. Robi Setiyawan
8. Ruliyanto
9. Satrio Yoga Rachmanto
10. Tommy Destryanto
11. Toni Fajar Ristanto
12. Tri Muryani
13. Yusan Aprilianda

### **Tim Festival**

1. Eko Nuryono (Koordinator)
2. Gundhi Aditya
3. Hardiansyah Ay
4. Linggar Ajikencono
5. Mona Kriesdinar
6. Nanang Garuda
7. Nandar Hutadima Idamsik
8. Nurohmad
9. Raliyanto Bw
10. Saptaji Prasetyo
11. Siska Aprisia
12. Very Hardian Kirnanda
13. Warsono

### **Tim Buku dan Call Of Papers**

1. Faiz Ahsoul (Koordinator)
2. Ageng Indra Sumarah
3. Agus Teriyana
4. Ahmad Yasin
5. Amanatia Junda Solikhah
6. Asy Syaffa Nada Amatullah
7. Berryl Ilham
8. Chusna Rizqati
9. Citra Maudy Mahanani
10. Rheisnayucyntara
11. Dadang Ari Murtono
12. Diah Rizki Fitriani
13. Dwi Cipta
14. Dyah Permatasari
15. Fawaz
16. Fitriana Hadi
17. Fiqih Rahmawati
18. Gregorius Ragil Wibawanto
19. Irfan Afifi
20. Iswan Heriadjie
21. Ketjilbergerak
22. Kusharditya Albihafifzal
23. Prima Hidayah
24. Rio Anggoro Pangestu
25. Rofi Ali Majid
26. Suhairi Ahmad
27. Yona Primadesi





